

LAPORAN TAHUNAN
PENELITIAN HIBAH BERSAING



**PERANAN EKOSISTEM MANGROVE DALAM MENDUKUNG
SISTEM PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN
MUARAGEMBONG KABUPATEN BEKASI**

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

KETUA/ANGGOTA TIM

Dr. Hilwati Hindersah, Ir., MURP.	0016055801
Dr. Yulia Asyiawati, Ir., MSi.	0419077001
Lely Syiddatul Akliyah, ST., MSi.	0429078003

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

November 2014

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Peranan Ekosistem Mangrove Dalam Mendukung Sistem Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Dr. Hilwati Hindersah, Ir., MURP.
NIDN : 0016055801
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Perencanaan Wilayah & Kota
Nomor HP : 08122348850
Alamat surel (e-mail) : hilwati_hindersah@yahoo.com
Anggota Peneliti (1)
Nama Lengkap : Dr. Yulia Asyiwati, Ir., MSi.
NIDN : 0419077001
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Bandung
Anggota Peneliti (2)
Nama Lengkap : Lely Syiddatul Akliyah, ST., MSi.
NIDN : 0429078003
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Bandung
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 45.000.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp. 120.000.000,-

Bandung, 3 November 2014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik,

Ketua Peneliti,


Dr. Hilwati Hindersah, Ir., MURP.
NIP. 195805161987102001


Dr. Hilwati Hindersah, Ir., MURP.
NIP. 195805161987102001

Menyetujui,
Ketua LPPM Unisba


Prof. Dr. Edi Setiadi, SH., MH.
NIP. 195911101987031002

RINGKASAN

Keberadaan ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, saat ini mengalami penurunan seiring dengan berkembangnya pembangunan yang mengubah fungsi kawasan dari fungsi lindung ke fungsi budidaya. Berkurangnya mangrove di pesisir Kecamatan Muaragembong yang justru merupakan kawasan perdesaan terjadi karena banjir dan konversi lahan. Hal itu berakibat pada penurunan produksi ikan dan menurunnya fungsi mangrove sebagai perlindungan dan pengaman pantai secara alami. Akibat lebih lanjut adalah menurunnya tingkat pendapatan penduduk akibat produksi ikan menurun.

Berdasarkan hal itu, maka diperlukan adanya penelitian mengenai seberapa besar peranan ekosistem mangrove dalam mendukung sistem perekonomian masyarakat di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji seberapa besar peranan ekosistem mangrove dalam mendukung sistem perekonomian masyarakat di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi dengan harapan hasilnya dapat memberikan masukan kebijakan dalam meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat setempat.

Target temuan yang ingin dicapai adalah: a. Identifikasi permasalahan yang menyebabkan perubahan ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong; b. Nilai manfaat ekonomi ekologis ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi; c. Peranan ekosistem mangrove terhadap tingkat ekonomi masyarakat Muaragembong; d. Strategi pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan untuk menyempurnakan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya dalam rencana pengembangan kawasan pesisirnya.

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan survey data-data sekunder dan survei primer ke lapangan menggunakan alat survei kuesioner dan wawancara. Adapun metode analisis yang digunakan untuk mencapai luaran penelitian di atas, dibagi dalam 2 tahap karena kegiatan yang akan dilakukan direncanakan selama 2 tahun berturut-turut. Pada tahapan 1 dilakukan identifikasi ekosistem mangrove di wilayah studi, analisis kebijakan dan analisis berdasarkan Kepmen Lingkungan Hidup No. 210 tahun 2004 untuk mengkaji status ekosistem. Selain itu dilakukan analisis tingkat kualitas ekosistem, dan analisis tingkat pendapatan penduduk.

Output analisis 1 akan dijadikan sebagai masukan pada tahap II untuk melakukan analisis prediksi nilai ekonomi ekosistem mangrove menggunakan analisis CVM (*Contingency Value Methods*). Kemudian dilakukan analisis peranan ekosistem terhadap tingkat pendapatan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan didapatkan status kerapatan pohon berkisar antara 59-1450 pohon/ha dan terdapat banyak komponen nilai manfaat ekosistem mangrove yang diidentifikasi melalui metode biaya perjalanan atau kemampuan membayar nilai manfaat dari ekosistem hutan mangrove

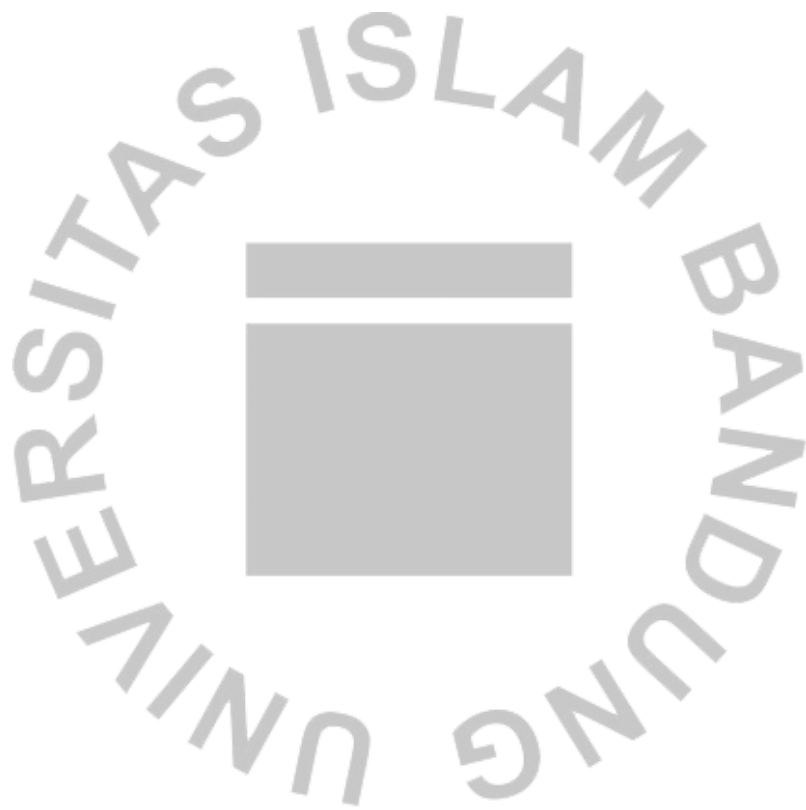
Keyword: Ekosistem Mangrove, Status Ekosistem, Tingkat Pendapatan, Nilai Manfaat

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	2
1.3 Urgensi Penelitian	3
1.4 Temuan Yang Ditargetkan	3
1.5 Luaran Penelitian	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 5
2.1 Definisi Hutan Mangrove dan Ekosistem Mangrove	5
2.2 Peranan Ekologis Mangrove	5
2.3 Peranan Sosial Ekonomis Mangrove	6
2.4 Konsep Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam	6
2.5 Analisis Regresi Linier Berganda	10
2.6 Analisis SWOT	10
2.7 Studi Pendahuluan dan Peta Jalan Penelitian	11
 BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	 13
 BAB IV METODE PENELITIAN	 14
4.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	14
4.2 Tahapan Penelitian	15
4.3 Metode Analisis	16
 BAB V HASIL YANG DICAPAI	 18
5.1 Tinjauan Kebijakan	18
5.1.1 Tinjauan Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029	18
5.1.1.1 Rencana Struktur Ruang	18
5.1.1.2 Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah	23
5.1.1.3 Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Perhubungan	24
5.1.1.4 Rencana Pengembangan Prasarana Sumber Daya Air dan Irigasi	27
5.1.1.5 Rencana Pengembangan Prasarana Energi dan Kelistri-	

kan	28
5.1.1.6 Rencana Pengembangan Prasarana Telekomunikasi	29
5.1.1.7 Rencana Pengembangan Permukiman	30
5.1.1.8 Rencana Pola Ruang.....	31
5.1.1.9 Rencana Kawasan Strategis.....	40
5.1.2 Tinjauan Kebijakan Pengembangan JABODETABEKPUNJUR..	41
5.1.2.1 Arahan Struktur Tata Ruang JabodetabekPunjur	41
5.1.2.2 Kawasan Jabodetabek	42
5.1.2.3 Kawasan Bopunjur	43
5.1.2.4 Sistem Transportasi Regional JABODETABEKPUNJUR	44
5.1.3 Tinjauan Kebijakan Kabupaten Bekasi	46
5.1.3.1 Tinjauan Terhadap RPJM Kabupaten Bekasi.....	46
5.1.3.1.1 Visi Pembangunan Kabupaten Bekasi	46
5.1.3.1.2 Misi Pembnagunan Kabupaten Bekasi	46
5.1.3.2 Tinjauan Terhadap RTRW Kabupaten Bekasi	49
5.1.3.3 Tinjauan Terhadap Sistem Transportasi Kabupaten Bekasi (Tatralok).....	53
5.1.3.3.1 Konsep Idealisasi Pengembangan Jaringan Jalan	53
5.1.3.3.2 Konsep Idealisasi Pengembangan Jaringan Pelayanan Angkutan Orang	55
5.1.3.3.3 Konsep Idealisasi Pengembangan Jaringan Pelayanan Angkutan Barang.....	57
5.1.3.3.4 Konsep Idealisasi Pengembangan Jaringan Jaringan Rel	58
5.1.3.4 Kebijakan Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi	60
5.1.3.5 Kajian RDTR Kecamatan Muaragembong	61
5.1.3.5.1 Rencana Sruktur Ruang Kecamatan Muaragem- bong	61
5.1.3.5.2 Rencana Pengembangan Blok Fungsional	63
5.1.3.5.3 Kebijakan Mengenai Abrasi, Sedimentasi, dan Per- ubahan Garis Pantai	65
5.2 Kondisi Eksisting Kecamatan Muaragembong	71
5.2.1 Kondisi Administrasi dan Geografis	71
5.2.2 Kemiringan Lereng dan Morfologi Wilayah	73
5.2.3 Kondisi Hidrologi	73
5.2.4 Kondisi Penggunaan Lahan	74
5.2.5 Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan	78
5.2.6 Kondisi Sosial dan Kependudukan	80
5.2.6.1 Jumlah Penduduk	80
5.2.6.2 Kondisi Sosial Masyarakat	81
5.2.7 Kondisi Perekonomian Masyarakat	82
5.2.8 Kondisi Budaya Masyarakat	84
5.3 Kondisi Ekosistem Mangrove	84
5.3.1 Identifikasi Luas dan Kerapatan Eksositem Mangrove	86
5.3.2 Identifikasi Nilai Manfaat Ekosistem Mangrove	87

BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	92
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	97



DAFTAR TABEL

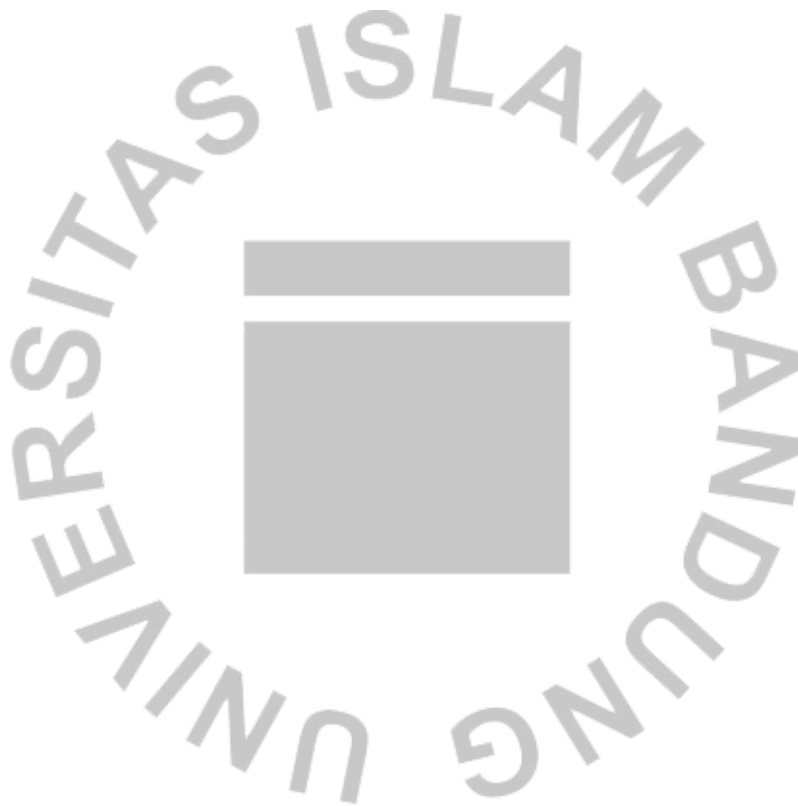
No. Tabel	Hal.
5.1	Sistem Perkotaan PKN Kawasan Perkotaan BODEBEK 21
5.2	Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Bekasi Menurut Jabodetabek- punjur 45
5.3	Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten Bekasi 2011-2031 49
5.4	Rencana Pengembangan Blok Fungsional 64
5.5	Kebijakan Terkait Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi .. 67
5.6	Lokasi Abrasi dan Sedimentasi di Wilayah Pantai Utara Kabupaten Bekasi 68
5.7	Luas Wilayah Kecamatan Muaragembong 73
5.8	Penggunaan Lahan di Kecamatan Muaragembong 75
5.9	Kondisi Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan di Kecamatan Muara gembong 76
5.10	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Muaragembong Tahun 2010-2011 81
5.11	Produksi Budidaya Ikan di Kecamatan Muaragembong Tahun 2011.... 82
5.12	Kerapatan Pohon Mangrove di Muaragembong 86
5.13	Kriteria Baku Kerusakan Mangrove 89
5.14	Kriteria Penentuan Status Ekosistem Mangrove di Kecamatan Muara Gembong 90
5.15	Kerapatan Pohon Mangrove di Muaragembong 91

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Hal.
2.1 Peta Jalan Penelitian	12
4.1 Kerangka Pemikiran	14
4.2 Diagram Tahapan Penelitian	15
5.1 Peta Administrasi Kecamatan Muaragembong	72
5.2 Kondisi Daerah Aliran Sungai di Anak Sungai Citarum Kecamatan Muaragembong	74
5.3 Peta Tata Guna Lahan Kecamatan Muaragembong	77
5.4 Peta Kondisi Lingkungan Kecamatan Muaragembong	79
5.5 Foto Udara Daerah Budidaya Tambak	83
5.6 Gambar Buah Mangrove	88

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Hal.
Lampiran 1 Panduan Wawancara	97
Lampiran 2 Biodata Peneliti	98
Lampiran 3 Formulir Evaluasi Atas Capaian Luaran Kegiatan	112
Lampiran 4 Draft Artikel Jurnal Akreditasi Nasional	115



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan yang terjadi pada wilayah pesisir dan laut tidak hanya sekedar gejala alam semata, tetapi kondisi ini sangat besar dipengaruhi oleh aktifitas manusia yang ada di sekitarnya. Wilayah pesisir merupakan wilayah pintu gerbang bagi berbagai aktifitas pembangunan manusia dan sekaligus menjadi pintu gerbang dari berbagai dampak dari aktifitas tersebut. Dengan kata lain wilayah pesisir merupakan wilayah yang pertama kali dan paling banyak menerima tekanan dibandingkan dengan wilayah lain. Tekanan tersebut muncul dari aktivitas pembangunan seperti pembangunan permukiman dan aktivitas perdagangan karena wilayah pesisir paling rentan terhadap perubahan baik secara alami ataupun fisik sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan, salah satunya adalah ekosistem mangrove.

Ekosistem mangrove sering disebutkan sebagai hutan payau atau hutan bakau. Ekosistem mangrove merupakan tipe hutan daerah tropis yang khas tumbuh disepanjang pantai atau muara sungai yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempuran ombak. Pengertian ekosistem mangrove secara umum adalah merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur (*Bengen, 2000*). Bila dibandingkan dengan ekosistem hutan yang lain, maka ekosistem mangrove memiliki flora dan fauna yang spesifik dan memiliki keanekaragaman yang tinggi.

Keberadaan ekosistem mangrove di pesisir Kabupaten Bekasi saat ini mengalami penurunan seiring dengan berkembangnya pembangunan yang mengubah fungsi kawasan dari fungsi lindung ke fungsi budidaya yang mengakibatkan hutan mangrove di beberapa daerah pesisir dan pantai Kabupaten Bekasi mengalami penurunan. Salah satu daerah yang mengalami hal tersebut adalah daerah pesisir di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi. Hal ini

terjadi sebaliknya pada kawasan pesisir yang terletak di area perkotaan yang justru mendapat pemeliharaan baik dari masyarakat setempat dan Pemerintah Kota. Fenomena pengelolaan hutan mangrove yang dilaksanakan masyarakat secara kolektif di Kawasan Perkotaan Denpasar secara nyata telah menjadikan keberadaan hutan mangrove tetap lestari. (Hindersah & Kusuma, 2010).

Berkurangnya mangrove di pesisir Kecamatan Muaragembong yang justru merupakan kawasan perdesaan terjadi selain disebabkan oleh banjir juga karena konversi lahan pada beberapa daerah dari hutan mangrove menjadi daerah pertanian dan permukiman penduduk. Hal tersebut berpengaruh pada produksi perikanan, terbukti dari menurunnya beberapa jenis produksi perikanan yang dikembangkan dengan mangrove sebagai fasilitas perkembangbiakkannya.

Penurunan tersebut akan terus berlanjut apabila tidak dicarikan sebuah solusi yang terkait dengan pengelolaan untuk mempertahankan keberadaan hutan mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi. Beberapa dampak negatif akan timbul sebagai akibat dari hilangnya komunitas mangrove, yaitu fungsi perlindungan dan pengaman pantai secara alami membahayakan oleh hutan mangrove akan hilang, sehingga bagi lahan pertanian dan permukiman penduduk di sekitar pantai yang secara otomatis akan terkena limpasan gelombang laut yang lebih bersifat merusak.

Sedangkan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, penurunan produksi perikanan yang berbanding lurus dengan hilangnya areal hutan mangrove akan berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat. Disamping itu apabila pertanian dan perkebunan yang berada di sekitar pesisir terkena gelombang air laut yang tentunya juga akan berakibat pada menurunnya produksi panen.

Bertolak dari hal tersebut di atas, maka timbul pertanyaan ***seberapa besar peranan ekosistem mangrove dalam mendukung sistem perekonomian masyarakat di Kecamatan Muaragembong?***

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji seberapa besar peranan ekosistem mangrove dalam mendukung sistem perekonomian masyarakat di Kecamatan

Muaragembong, Kabupaten Bekasi dengan harapan hasilnya dapat memberikan masukan-masukan dalam meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan strategi-strategi dalam pemanfaatan dan pengawasan penggunaan lahan mangrove agar nilainya tidak semakin menurun, baik secara ekonomi maupun ekologis secara berkelanjutan.

1.3 Urgensi Penelitian

Ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi ini diharapkan memiliki nilai manfaat ekonomi dan ekologis yang tinggi namun hingga saat ini mengalami penurunan akibat banjir dan perubahan fungsi lahan. Penurunan tersebut akan terus berlanjut apabila tidak dicarikan sebuah solusi yang terkait dengan pengelolaan untuk mempertahankan keberadaan hutan mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi. Akibat fenomena tersebut, akan timbul dampak negatif akibat dari hilangnya komunitas mangrove, seperti hilangnya fungsi perlindungan dan pengaman pantai secara alami, sehingga lahan pertanian dan permukiman penduduk di sekitar pantai akan terkena limpasan gelombang laut yang lebih bersifat merusak. Hal itu tentunya akan berakibat pada penurunan tingkat ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini sangat penting untuk mengungkap seberapa besar nilai manfaat ekonomi ekologis ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi ini dan bagaimana peranannya terhadap tingkat ekonomi masyarakat. Dengan hasil tersebut, diharapkan dapat disusun strategi-strategi yang tepat agar ekosistem mangrove tersebut tetap terjaga secara berkelanjutan.

1.4 Temuan Yang Ditargetkan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa temuan diantaranya:

1. Identifikasi permasalahan yang menyebabkan perubahan ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong.
2. Nilai manfaat ekonomi ekologis ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi.

3. Peranan ekosistem mangrove terhadap tingkat ekonomi masyarakat Muaragembong.
4. Strategi pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan untuk menyempurnakan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya dalam rencana pengembangan kawasan pesisirnya.

1.5 Luaran Penelitian

Berdasarkan hasil temuan yang ditargetkan, maka Luaran Penelitian yang akan dihasilkan adalah:

1. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove yang terdapat di kawasan pesisir Kabupaten Bekasi.
2. Publikasi hasil penelitian di Jurnal 'Perencanaan Wilayah dan Kota' (Nasional) dan Jurnal 'Environmental Planning and Management' (International).
3. Masukan untuk Bahan Ajar pada Mata Kuliah yang diampu Ketua dan 2 Anggota Peneliti yaitu: Mata Kuliah Manajemen Lingkungan, Pengetahuan Lingkungan, Ekonomi Sumber Daya Lingkungan, Metoda Analisis Perencanaan dan Ekonomi Wilayah dan Kota.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Hutan Mangrove dan Ekosistem Mangrove

Hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut tetapi tidak terpengaruh oleh iklim. Sedangkan daerah pantai adalah daratan yang terletak di bagian hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berbatasan dengan laut dan masih dipengaruhi oleh pasang surut, dengan kelerengan kurang dari 8% (Departemen Kehutanan, 1994 dalam Santoso, 2000). Hutan mangrove ini dapat terletak baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan pedesaan.

Menurut Nybakken (1992, dalam Bengen, 2000), hutan mangrove adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Hutan mangrove meliputi pohon-pohon dan semak yang tergolong ke dalam 8 famili, dan terdiri atas 12 genera tumbuhan berbunga : *Avicennie*, *Sonneratia*, *Rhizophora*, *Bruguiera*, *Ceriops*, *Xylocarpus*, *Lummitzera*, *Laguncularia*, *Aegiceras*, *Aegiatilis*, *Snaeda*, dan *Conocarpus* (Bengen, 2000).

Ekosistem mangrove adalah suatu sistem di alam tempat berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan diantara makhluk hidup itu sendiri, terdapat pada wilayah pesisir, terpengaruh pasang surut air laut, dan didominasi oleh spesies pohon atau semak yang khas dan mampu tumbuh dalam perairan asin/payau (Santoso, 2000).

2.2 Peranan Ekologis Mangrove

Menurut Anwar & Gunawan (2007), peranan ekologis mangrove diantaranya:

- a. Sebagai tempat pemijahan ikan di perairan, pelindung daratan dari abrasi oleh ombak, pelindung daratan dari tiupan angin, penyaring intrusi air laut ke daratan

dan kandungan logam berat yang berbahaya bagi kehidupan, tempat singgah migrasi burung, dan sebagai habitat satwa liar serta manfaat langsung lainnya bagi manusia.

- b. Hutan mangrove mampu mengikat sedimen yang terlarut dari sungai dan memperkecil erosi atau abrasi pantai.
- c. Mangrove menambah unsur hara
- d. Mangrove meningkatkan produksi perikanan
- e. Mangrove dapat menekan intrusi air laut
- f. Mangrove berperan terhadap kesehatan.
- g. Mangrove memiliki fungsi ekologis sebagai habitat berbagai jenis satwa liar.

2.3 Peranan Sosial Ekonomis Mangrove

Contoh pemanfaatan mangrove, baik langsung maupun tidak langsung antara lain Anwar & Gunawan (2007): arang dan kayu bakar, bahan bangunan, bahan baku *Chip*, tannin, nipah, obat-obatan, perikanan dan rehabilitasi mangrove, pertanian, pariwisata.

2.4 Konsep Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam

Konsep dasar valuasi merujuk pada kontribusi suatu komoditas untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ekologi, sebuah gen bernilai tinggi apabila mampu berkontribusi terhadap tingkat *survival* dari individu yang memiliki gen tersebut. Dalam pandangan *ecological economics*, nilai (*value*) tidak hanya untuk memaksimalkan kesejahteraan individu tetapi juga terkait dengan keberlanjutan ekologi dan keadilan distribusi (Constanza dan Folke, 1997; Bishop, 1997; Constanza, 2001 dalam Hiariey, 2009).

Valuasi ekonomi merupakan upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan, baik atas dasar nilai pasar (*market value*) maupun nilai non-pasar (*non market value*). Valuasi ekonomi sumberdaya merupakan suatu alat ekonomi (*economic tool*) yang menggunakan teknik penilaian tertentu untuk mengestimasi nilai uang dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan.

Pemahaman tentang konsep valuasi ekonomi memungkinkan para pengambil kebijakan dapat menentukan penggunaan sumberdaya alam dan lingkungan yang efektif dan efisien. Hal ini disebabkan aplikasi valuasi ekonomi menunjukkan hubungan antara konservasi SDA dengan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, valuasi ekonomi dapat dijadikan alat yang penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dengan bijak.

Penilaian ekonomi dari seluruh manfaat sumberdaya hutan mangrove menggunakan tahap pendekatan seperti dilakukan oleh Ruitenbeek (1991, dalam Hiariey, 2009).

1. Identifikasi manfaat dan fungsi ekosistem mangrove

Bertujuan untuk memperoleh data tentang berbagai macam manfaat dan fungsi ekosistem hutan mangrove, yaitu terdiri dari :

a. Manfaat Langsung (ML)

Manfaat langsung adalah nilai yang dihasilkan dari pemanfaatan langsung dari hutan mangrove seperti menangkap ikan, kayu bakar dan wisata (Fauzi, 2006).

$ML = ML1 + ML2 + ML3 + \dots + MLn$ (dimasukkan kedalam nilai Rupiah)

Dimana :

ML = Manfaat Langsung

ML1 = Manfaat Langsung soa-soa

ML2 = Manfaat Langsung kusu

ML3 = Manfaat Langsung kayu bakar

ML4 = Manfaat Langsung ikan

ML5 = Manfaat Langsung kerang

ML6 = Manfaat Langsung kepiting

b. Manfaat Tidak Langsung (MTL)

Manfaat tidak langsung adalah nilai yang dirasakan secara tidak langsung terhadap barang dan jasa yang dihasilkan sumberdaya dan lingkungan (Fauzi, 2006). Manfaat tidak langsung dari hutan mangrove diperoleh dari suatu ekosistem secara tidak langsung seperti penahan abrasi pantai (Fahrudin, 1996

dalam Hiariey, 2009); dan penyedia bahan organik bagi biota-biota yang hidup didalamnya (Meilani, 1996 dalam Hiariey, 2009).

MTL = MTL1 + MTL2 ++ MTLn (dimasukkan kedalam nilai Rupiah)

Dimana:

MTL = Manfaat Tidak Langsung

MTL1 = Manfaat Tidak Langsung sebagai peredam gelombang (*breakwater*).

MTL2 = Manfaat Tidak Langsung sebagai penyedia bahan pakan alami untuk biota yang hidup di dalam hutan mangrove.

c. Manfaat Pilihan

Manfaat pilihan adalah suatu nilai yang menunjukkan kesediaan seseorang untuk membayar guna melestarikan ekosistem mangrove bagi pemanfaatan di masa depan, (Fahrudin, 1996 dalam Hiariey, 2009). Nilai ini didekati dengan mengacu pada nilai keanekaragaman hayati (*biodiversity*) hutan mangrove di Indonesia, yaitu US\$ 1.500/km²/tahun atau US\$15/ha/tahun (Ruitenbeek, 1991, Fahrudin 1996, dalam Hiariey, 2009).

MP = MPb

= US\$ 15per ha x Luas hutan mangrove (dimasukkan kedalam nilai Rupiah)

d. Manfaat Eksistensi (ME)

Manfaat eksistensi adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari keberadaan ekosistem yang diteliti setelah manfaat lainnya (manfaat langsung, tidak langsung dan manfaat pilihan). Manfaat ini adalah nilai ekonomis keberadaan (fisik) dari ekosistem yang diteliti. Formulasinya adalah sebagai berikut:

$$ME = \frac{\sum_{i=1}^n (ME_i)}{n}$$

(dimasukkan kedalam nilai Rupiah)

Dimana :

ME = Manfaat Eksistensi

ME_i = Manfaat Eksistensi dari responden ke-1 sampai ke n

n = Jumlah responden

2. Kuantifikasi seluruh manfaat dan fungsi ke dalam nilai uang (rupiah)

a. Nilai Pasar

Pendekatan nilai pasar digunakan untuk komponen sumberdaya yang langsung diperdagangkan, misalnya kayu mangrove dan ikan. Pendekatan ini sebagian besar digunakan untuk mengetahui nilai uang bagi manfaat langsung dari ekosistem mangrove.

b. Harga Tidak Langsung

Pendekatan ini digunakan apabila mekanisme pasar gagal memberikan nilai suatu komponen sumberdaya, karena komponen tersebut belum memiliki pasar. Pendekatan ini digunakan untuk manfaat tidak langsung misalnya menilai manfaat fisik (peredam gelombang) dan manfaat biologis (penyedia pakan).

c. *Contingent Valuation Method (CVM)*

Pendekatan ini digunakan untuk mengkuantifikasikan manfaat pilihan (keberadaan) dari suatu komponen sumberdaya, cara ini dipakai untuk memperoleh nilai eksistensi hutan mangrove dari responden terpilih. Berdasarkan hasil penelitian, manfaat (nilai keberadaan) hutan mangrove di kawasan perkotaan Denpasar dilandasi oleh dimensi spiritualitas masyarakat perkotaan yang cukup kokoh (Hindersah, 2007).

Menurut Fauzi (2006), tahap terakhir dari CVM adalah dengan mengagregatkan rata-rata tersebut. Proses ini melibatkan konversi rata-rata sampel kerataan populasi secara keseluruhan, salah satunya adalah dengan mengalikan rata-rata sampel dengan jumlah rumah tangga dalam populasi (N).

d. Nilai Ekonomi Total (NET)

Pendekatan ini merupakan penjumlahan dari nilai pemanfaatan dan nilai bukan pemanfaatan hutan mangrove yang telah diidentifikasi dan dikuantifikasikan. Nilai Ekonomi Total diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{NET} = \text{ML} + \text{MTL} + \text{MP} + \text{ME}$$

Dimana :

ML = nilai manfaat langsung

MTL = nilai manfaat tidak langsung

MP = nilai manfaat pilihan

ME = nilai manfaat eksistensi.

2.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linear merupakan suatu metode analisis statistik yang mempelajari pola hubungan antara dua atau lebih variabel. Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Rumus analisis regresi linier berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Y = variabel terikat
a = konstanta
b₁, b₂ = koefisien regresi
X₁, X₂ = variabel bebas

2.6 Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan dari lingkungan Internal strengths, dan serta lingkungan eksternal opportunities dan threats yang dihadapi. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*), ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) (Rangkuti, 2000).

Analisis SWOT merupakan suatu alat efektif dalam membantu menstrukturisasi suatu masalah, terutama dengan menggunakan analisa atas atas strategis, yang lazim disebut sebagai lingkungan internal, dalam lingkungan internal dan eksternal ini pada dasarnya terdapat unsur yang selalu dimiliki dan dihadapi, yakni secara internal memiliki kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dan secara eksternal dengan berbagai peluang-peluang dan ancaman-ancaman. Dalam perencanaan selalu dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan.

2.7 Studi Pendahuluan dan Peta Jalan Penelitian

Kajian mengenai peranan ekosistem mangrove dalam mendukung sistem perekonomian masyarakat di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi dilakukan dengan berbagai metode pendekatan dalam menilai manfaat ekonomi ekologiannya. Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan seberapa besar pemahaman masyarakat terhadap ekosistem mangrove dan bagaimana peranannya terhadap tingkat ekonomi masyarakat. Penelitian tentang pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove terkait dengan disiplin perencanaan wilayah dan kota banyak dilakukan dalam area perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada area pedesaan sehingga diharapkan hasil temuan di lapangan dapat memberi kontribusi khususnya pada perencanaan dan pengembangan ekonomi pedesaan yang terletak di kawasan pesisir.

Adapun penelitian-penelitian yang telah dilakukan merupakan studi pendahuluan yang terangkai menjadi peta jalan penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. Studi pendahuluan telah dilaksanakan dari tahun 2009 hingga 2012 meliputi kajian kemungkinan pemanfaatan hutan mangrove sebagai kawasan wisata yang berwawasan lingkungan berikut temuan adanya fenomena keterlibatan masyarakat perkotaan dalam pengelolaan hutan mangrove. Sejalan itu, dengan kasus Kecamatan Muaragembong ini sebagai kawasan pesisir sekaligus juga sebagai area muara/hilir Sungai Citarum, maka satu model pengembangan kota tepi air telah dirancang sebagai satu alternatif untuk mendorong pengembangan ekonomi masyarakat setempat.

Gambar 2.1
PETA JALAN PENELITIAN



Selain itu kajian ini didukung oleh temuan-temuan lain yang terkait antara lain isu pengelolaan lingkungan khususnya ekosistem mangrove (Hindersah, 2007, 2010, 2012), studi tentang status ekosistem pesisir (Asyiwati, 2010) dan studi tentang penilaian manfaat ekonomi ekologi dari sebuah Taman Hutan Raya (Akliyah, 2006), yang ke tiga lokasi studi tersebut terletak di area perkotaan. Temuan ini terungkap baik dalam penelitian disertasi maupun penelitian mandiri dan telah dituliskan sebagai makalah ilmiah, dipaparkan dalam konferensi/seminar nasional maupun internasional dan dipublikasikan dalam bentuk buku prosiding.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji seberapa besar peranan ekosistem mangrove dalam mendukung sistem perekonomian masyarakat di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi dengan harapan hasilnya dapat memberikan masukan-masukan dalam meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan strategi-strategi dalam pemanfaatan dan pengawasan penggunaan lahan mangrove agar nilainya tidak semakin menurun, baik secara ekonomi maupun ekologis secara berkelanjutan.

Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini diantaranya:

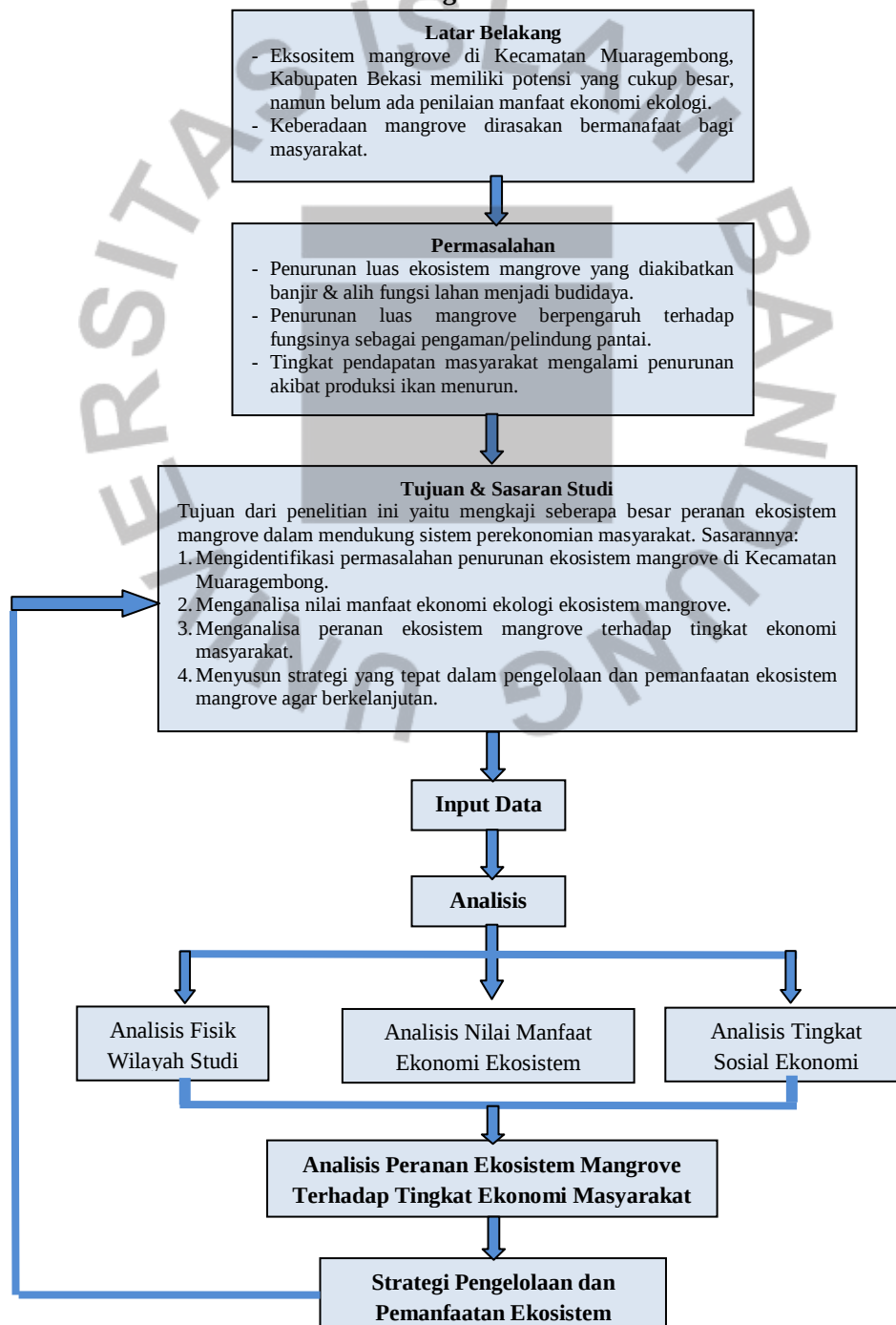
1. Dapat teridentifikasi nilai manfaat ekonomi ekologi ekosistem mangrove yang ada.
2. Dapat memberi masukan untuk Pemda Kabupaten Bekasi setelah teridentifikasinya kondisi ekosistem mangrove yang ada di Kabupaten Bekasi berupa strategi-strategi yang tepat untuk pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan.
3. Menjadi masukan untuk bahan ajar di kelas.
4. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat tentang besarnya nilai manfaat apa saja yang dapat diperoleh dengan adanya ekosistem mangrove yang ada di wilayahnya.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran yang melandasi penelitian yang akan dilakukan selama 2 tahun ke depan, secara umum dapat dilihat pada Gambar 4.1 dibawah ini.

Gambar 4.1
Kerangka Pemikiran

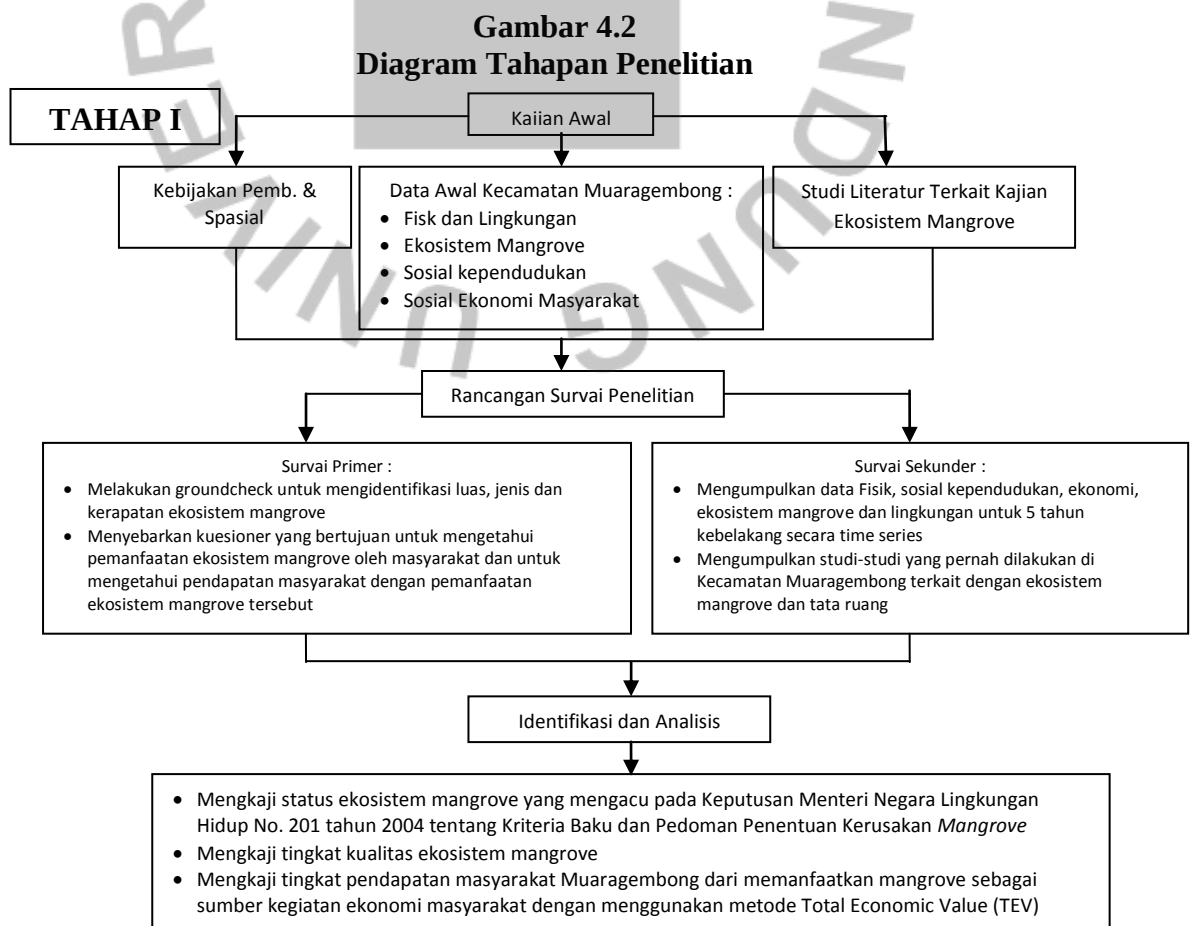


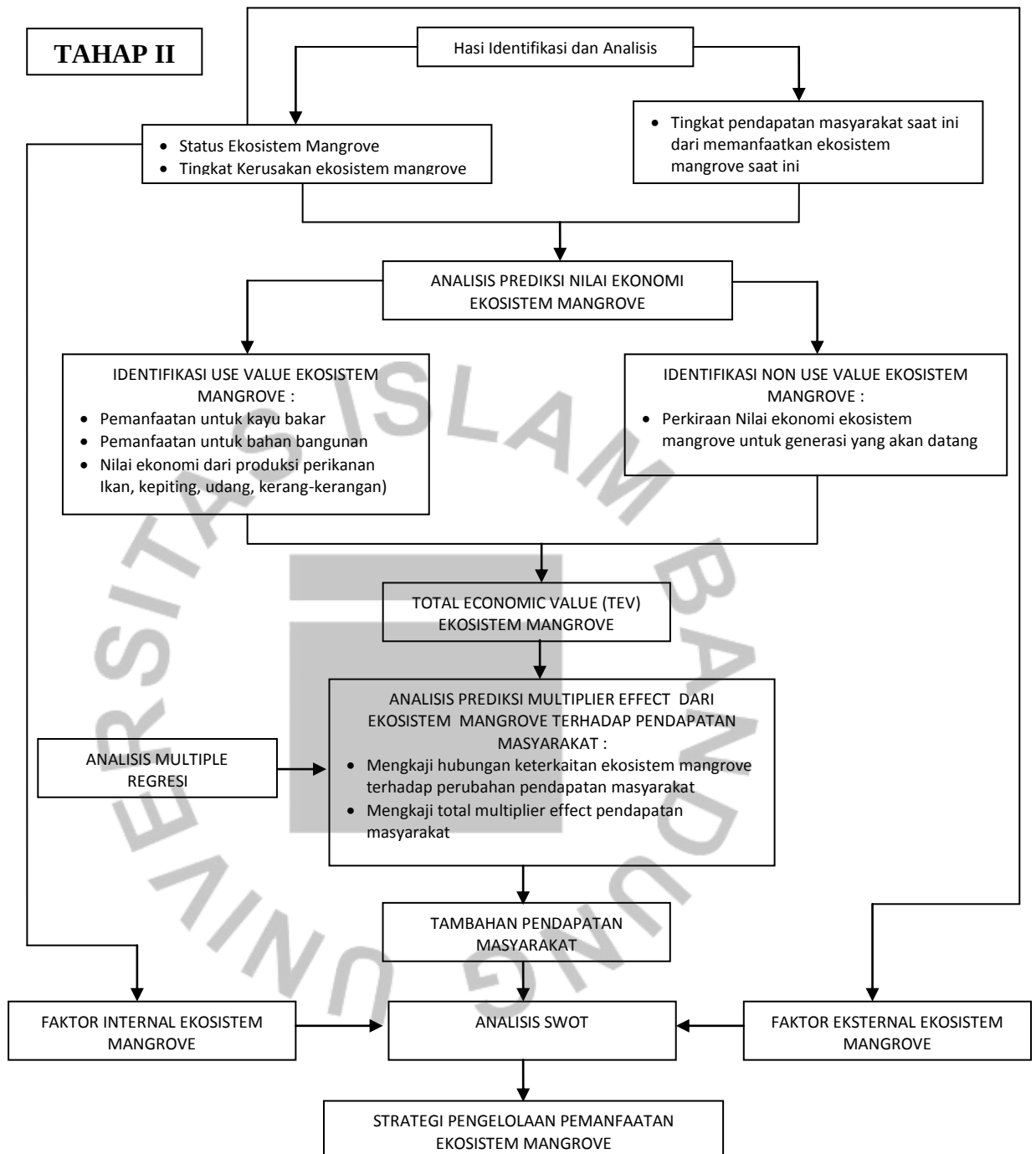
4.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Identifikasi kondisi ekosistem mangrove dan gambaran umum wilayah studi.
2. Mengkaji status ekosistem mangrove yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.
3. Mengkaji tingkat kualitas ekosistem mangrove.
4. Mengkaji tingkat pendapatan masyarakat Muaragembong dari memanfaatkan mangrove sebagai sumber kegiatan ekonomi masyarakat dengan menggunakan metode Total Economic Value (TEV)
5. Analisis nilai manfaat ekonomi ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi.
6. Merumuskan strategi untuk pengolahan dan pemanfaatan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.2 di bawah ini:





4.3 Metode Analisis

Metode analisis yang dilakukan dalam kegiatan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

1. Analisis kualitatif, dilakukan untuk menganalisis kebijakan terkait penataan ruang ekosistem mangrove yang ada di Kecamatan Muaragembong. Analisis ini dilakukan dengan meninjau kebijakan tata ruang dalam RTRW maupun kebijakan terkait rencana tata ruang kawasan pesisir di daerah itu.
2. Analisis Statistik Deskriptif, dilakukan untuk menganalisis data-data hasil kuesioner.
3. Analisis Valuasi Ekonomi untuk menilai manfaat ekonomi ekosistem mangrove menggunakan metode CVM. Adapun prosedur melakukan analisis CVM ini, diantaranya (Patunru, 2004):
 - a. Identifikasi pihak-pihak yang akan terkena dampak perubahan.
 - b. Tentukan teknik pengumpulan data.
 - c. Tentukan besar sampel.
 - d. Desain instrumen survey.
 - e. Desain pertanyaan CVM.
 - f. Analisis statistik.
4. Analisis Regresi Linier. Analisis ini dilakukan untuk menilai seberapa besar peranan ekosistem mangrove terhadap ekonomi masyarakat. Variable yang digunakan dalam analisis ini adalah:
 - Variabel terikat (Y) = pendapatan masyarakat yang memanfaatkan ekosistem mangrove.
 - Variabel bebas (X), terdiri dari kegiatan-kegiatan yang mendapat manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari adanya ekosistem mangrove seperti: produksi ikan, produksi olahan dari mangrove, dsb.

BAB V

HASIL YANG DICAPAI

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, hasil yang telah dicapai ialah tinjauan kebijakan yang ada di wilayah studi, gambaran karakteristik ekosistem kawasan mangrove, serta identifikasi status dan nilai manfaat ekosistem mangrove yang ada di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi.

5.1 Tinjauan Kebijakan

5.1.1 Tinjauan Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029

5.1.1.1 Rencana Struktur Ruang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), sistem perkotaan nasional terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Penetapan PKN dan PKW di Provinsi Jawa Barat mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang terdiri dari :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terletak di Bodebek, Bandung dan Cirebon.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terletak di Sukabumi, Palabuhanratu, Pangandaran, Kadipaten, Cikampek-Cikopo, Tasikmalaya dan Indramayu.

Rencana pengembangan sistem perkotaan di Provinsi Jawa Barat menetapkan PKN, PKNp, PKW, PKWp, dan PKL, sesuai dengan konteks kebijakan dan strategi pembangunan wilayah Provinsi Jawa Barat dan berdasarkan pertimbangan teknis yang telah dilakukan dalam proses penyusunan RTRWP.

Rencana pengembangan sistem perkotaan Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk :

1. Menata perkembangan PKN, PKNp, PKW, PKWp, dan PKL yang mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antarwilayah yang lebih merata.
2. Mendorong perkembangan pusat-pusat kegiatan di kawasan-kawasan yang belum berkembang sesuai dengan fungsi kota yang diharapkan.

3. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan di kawasan-kawasan yang berkembang dengan cepat.

Sasaran dari rencana pengembangan tersebut adalah : Menetapkan PKN, PKNp, PKW, PKWp dan PKL di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan konteks kebijakan dan strategi pembangunan wilayah Provinsi Jawa Barat dan berdasarkan pertimbangan teknis yang telah dilakukan dalam proses penyusunan RTRWP.

A. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Nasional – Provinsi (PKNp)

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Kriteria penentuan PKN adalah kawasan perkotaan yang mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya, pusat jasa-jasa keuangan dengan cakupan pelayanan nasional atau beberapa provinsi, pusat pengolahan atau pengumpul barang dalam skala nasional atau beberapa provinsi, simpul transportasi skala nasional atau beberapa provinsi, pusat jasa pemerintahan dan jasa publik lainnya dengan skala nasional atau beberapa provinsi.

Fasilitas minimum yang tersedia di PKN adalah:

- a. Perhubungan : pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut dan/atau terminal tipe A
- b. Ekonomi : pasar induk antar wilayah
- c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe A atau B
- d. Pendidikan : perguruan tinggi

Pusat Kegiatan Nasional – Provinsi (PKNp) adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Fasilitas minimum yang tersedia di PKNp adalah pusat bisnis kegiatan utama yang akan dikembangkan berskala nasional maupun internasional, serta akan diusulkan menjadi PKN.

Rencana pengembangan sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Nasional – Provinsi (PKNp) di Jawa Barat, terdiri atas :

1. Penetapan Kawasan Perkotaan Bodebek (Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi), Kawasan Perkotaan

Bandung Raya (Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat), dan Cirebon (Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon) sebagai PKN dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.

Dalam penetapan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan PKN Cirebon, dilakukan rencana pengembangan meliputi :

a. Mengendalikan pertumbuhan kegiatan di PKN Kawasan Perkotaan Bodebek

Berdasarkan kecenderungan perkembangan sampai saat ini, kota-kota di sekitar DKI Jakarta berkembang akibat pengaruh perkembangan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional. Perkembangan tersebut meluas sampai ke wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang (Provinsi Banten), sehingga RTRWN menetapkan wilayah tersebut menjadi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, dengan tingkat pertumbuhan paling pesat, yang berimplikasi pada alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman berskala besar, industri manufaktur, serta pusat perdagangan dan jasa berskala nasional dan internasional.

Berdasarkan kajian ekonomi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor merupakan penyumbang PDRB tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Kota Bekasi dan Kota Depok merupakan wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi, konsentrasi kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang berkembang cepat. Permukiman skala besar untuk menampung penduduk yang bekerja di Jabodetabek juga berkembang di PKN Kawasan Perkotaan Bodebek ini. Dalam konteks tata ruang, perkembangan ini membawa kecenderungan alih fungsi lahan menuju kegiatan perkotaan, termasuk munculnya permukiman baru. Masalah transportasi belum tertangani dengan baik karena prasarana jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Penyelesaian masalah transportasi berupa pengembangan sistem transportasi massal memerlukan dukungan

kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor, terutama di kawasan-kawasan pusat kota.

Pesatnya pertumbuhan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek berdampak pula pada tingginya konsentrasi penduduk dan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengendalian pemanfaatan ruang yang perlu diperhatikan terutama pada perkembangan sepanjang koridor Jakarta-Cikampek di Pantura Jabar yang merupakan lokasi lahan sawah beririgasi teknis, serta koridor Bodebekpunjur yang merupakan kawasan lindung.

Penetapan sistem perkotaan dalam PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, memperhatikan perbedaan skala pelayanan dan kondisi kota-kota yang secara eksisting tidak terdapat pada hirarki yang sama, sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Sistem Perkotaan PKN Kawasan Perkotaan BODEBEK

PKN	Kota Hirarki I	Kota Hirarki II	Kota Hirarki III
Kawasan Perkotaan BODEBEK	Kota Bekasi		
		Cikarang Pusat	Tarumajaya Sukatani Cibarusah
	Kota Bogor		
		Cibinong	Cileungsi Jonggol Parung Semplak Rumpin Parungpanjang Leuwiliang Jasinga
	Kota Depok		Cimanggis

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029

B. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Wilayah-Provinsi (PKWp)

Upaya mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek dan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, serta upaya mendorong pemantapan fungsi PKN Cirebon perlu didukung dengan upaya mendorong pemantapan fungsi PKW terutama dalam memberikan pelayanan skala regional yang dapat mengurangi pergerakan langsung dari PKL dan kawasan perdesaan ke PKN.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kinerja PKW sebagai pusat-pusat pertumbuhan disetiap kawasan andalan perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil kajian, keberadaan kawasan andalan belum cukup efektif dalam pengembangan kawasan, sehingga upaya untuk mendorong sinergitas antara pengembangan PKW perlu ditingkatkan. Pengembangan infrastruktur dan pelayanan yang bersifat lokal diharapkan dapat dipenuhi oleh PKW sebagai pusat koleksi dan distribusi yang dapat melayani kebutuhan kawasan andalan terkait.

Sebagai upaya mendorong perkembangan pusat-pusat kegiatan yang dapat memantapkan fungsi PKW, rencana pengembangan sistem perkotaan Provinsi Jawa Barat menetapkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Wilayah-Provinsi (PKWp).

Kriteria penentuan PKW adalah kawasan perkotaan yang mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya, pusat pengolahan atau pengumpul barang, simpul transportasi, dan pusat jasa publik dengan skala beberapa kabupaten.

C. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Dalam upaya mendorong perkembangan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan kaitannya dengan desa pusat produksi, rencana pengembangan sistem perkotaan menetapkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam sistem perkotaan provinsi sebagai pendukung berfungsinya Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan mengurangi pergerakan dari desa pusat produksi langsung ke Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diharapkan dapat berfungsi

sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan/atau beberapa kecamatan terdekat. Untuk itu, setiap Pusat Kegiatan Lokal (PKL) akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk mendorong berfungsinya Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Namun, pembangunan atau peningkatan fasilitas tersebut juga perlu dilengkapi dengan peningkatan dalam kualitas pelayanan fasilitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduk di dalam wilayah pelayanan. Desa pusat produksi diproyeksikan menjadi pusat-pusat perdesaan yang menjadi basis produksi di setiap kawasan andalan.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan terdiri dari pusat kegiatan lokal perkotaan dan pusat kegiatan lokal perdesaan. Pusat kegiatan lokal perkotaan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Sedangkan pusat kegiatan lokal perdesaan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan PKL perkotaan.

Penetapan PKL perkotaan diarahkan pada pertimbangan teknis bahwa kota-kota yang ditetapkan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan dengan kegiatan-kegiatan yang berciri perkotaan, seperti industri, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, dan lainnya. PKL pedesaan diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah-wilayah belakangnya dan ditetapkan sebagai kawasan yang dapat dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan industri berbasis pertanian.

5.1.1.2 Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Rencana pengembangan infrastruktur wilayah terdiri dari pengembangan infrastruktur jalan dan perhubungan, pengembangan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi berbasis DAS, pengembangan infrastruktur energi dan kelistrikan, pengembangan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur permukiman.

Tujuan pengembangan infrastruktur wilayah provinsi menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya melalui :

1. Penyediaan infrastruktur jalan dan perhubungan yang handal dan terintegrasi untuk mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan
2. Penyediaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal berbasis DAS untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air
3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan kelistrikan
4. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur telekomunikasi
5. Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman.

5.1.1.3 Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Perhubungan

Pembangunan infrastruktur jalan dan perhubungan dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur jalan dan perhubungan yang handal dan terintegrasi, yang dilakukan melalui pendekatan wilayah pengembangan, guna terciptanya keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah serta mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan. Rencana pengembangan infrastruktur jalan dan perhubungan adalah:

1. Pengembangan jaringan jalan primer yang melayani distribusi barang dan jasa dengan menghubungkan secara menerus Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
2. Pengembangan jaringan jalan tol dalam kota maupun antar kota sebagai penghubung antar pusat-pusat kegiatan utama
3. Pengembangan jaringan kereta api yang berfungsi sebagai penghubung antar PKN, serta antara PKN dengan PKNp dan PKWp
4. Pengembangan bandara dan pelabuhan nasional maupun internasional serta terminal guna memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan jasa dari dan ke Jawa Barat dalam skala regional, nasional, maupun internasional

5. Pengembangan sistem angkutan umum massal dalam rangka mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan utama.

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusatpusat kegiatan sebagai berikut:

- a. Menghubungkan secara menerus PKN, PKW, PKL
- b. Menghubungkan antarpusat kegiatan nasional

Jaringan jalan primer terdiri dari :

- a. Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antar PKN atau antara PKN dengan PKW dan antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan atau cepat berkembang dan atau pelabuhan-pelabuhan utama.
- b. Jalan kolektor primer menghubungkan secara berdaya guna antar PKW atau antara PKW dengan PKL dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
- c. Jalan lokal primer menghubungkan secara berdaya guna PKN dengan PKL, PKW dengan PKL, antar PKL atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan.

Jaringan jalan arteri primer dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar PKN, antar PKW dan antarkota yang melayani kawasan berskala besar dan/atau cepat berkembang dan/atau pelabuhan-pelabuhan utama. Berdasarkan pengertian tersebut, kriteria jalan arteri primer adalah :

1. Jalan arteri primer dalam kota merupakan terusan jalan arteri primer luar kota.
2. Jalan arteri primer melalui atau menuju kawasan primer.
3. Jalan arteri primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam.
4. Lebar perkerasan jalan arteri primer tak kurang dari 8 meter.
5. Lalu-lintas jarak jauh pada jalan arteri primer adalah lalu-lintas regional, untuk itu lalu-lintas tersebut tidak boleh terganggu oleh lalu-lintas ulang-alik dan lalu-lintas lokal yang bersumber dari kegiatan lokal.

6. Kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan umum bus dapat diijinkan melalui jalan ini.
7. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan masuk/ akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 500 m.
8. Persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu-lintasnya.
9. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih dari volume lalu-lintas rata-rata.
10. Besarnya lalu-lintas harian rata-rata pada umumnya lebih besar dari fungsi jalan yang lain.
11. Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan tidak diijinkan.
12. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, seperti: rambu, marka, lampu pengatur lalu-lintas, lampu penerangan jalan, dan lain lain.
13. Jalur khusus harus disediakan yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya.
14. Jalan arteri primer harus dilengkapi dengan median.

Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota besar pusat kegiatan nasional, antar pusat kegiatan wilayah dan/atau kawasankawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan pengumpan regional serta pelabuhan pengumpan lokal. Berdasarkan pengertian tersebut maka kriteria jalan kolektor primer adalah :

1. Jalan kolektor primer dalam kota merupakan terusan jalan kolektor primer luar kota.
2. Jalan kolektor primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan arteri primer.
3. Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam.
4. Lebar badan jalan kolektor primer tidak kurang dari 7 m.
5. Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 m.
6. Kendaraan angkutan barang berat dan bus dapat diijinkan melalui jalan ini.

7. Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu-lintasnya.
8. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas lebih besar dari volume lalu-lintas rata-rata.
9. Lokasi parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diijinkan pada jam sibuk.
10. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, seperti: rambu, marka, lampu pengatur lalu-lintas dan lampu penerangan jalan.
11. Besarnya lalu-lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari jalan arteri primer.
12. Dianjurkan tersedianya jalur khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lainnya.

Jaringan Jalan Tol dikembangkan dan diselenggarakan untuk menghubungkan antar PKN, PKN dan PKW, serta antar kota dalam PKN, memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.

5.1.1.4 Rencana Pengembangan Prasarana Sumber Daya Air dan Irigasi

Rencana pengembangan prasarana sumber daya air dan irigasi dilaksanakan dalam Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Jawa Barat. Wilayah sungai meliputi WS Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum, WS Cimanuk-Cisanggarung, WS Citanduy, WS Ciwulan-Cilaki, dan WS Cisadea-Cibareno. Sedangkan sumber daya air di Jawa Barat mengalir pada 5 (lima) wilayah sungai yang terbagi dalam 41 DAS, dimana 21 DAS mengalir ke utara dan 20 DAS mengalir ke selatan. Kriteria Pengembangan Sumber Daya Air dan Irigasi :

a. Pembangunan waduk/bendungan :

1. Dibangun pada DAS dengan aliran mantap <50%.
2. Dalam rangka mendukung pengembangan PKW dan PKN.

b. Rehabilitasi jaringan irigasi :

1. Dilaksanakan pada DAS dengan aliran mantap <50%.
2. Diprioritaskan pada daerah irigasi di wilayah utara Jawa Barat, karenamempunyai nilai produktivitas yang tinggi.

Pada tahun 2029, prediksi kebutuhan air di Jawa Barat meliputi kebutuhan air irigasi, air bersih domestik dan industri mencapai 28.185,84 juta m³/tahun. Sedangkan prediksi ketersediaan air dihitung pada aliran mantap yaitu debit aliran sungai yang diharapkan selalu ada meskipun pada musim kemarau yang dihitung berdasarkan penggunaan lahan yang ada hanya mencapai 14.150,2 juta m³/tahun.

5.1.1.5 Rencana Pengembangan Prasarana Energi dan Kelistrikan

Rencana pengembangan prasarana energi dan kelistrikan adalah :

1. Pengembangan instalasi dan jaringan distribusi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh wilayah Jawa Barat;
2. Pengembangan energi terbarukan meliputi pengembangan panas bumi, energi potensial air, energi surya, energi angin dan bioenergi; dan
3. Pengembangan energi tak terbarukan meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM), gas, dan batubara untuk meningkatkan pasokan energi.

Pengembangan energi ditujukan untuk meningkatkan pasokan dan cakupan pelayanan energi kepada masyarakat. Peningkatan pasokan ditempuh melalui pengembangan potensi pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan dan tak terbarukan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat dalam jangka panjang. Peningkatan cakupan pelayanan ditempuh melalui pengembangan jaringan infrastruktur energi.

a. Energi Terbarukan

Pengembangan sumber energi terbarukan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan pasokan daya di dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Pengembangan sumber-sumber energi terbarukan meliputi pengembangan panas bumi, energi potensial air (mikrohidro), tenaga surya serta tenaga angin, serta sumber energi bahan bakar nabati. Rencana pengembangan sumber energi terbarukan adalah :

1. Meningkatkan pasokan energi listrik melalui pengembangan pemanfaatan sumber energi panas bumi di Kab. Bogor (Awi Bengkok), Sumedang (Tampomas), Kab.Bandung (Cibuni, Patuha, Wayang Windu dan Kamojang, dan Tangkuban Parahu), serta Kab. Garut (Kawah Darajat)
 2. Meningkatkan pasokan energi listrik melalui pengembangan sumber energi potensial air (PLTA) di Kabupaten Sumedang (Waduk Jatigede)
 3. Mengembangkan pemanfaatan sumber-sumber energi listrik mikrohidro di Kab. Garut (Kec. Bungbulang, Cihurip dan Cikelet), serta Kabupaten Cianjur (Kec. Cigugur, Cidaun dan Naringgul), tenaga surya, serta tenaga angin di wilayah perdesaan potensial serta belum terjangkau oleh sistem jaringan listrik.
 4. Mendorong pengembangan sumber energi bahan bakar nabati dan biogas di kawasan perdesaan sebagai sumber energi alternatif di Kabupaten Garut, Ciamis, Cianjur dan Kabupaten Sukabumi.
4. Energi Tak Terbarukan
- Pengembangan energi tak terbarukan mencakup pengembangan energi yang bersumber dari Bahan Bakar Minyak (BBM), Gas, dan batubara untuk meningkatkan pasokan energi listrik. Rencana pengembangan energi tak terbarukan adalah :
1. Meningkatkan pasokan energi listrik melalui pemanfaatan sumber energi batubara untuk meningkatkan pasokan energi listrik di Kabupaten Indramayu (PLTU) dan Kabupaten Sukabumi (PLTU);
 2. Mewujudkan pemerataan cakupan pelayanan energi listrik melalui pengembangan listrik perdesaan di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau oleh jaringan listrik.

5.1.1.6 Rencana Pengembangan Prasarana Telekomunikasi

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi adalah:

1. Pengembangan telekomunikasi di desa-desa yang belum terjangkau sinyal telepon

2. Pengembangan telekomunikasi di desa-desa yang belum dilalui jaringan terestrial telekomunikasi.

Prioritas pengembangan fasilitas telekomunikasi dilakukan pada :

1. Desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon genggam/handphone (daerah blank spot).
2. Desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel telepon dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan terestrial telekomunikasi.
3. Desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon atau sinyal handphone tetapi desa tersebut tergolong miskin.

Pengembangan infrastruktur telekomunikasi ditujukan untuk membuka akses wilayah-wilayah yang belum terjangkau dan terlayani oleh jaringan telekomunikasi. Rencana pembangunan infrastruktur telekomunikasi diarahkan untuk mengembangkan fasilitas telekomunikasi di perdesaan wilayah Jabar Selatan, Kabupaten Cianjur (Kec. Pagelaran, Cikadu dan Naringgul), Kabupaten Kuningan (Kec. Pasawahan, Mandiracan), Kab. Indramayu (Kec. Gantar, Terisi), serta Kab. Garut (Kec. Talegong dan Pamulihan).

5.1.1.7 Rencana Pengembangan Permukiman

Rencana pengembangan permukiman adalah penyediaan sarana prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar minimum pelayanan yang ada dengan skala pelayanan lintas wilayah kabupaten/kota. Terdapat beberapa arahan pengembangan wilayah yang akan secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh pada pengembangan permukiman. Pada wilayah dimana pengembangan perkotaan menjadi bagian utama (PKN), rencana lebih dikonsentrasikan pada penanganan perumahan perkotaan, air bersih dan pengelolaan persampahan untuk mendukung peran dan fungsi sistem perkotaan tersebut. Pada wilayah dengan pengembangan wilayah dengan fungsi lindung tinggi dan merupakan sentra produksi maka rencana lebih dikuatkan pada pengembangan air bersih dan pengembangan infrastruktur perdesaan untuk menunjang aksesibilitas dan konektivitas sentra produksi dan jaringan distribusi.

Arah kebijakan untuk pengembangan permukiman secara umum adalah :

- Menunjang perkembangan permukiman perkotaan
- Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang permukiman perkotaan
- Percepatan penyediaan infrastruktur perdesaan di daerah tertinggal

Rencana pengembangan infrastruktur permukiman adalah:

1. Pengembangan hunian vertikal di perkotaan dan pengembangan Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun di perkotaan.
2. Peningkatan pelayanan sistem air minum
3. Pengelolaan air limbah dan drainase
4. Pengelolaan persampahan
5. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh
6. Pembangunan Pusat Kebudayaan, dan Kawasan dan Sarana Olah Raga
7. Pembangunan rumah sakit
8. Pembangunan pasar induk regional
9. Peningkatan prasarana dasar permukiman perdesaan
10. Pengembangan Desa Mandiri Energi
11. Pembangunan pusat kegiatan belajar di perdesaan
12. Pembangunan puskesmas

5.1.1.8 Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah provinsi meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.

I. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan lindung di Jawa Barat bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.

Berdasarkan jenis dan kriteria kawasan lindung tersebut maka rencana pola ruang kawasan lindung Provinsi Jawa Barat 2029 adalah :

- a. menetapkan kawasan lindung provinsi seluas 45% dari luas seluruh wilayah Daerah yang meliputi kawasan lindung hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan, serta ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2018.
- b. mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air
- c. mengendalikan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Berdasarkan luas kawasan lindung di Jawa Barat per kabupaten/kota, Kabupaten Garut memiliki luas kawasan lindung terbesar yaitu 78,7%, selanjutnya Kabupaten Bandung 60,5%, Cianjur 59,6%, dan Kabupaten Bandung Barat sebesar 59,2%. Dengan demikian, untuk mencapai rencana penetapan kawasan lindung di Jawa Barat sebesar 45% sasaran pengembangan kawasan lindung adalah :

- a. Tercapainya proporsi luas kawasan lindung Jawa Barat sebesar 45 % dari luas Jawa Barat atas dasar kriteria kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.
- b. Tidak adanya alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya.
- c. Terjaganya kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidroorologis. Terjaminnya ketersediaan sumber daya air.
- d. Berkurangnya lahan kritis.
- e. Terbentuknya kawasan penyangga di sekitar kawasan hutan lindung dan konservasi.
- f. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya pada kawasan lindung.
- g. Berkurangnya dampak bencana alam yang diakibatkan oleh kerusakan alam.

II. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya yang menjadi kewenangan provinsi dan merupakan kawasan strategis provinsi, dapat berupa

kawasan peruntukan hutan produksi (kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan yang dapat dikonversi), kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan (darat dan laut), kawasan peruntukan pertambangan, kawasan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan lainnya.

A. Kawasan Hutan Produksi

Dengan memperhatikan kriteria kawasan budidaya hutan produksi yang terdapat dalam RTRWN maka arah pengembangan kawasan budidaya hutan produksi adalah

3. Meningkatkan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta kegiatan ekonomi sekitarnya
4. Meningkatkan fungsi lindung
5. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat
7. Meningkatkan kesempatan kerja terutama masyarakat setempat
8. Mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.

B. Kawasan Hutan Rakyat

Arah pengembangan kawasan budidaya hutan rakyat adalah sebagai berikut :

1. Mengarahkan pengembangan kawasan budidaya hutan rakyat pada kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik.
2. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan
3. Mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.

C. Kawasan Pertanian Berlahan Basah dan Beririgasi Teknis

Kawasan budidaya pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis merupakan kawasan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Karena memiliki fungsi yang demikian krusial maka arahan pengembangan pertanian difokuskan pada :

1. Mempertahankan kawasan pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis
2. Mendukung ketahanan pangan provinsi dan nasional
3. Meningkatkan produktivitas kawasan pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim
4. Ditunjang dengan pengembangan infrastruktur sumberdaya air yang mampu menjamin ketersediaan air
5. Meningkatkan kesejahteraan petani dan pemanfaatan yang lestari.

Pengembangan kawasan sawah dan irigasi merujuk pada kriteria-kriteria berikut:

1. Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian
2. Terutama berada dalam daerah irigasi teknis

Kawasan pertanian lahan basah beririgasi teknis, tersebar di Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Karawang, Bekasi, Subang, Purwakarta, Kota Bogor, Depok, Bandung, Cimahi, Tasikmalaya, Banjar, Cirebon, dan Bekasi.

D. Kawasan Perkebunan

Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk :

1. meningkatkan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta kegiatan ekonomi sekitarnya
2. meningkatkan pendapatan daerah
3. meningkatkan kesempatan kerja masyarakat setempat
4. mendorong terciptanya keterkaitan sektor hulu dan hilir perkebunan yang dapat menstimulasi pengembangan ekonomi wilayah
5. meningkatkan nilai ekspor
6. mendukung keberlanjutan ekosistem di wilayah sekitarnya, terutama yang berfungsi lindung.

Kawasan perkebunan, ditetapkan dengan ketentuan :

1. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan
 2. memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan
- Kawasan perkebunan, tersebar di Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Indramayu, Subang, dan Purwakarta.

E. Kawasan Perikanan

Pengembangan kawasan perikanan, meliputi:

- a. pengembangan kawasan budidaya air tawar;
- b. pengembangan kawasan budidaya air payau;
- c. pengembangan kawasan budidaya air laut; dan
- d. pengembangan kawasan industri pengolahan perikanan.

Pengembangan kawasan perikanan, dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan produksi ikan;
- b. meningkatkan konsumsi ikan;
- c. meningkatkan ekspor hasil pertanian;
- d. meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja;
- e. meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan dan udang; dan
- f. meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya perikanan.

Kawasan Perikanan, tersebar di Kabupaten Bekasi, Subang, Karawang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kota Bandung, Bogor, dan Sukabumi.

F. Kawasan Pertambangan

Pengembangan kawasan pertambangan di perdesaan dilakukan dengan menjaga kualitas lingkungan sehingga kemantapan sektor pertambangan yang sudah tercapai terus terjaga dan ditingkatkan sehingga pada tahapan ini adalah masa pemeliharaan pasokan pertambangan, mantapnya desa mandiri pertambangan, mantapnya kemampuan masyarakat dalam pembangunan sektor pertambangan.

Pengembangan kawasan pertambangan secara kewilayahan dalam bentuk Wilayah Pertambangan yang terdiri dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) maupun Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), diarahkan untuk :

1. Meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian wilayah
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan
3. Mendorong peningkatan nilai tambah barang tambang untuk ekspor
4. Mendorong upaya pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil
5. Meningkatkan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja
6. Meningkatkan penanggulangan kerusakan lahan di wilayah kerja pertambangan
7. Mendukung keberlanjutan ekosistem di wilayah sekitar kawasan
8. Mengembangkan alih teknologi penambangan bagi masyarakat sekitar kawasan

Kriteria kawasan pertambangan yang dimaksud adalah kawasan yang :

1. Memiliki sumberdaya dan potensi pertambangan yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan data geologi, setelah dikoreksi oleh ruang yang tidak diperbolehkan, dan masih layak untuk dieksploitasi secara ekonomis
2. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan bukan merupakan daerah rawan bencana dengan kerentanan bencana tinggi
3. Merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil
4. Tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya
5. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penetapan kawasan pertambangan dilaksanakan :

1. Secara transparan, partisipatif dan bertanggungjawab;

2. Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait dan masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan
3. memperhatikan aspirasi kabupaten/kota

G. Kawasan Industri

Pembangunan lokasi industri ditetapkan dengan ketentuan :

- a. Kewajiban perusahaan industri berlokasi di kawasan industri kecuali untuk industri yang memerlukan lokasi khusus, industri mikro, kecil dan menengah, serta industri di kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Memenuhi ketentuan teknis, tata ruang dan lingkungan untuk kegiatan industri, serta efisien, memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi
- c. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjamin pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan
- d. Tidak mengubah kawasan pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis; dan menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah

Dengan mempertimbangkan hasil analisis ekonomi untuk Jawa Barat maka arahan pengembangan bagi kawasan industri ditekankan pada :

1. Mengoptimalkan kawasan industri yang telah ada di koridor Cikarang-Cikampek
2. Mengembangkan kawasan industri di koridor Bandung-Cirebon dan koridor Sukabumi-Bogor
3. Mendorong pengembangan industri kreatif dan telematika di WP KK Cekungan Bandung
4. Memprioritaskan pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi
5. Memprioritaskan pengembangan industri yang menerapkan manajemen dan kendali mutu, clean development mechanism, serta produksi bersih
6. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap

tenaga kerja lokal Pembangunan lokasi industri yang dilakukan di luar kawasan industri atau zona industri, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
- b. dilengkapi dengan unit pengolahan limbah
- c. memperhatikan pasokan air bersih dari sumber air permukaan
- d. industri ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. pengelolaan limbah secara terpadu untuk industri dengan lokasi berdekatan

Dalam hal pengembangan kawasan industri yang telah ada untuk mengoptimalkan fungsi kawasan industri di Jawa Barat, ditetapkan beberapa kawasan industri baik yang sudah operasional maupun yang belum operasional, diantaranya :

1. Kawasan Industri MM2100 Industrial Town, Cibitung Kab. Bekasi
2. Kawasan Industri EJP (NEGAI), Cikarang, Cikarang, Kab. Bekasi
3. Kawasan Industri Bekasi International Industrial Estate, Desa Sukaresmi, Kab. Bekasi
4. Kawasan Industri Jababeka Cikarang Kab. Bekasi
5. Kawasan Industri Lippo Cikarang Industrial Park, Cikarang, Kab. Bekasi
6. Kawasan Industri Patria Manunggal Jaya Industrial Estate, Cikarang, Kab. Bekasi
7. Kawasan Industri Gobel, Cibitung, Kab. Bekasi
8. Kawasan Industri Marunda Centre-International Warehouse & Industrial Estate, Kab. Bekasi
9. Kawasan Industri Sentul, Kab. Bogor
10. Kawasan Industri Cibinong Centre Industrial Estate, Kec. Citeureup-Klapanunggal, Kab. Bogor
11. Kawasan Industri KIIC, Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang

12. Kawasan Industri Taman Niaga Karawang Prima, Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang
13. Kawasan Industri Indotaisei Kota Bukit Indah, Kec. Cikampek, Kab. Karawang
14. Kawasan Industri Kujang Cikampek, Kec. Cikampek, Kab. Karawang
15. Kawasan Industri Mandalapratama Permai, Kec. Cikampek. Kab. Karawang
16. Kawasan Industri Mitrakarawang, Kec. Ciampel, Kab. Karawang
17. Kawasan Industri Karawang 2000 Industrial Estate, Kab. Karawang
18. Kawasan Industri Suryacipta City of Industry, Kec. Ciampel, Kab. Karawang
19. Kawasan Industri Kota Bukit Indah-Industrial City, Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta
20. Kawasan Industri Lion, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta
21. Kawasan Industri Ciambar, Kab. Sukabumi.
22. Kawasan Industri Rancaekek Industrial Estate, Kab. Sumedang dan Kab. Bandung

H. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Pengembangan kawasan pariwisata di Jawa Barat diarahkan kepada tiga jalur wisata unggulan, yaitu kawasan wisata unggulan jalur utara, tengah dan selatan. Kawasan wisata unggulan yang terletak pada jalur utara adalah :

- a. Kawasan Wisata Industri dan Bisnis Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang
- b. Kawasan Wisata Agro di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Cirebon
- c. Kawasan Wisata Budaya Pesisir Cirebon

Kawasan wisata yang terletak di jalur tengah adalah :

- a. Kawasan Eko Wisata Puncak, Kebun Raya Cibodas, Gunung Gede-Pangrango, Talaga Warna, Gunung Tangkubanparahu, Gunung Ciremai, Gunung Halimun dan Pegunungan di kawasan Bandung Selatan
- b. Kawasan Wisata Agro Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung
- c. Kawasan Wisata Perkotaan dan Pendidikan di WP KK Cekungan Bandung
- d. Kawasan Wisata Kriya dan Budaya Priangan

Kawasan wisata yang terletak di jalur selatan adalah :

- a. Kawasan Eko Wisata Palabuhanratu, Cipatujah, Hutan Sancang, Ujunggenteng, Rancabuaya, Cilauteureun dan Cijayanti
- b. Kawasan Wisata Agro di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Banjar
- c. Kawasan Wisata Minat Khusus Daerah bagian Selatan
- d. Kawasan Wisata Rekreasi Pantai Pangandaran

5.1.9 Rencana Kawasan Strategis

Menurut Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional antara lain meliputi :

- Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional;
- Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;

- Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional;
- Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa;
- Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan Ramsar; dan
- Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan.

Sedangkan strategi untuk pengembangan kawasan strategis nasional meliputi :

- Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional.
- Strategi untuk pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal.
- Strategi untuk pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa.
- Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
- Strategi untuk pengembangan kawasan tertinggal.

5.2 Tinjauan Kebijakan Pengembangan JABODETABEKJUR

5.2.1 Arahkan Struktur Tata Ruang Jabodetabek-Punjur

Berdasarkan PP No. 47 tahun 1997, Kawasan Jabodetabek dan Bopunjur telah ditetapkan sebagai Kawasan Tertentu dan Kawasan Andalan. Fungsi ruang Kawasan Jabodetabek dan Bopunjur dalam Tata Ruang Wilayah Nasional adalah :

- Sebagai pusat kegiatan nasional dan wilayah pelayanan untuk mendukung fungsi pemerintahan dan ekonomi nasional;
- Dikembangkan sebagai Kawasan Tertentu dengan fungsi-fungsi di atas;
- Sebagai satu kesatuan ekologis DAS yang mencakup ekologi pegunungan sampai pada ekologi pantai/pesisir.

5.2.2 Kawasan Jabodetabek

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta tahun 2010 (Perda DKI Jakarta no. 6/1999 tentang RTRW DKI Jakarta) disebutkan bahwa pembangunan Kota Jakarta diarahkan dengan visi mewujudkan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang sejajar dengan kota-kota besar negara maju, dihuni oleh masyarakat yang sejahtera dan berbudaya dalam lingkungan kehidupan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka arahan penataan ruang wilayah akan ditujukan untuk melaksanakan 3 (tiga) misi utama :

- a. Membangun Jakarta yang berbasis pada masyarakat;
- b. Mengembangkan lingkungan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan;
- c. Mengembangkan Jakarta sebagai kota jasa skala nasional dan internasional.

Kebijakan pengembangan tata ruang Kota Jakarta adalah :

- a. Memantapkan fungsi Kota Jakarta sebagai kota jasa skala nasional dan internasional;
- b. Memprioritaskan arah pengembangan kota ke arah koridor timur, barat, utara dan membatasi pengembangan ke arah selatan agar tercapai keseimbangan ekosistem;
- c. Melestarikan fungsi dan keserasian lingkungan hidup di dalam penataan ruang dengan mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. Mengembangkan sistem prasarana dan sarana kota yang berintegrasi dengan sistem regional, nasional dan internasional.

Sementara itu, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat Tahun 2010, Bodebek diarahkan menjadi kawasan unggulan industri manufaktur,

pariwisata dan jasa yang mempunyai keterkaitan dengan sumber daya lokal, berdaya saing, berorientasi ekspor dan ramah lingkungan, dengan tujuan :

- a. Meningkatkan daya saing kegiatan industri dan peluang pasar global;
- b. Mempertahankan kawasan lindung serta situ-situ yang berfungsi sebagai resapan air (tengah dan selatan);
- c. Mengendalikan dan mengefektifkan pembangunan Bodebek sebagai kawasan perkotaan dan industri yang ramah lingkungan;
- d. Menata kembali penyediaan infrastruktur wilayah dalam satu kesatuan sistem.

5.2.3 Kawasan Bopunjur

Bopunjur dalam RTRW Jawa Barat 2010 diarahkan menjadi kawasan unggulan agribisnis dan agrowisata dengan memberdayakan masyarakat setempat dan tetap mempertahankan fungsi konservasi, dengan tujuan :

- a. Meningkatkan potensi agribisnis sebagai komoditas andalan;
- b. Meningkatkan potensi agrowisata sebagai komoditas andalan;
- c. Memberdayakan masyarakat setempat untuk menunjang kegiatan agribisnis dan agrowisata;
- d. Mempertahankan kawasan Bopunjur sebagai kawasan konservasi, melalui reboisasi, rehabilitasi lahan kering dan konservasi sumber daya alam.

Konsep penataan ruang Bopunjur diarahkan untuk menjamin berlangsungnya konservasi air dan tanah di kawasan Bopunjur dan menjamin tersedianya air tanah, air permukaan dan penanggulangan banjir bagi kawasan Bopunjur dan daerah hilirnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Rencana Tata. Ruang Kawasan Bopunjur berdasarkan Keppres no. 114/1999 (sampai dengan tahun 2014) mengarahkan sebagian besar kawasannya untuk berfungsi sebagai daerah resapan yaitu seluas 83,88%, sedangkan kawasan yang berfungsi sebagai kawasan perkotaan seluas 16,12% Untuk dapat menjamin terwujudnya fungsi konservasi tersebut, konsep penataan ruang Bopunjur juga merumuskan pokok-pokok pengendalian kawasan Bopunjur melalui kegiatan pengawasan pembangunan meliputi kegiatan pemantauan, penelitian, pelaporan, dan evaluasi secara rutin.

5.2.4 Sistem Transportasi Regional JABODEKTABEKPUNJUR

Kabupaten Bekasi termasuk kawasan Jabodetabekpunjur yang merupakan kawasan strategis nasional yang memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu.

Kawasan Jabodetabekpunjur mempunyai kedudukan yang sangat penting yaitu sebagai kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yaitu sebagai pusat kegiatan nasional. Peran dan kedudukan Jabodetabekpunjur menjadi pusat kegiatan jasa, industri, pariwisata dan pintu gerbang nasional. Sebagai pintu gerbang nasional kawasan Jabodetabekpunjur berperan dalam hubungannya dengan dunia internasional. Peran sebagai pusat kegiatan jasa, industri, pariwisata memiliki skala pelayanan nasional, internasional dan regional. Dengan kedudukan dan peran tersebut, kawasan Jabodetabekpunjur dapat dijadikan indikator bagi pembangunan nasional.

Struktur ruang untuk Penataan Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur ditetapkan sebagai berikut :

1. Kota Jakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan kota-kota lainnya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Untuk Kabupaten Bekasi, Struktur Ruang Wilayah Jabodetabek, dibentuk dengan sistem pusat-pusat permukiman yang berjenjang , struktur tersebut ditetapkan sebagai berikut: Kota Cikarang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan kegiatan utama berupa : industri dan permukiman.
2. Dalam arahan struktur ruang dikembangkan Jalan Lingkar Luar Jakarta Kedua (Jakarta Outer Ring Road 2) dan jalan radialnya sebagai pembentuk struktur ruang Jabodetabekpunjur dan untuk memberikan pelayanan pengembangan sub pusat perkotaan antara lain Serpong/Kota Mandiri Bumi Serpong Damai, Cinere, Cimanggis, Cileungsi, Setu, dan Tambun/Cikarang.
3. Pusat-pusat permukiman di Kabupaten Bekasi berperan sebagai counter magnet untuk mengurangi tekanan penduduk dengan segala aktifitasnya ke DKI Jakarta. Pengembangan pusat-pusat permukiman di Kabupaten Bekasi dilakukan melalui pengembangan sektor industri yang terkait dengan sektor jasa yang telah berkembang saat ini dalam rangka penyediaan lapangan usaha

dan kemandirian pusat permukiman tersebut. Pusat permukiman yang berkembang dan berdekatan dengan pusat permukiman yang lebih besar maka pusat permukiman tersebut akan menyatu dalam pelayanannya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan yaitu Lemahabang dan Cibitung dengan Cikarang.

Tabel 5.2
Pemanfaatan Lahan Di Kabupaten Bekasi Menurut Jabodetabekpunjur

Jenis	Kriteria
Kawasan Lindung	Zoning Lindung (N1) dengan kriteria : • Kawasan dengan Kreteria Lindung • Perlindungan sumber air baku • Kawasan pada bantaran sungai, danau,pantai • Perlindungan biota laut • Daerah resapan dengan kemiringan lereng
Kawasan Budidaya	Zona B1 (perumahan, perdagangan, jasa, industri) dengan kriteria : • Prasarana dan sarana memadai • Daya dukung lahan tinggi • Kawasan yang telah terbangun • Aglomerasi kegiatan sektor unggulan/basis) • Tingkat aksesibilitas tinggi • Pusat ekonomi unggulan Zona B2 (perumahan perdesaan, pertanian, industri) dengan kriteria: ▪ Daya dukung lahan/lingkungan relatif rendah ▪ Kegiatan yang ada mengganggu daya dukung lingkungan ▪ Tingkat aksesibilitas tinggi ▪ Pelayanan prasarana dan sarana memadai Zona B4 (perumahan hunian rendah, pertanian dan perkebunan) dengan kriteria : • Daya dukung lahan/lingkungan relatif rendah • Kegiatan yang ada mengganggu/melebihi daya dukung lingkungan. • Perkembangan fisik atau permintaan lahan sangat tinggi.

	• Tingkat aksesibilitas tinggi. • Pelayanan prasarana dan sarana memadai. Zona B5 (pertanian lahan basah irigasi teknis)
--	--

Sumber : Perpres No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan JABODETABEKPUNJUR

5.3 Tinjauan Kebijakan Kabupaten Bekasi

5.3.1 Tinjauan Terhadap RPJM Kabupaten Bekasi

5.3.1.1 Visi Pembangunan Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2001, dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional dan Visi Provinsi Jawa Barat, Visi Kabupaten Bekasi adalah:

“ MANUSIA UNGGUL YANG AGAMIS BERBASIS AGRIBISNIS DAN INDUSTRI BERKELANJUTAN ”

5.3.1.2 Misi Pembangunan Kabupaten Bekasi

Untuk mewujudkan Visi Bupati Bekasi lima tahun ke depan, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam aspek pengetahuan dan teknologi (Iptek), dan Iman dan Takwa (Imtak).

Secara umum, keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) ditentukan oleh kualitas pendidikan, kesehatan, dan spiritualitas. Keunggulan pendidikan tercermin dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai, sedangkan keunggulan spiritual tercermin dari keimanan dan ketaqwaan, termasuk emosional. Meningkatkan kualitas SDM, berarti juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pembinaan pemuda dan olah raga, serta meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarga.

• Mewujudkan institusi pemerintahan daerah yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel.

Pengertian institusi pemerintahan daerah yang profesional mengarah pada bagaimana menerapkan the right man on the right place. Hal ini didukung oleh sistem organisasi yang efektif dengan sasaran yang terukur. Institusi pemerintahan yang berwibawa mengarah pada bagaimana hukum dan

perundang-undangan dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Amanah berarti penyelenggaraan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab. Transparan berarti penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan terbuka. Sedangkan akuntabel terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai hukum yang berlaku.

- **Mewujudkan masyarakat yang demokratis, produktif, dan partisipatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral.**

Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang memahami diri dan lingkungannya, termasuk memiliki tingkat empati yang tinggi sehingga mampu memahami orang lain, saling menghargai, dan saling menghormati. Produktif dan partisipatif merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam membangun Kabupaten Bekasi. Masyarakat yang demokratis, produktif, dan partisipatif diwujudkan melalui misi ini dengan menjadikan nilai-nilai moral sebagai filter.

- **Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat positif masyarakat guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat merupakan sesuatu yang berharga bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.**

Nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang paling melekat di masyarakat adalah nilai-nilai kepahlawanan, terutama yang telah ditanamkan oleh pejuang kemerdekaan putra Bekasi asli, yaitu K.H. Noer Ali (sekarang nama jalan di Kalimalang Kota Bekasi). Maka wajar saja apabila Bekasi pernah mempunyai motto sebagai kota patriot. Nilai-nilai heroisme tersebut perlu digali kembali sehingga tertanam di dalam jiwa setiap warga Kabupaten Bekasi dan menjadi bagian dari landasan emosional dalam menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan.

- **Meningkatkan kualitas petani serta kualitas dan kuantitas hasil pertanian.**

Kualitas dan kuantitas pertanian sangat dipengaruhi oleh kualitas petani. Sementara untuk meningkatkan kualitas petani pemerintah daerah perlu

memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung seperti pembinaan keterampilan dan teknologi pertanian. Peningkatan kualitas petani ini sangat penting dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk revitalisasi agrobisnis.

- **Mewujudkan iklim investasi dan berusaha yang kondusif berlandaskan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat.**

Iklim investasi dan berusaha yang kondusif berarti adanya kemudahan dalam melakukan investasi dan usaha, baik investor besar maupun kecil, domestik maupun mancanegara, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Hal ini misalnya dapat dilakukan melalui kebijakan publik yang terkait dengan perizinan.

- **Menciptakan industri berwawasan lingkungan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.**

Industri berwawasan lingkungan yang dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat pada visi Bupati/Wakil Bupati. Sebagai daerah yang memiliki banyak industri, dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bekasi perlu menyertakan aspek lingkungan sebagai dampak dari industri itu sendiri, mulai dari perencanaan sampai pemanfaatannya. Namun demikian, industri yang ada selain harus berwawasan lingkungan, juga mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

- **Mengembangkan sistem infrastruktur yang handal, terpadu dan efisien.**

Faktor pendukung utama dari pembangunan adalah tersedianya sistem infrastruktur yang handal, terpadu dan efisien. Infrastruktur yang handal artinya tepat guna dan berdaya guna. Terpadu mengarah pada pengertian terintegrasi dengan faktor pendukung lainnya, dan efisien artinya sesuai kebutuhan.

Meningkatkan peran sektor jasa dan perdagangan untuk menunjang agribisnis dan industri. Upaya-upaya seperti peningkatan kualitas dan aksesibilitas jasa dan perdagangan, meningkatkan kegiatan ecotourism, agrowisata dan wisata industri, dapat menunjang agribisnis dan industri. Artinya, pemerintah Kabupaten Bekasi tidak hanya memikirkan pengembangan agrobisnis itu sendiri, tetapi juga

menjangkau aspek pasar melalui peningkatan aksesibilitas jasa dan perdagangan. Hal ini semakin terasa penting mengingat wilayah Kabupaten Bekasi yang cukup luas.

5.3.2 Tinjauan Terhadap RTRW Kabupaten Bekasi

Kedudukan Kecamatan Muaragembong dalam konstelasi Regional sebagai WP (wilayah pengembangan) IV / Bekasi bagian Barat. Pada WP IV ditandai dengan dominasi kegiatan pertanian lahan basah, permukiman/ perumahan, pelabuhan, industri dan pariwisata. Ibukota Kecamatan Muaragembong itu sendiri berada di desa Pantai Mekar. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3
Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten Bekasi 2011-2031

No	Wilayah Pengembangan (WP)	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Pusat WP	Fungsi WP
1	I	Tambun Selatan	Tambun	•	Perumahan/permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata, dry port / terminal peti kemas
2		Cibitung	Wanasari		
3		Cikarang Timur	Jatibaru		
4		Cikarang Barat	Telaga Asih		
5		Cikarang Utara	Cikarang Kota		
6		Cikarang Selatan	Sukadamai		
7	II	Cikarang Pusat	Sukamahi	•	Pusat pemerintahan, perumahan/permukiman skala besar, industri, pertanian hortikultura, dan pariwisata.
8		Cibarusah	Cibarusah		
9		Bojongmangu	Bojongmangu		
10		Setu	Ciledug		
11		Serang Baru	Sukasari		
12	III	Sukatani	Sukamulya	•	Pertanian lahan basah, perumahan/permukiman
13		Pebayuran	Kertasari		
14		Sukakarya	Sukakarya		
15		Tambelang	Sukarapih		
15		Sukawangi	Sukawangi		
17		Cabangbungin	Lenggahjaya		

No	Wilayah Pengembangan (WP)	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Pusat WP	Fungsi WP
18		Karang Bahagia	Karangbahagia		
19		Kedungwaringin	Kedungwaringin		
20	IV	Tarumajaya	Pantai Makmur	•	Pertanian lahan basah, perumahan/permukiman, pelabuhan, industri, pariwisata
21		Muaragembong	Pantai Mekar		
22		Babelan	Babelan Kota		
23		Tambun Utara	Sriamur		

Sumber : RTRW Kabupaten Bekasi

Berkaitan dengan penetapan pusat-pusat pertumbuhan serta hirarki pelayanan, maka ditentukan sistem kota-kota yang berlaku di masing-masing WP terdiri dari Kota Hirarki I s/d III.

Kota Hirarki I berfungsi sebagai Pusat Pertumbuhan Utama dengan skala pelayanan nasional dan internasional dalam hal ini ditetapkan beberapa kota antara lain : Tambun Selatan, Cikarang Pusat, Cikarang Barat, Cikarang Utara, dan yang didesain dari orde II menjadi orde I yaitu : Setu, Tarumajaya, Cibitung, Cikarang Selatan. Adapun Tambun Selatan dan Setu didisain menjadi PKN berdasarkan Perpres 54/2008.

Namun didalam RTRW Provinsi Jawa Barat, Kota Cikarang, Tambun Selatan, Setu dan Tarumajaya ditetapkan sebagai PKN yakni kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta berfungsi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa provinsi. Kriteria penentuan PKN adalah kota yang mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya, pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yang cakupan pelayanannya berskala nasional/beberapa provinsi, pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional/beberapa provinsi, jasa pemerintahan untuk nasional/beberapa provinsi, jasa publik yang lain untuk nasional/beberapa provinsi.

Di Kota Cikarang saat ini telah dikembangkan kawasan hunian dan perdagangan baru yakni Kota Delta Mas. Dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut, wilayah pengembangan utama yang berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi berada di WP IV. Kegiatan ekonomi yang sudah berkembang di WP IV meliputi kegiatan ekonomi yang berbasis : industri, perdagangan dan jasa serta permukiman.

Kota Pantai Makmur (Kecamatan Tarumajaya) yang didisain sebagai pendorong pelayanan utama bagian utara Kabupaten Bekasi berfungsi sebagai pusat pertumbuhan perdagangan, jasa, perumahan/permukiman dan industri. Skala pelayanan: internasional, interregional, regional dan lokal.

Kota Hirarki II yakni :

1. **Kota Sukamulya** (Kecamatan Sukatani) berfungsi sebagai pusat pertumbuhan kegiatan pertanian, agro industri, agro wisata dan permukiman. Skala pelayanan : interregional, regional dan lokal.
2. **Kota Cibarusah** (Kecamatan Cibarusah) berfungsi sebagai pusat pertumbuhan kegiatan pertanian hortikultura, agro industri, agro wisata dan permukiman. Skala pelayanan : interregional, regional dan lokal.

Kota Hirarki III adalah Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Muaragembong dan Kecamatan Kedungwaringin berfungsi sebagai pusat produksi, koleksi dan distribusi dengan pelayanan intraregional dan lokal.

Pola ruang diwujudkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yaitu berupa daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan dan daya tampung lingkungan sosial. Kebijakan yang menyangkut tentang pola ruang meliputi kebijakan pola ruang kawasan lindung, kawasan budidaya serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dilihat dari perkembangan kawasan permukiman, konsentrasi perkembangan kegiatan permukiman dipengaruhi oleh faktor jaringan jalan, yang merupakan embrio pertumbuhan area terbangun dan pusat aktivitas penduduk. Perkembangan kawasan permukiman sebagian besar terletak di wilayah bagian tengah dan selatan Kabupaten Bekasi, serta menyebar di beberapa bagian di utara Kabupaten

Bekasi, dimana sebagian besar kondisi geografisnya relative datar dan memiliki daya dukung lahan yang tinggi.

Pola ruang Kecamatan Muaragembong berkembang sebagai kawasan pariwisata, wilayah pertanian dan sebagai kawasan permukiman. Hal ini dapat dilihat pada fungsi Kecamatan Muaragembong dalam Kabupaten Bekasi sebagai kawasan pertanian dan sebagai kawasan permukiman yang berada di Bekasi bagian Barat.

A. Kebijakan Pola Ruang Kawasan Lindung

Secara umum arahan pengembangan kawasan lindung dilakukan dengan mengembangkan kawasan lindung minimal menjadi 30 % dari luas lahan kabupaten, memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung, dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan pada kawasan lindung. Penjabaran lebih lanjut dari arahan ini adalah sebagai berikut:

- Untuk pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dilakukan dengan mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi.
- Untuk kawasan perlindungan setempat, arahan pengembangannya adalah:
 1. Melestarikan dan melindungi kawasan lindung yang ditetapkan dari alih fungsi.
 2. Mengembangkan kawasan yang potensial sebagai jalur hijau pengaman prasarana.
 3. Intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka hijau.
 4. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada, dan mengendalikan alih fungsi ke fungsi lain.
- Untuk kawasan pelestarian alam adalah menyelamatkan keutuhan potensi keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya (habitat), potensi sumberdaya kehidupan serta keanekaragaman sumber genetiknya.

B. Kebijakan Pola Pemanfaatan Ruang Budidaya

Untuk mendukung terciptanya pola ruang kawasan budidaya di masa yang akan datang sesuai dengan yang diharapkan, maka pola pemanfaatan kawasan budidaya ini terutama diarahkan dengan cara:

1. Mengendalikan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW.
2. Mendorong perkembangan kawasan budidaya yang sesuai dengan RTRW.

Arahan tersebut diatas tidak terlepas dari arahan masing-masing sektoral yang terdapat dalam pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya, yaitu arahan untuk kawasan perumahan, kawasan dan kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, industri dan pergudangan, pariwisata dan rekreasi, serta pertahanan dan keamanan.

C. Kebijakan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah :

1. Meningkatkan daya dukung lingkungan alamiah dan buatan
2. Menjaga keseimbangan daya tampung lingkungan untuk menjaga proses pembangunan berkelanjutan

5.3.3 Tinjauan Terhadap Sistem Transportasi Kabupaten Bekasi (Tatralok)

5.3.3.1 Konsep Idealisasi Pengembangan Jaringan Jalan

Sistem jaringan transportasi berbasis jalan dapat dikelompokkan berdasarkan hirarki serta fungsinya dan merupakan prasarana transportasi yang akan sangat mempengaruhi secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah serta akan berpengaruh juga pada tingkat kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali Kabupaten Bekasi. Banyak masalah keterbelakangan (kemiskinan) terjadi sebagai akibat karena masih rendahnya tingkat aksesibilitas (keterhubungan) antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, yang menyebabkan wilayah dengan aksesibilitas buruk menjadi kurang produktif dan pendapatan masyarakat menjadi berkurang.

Sejalan dengan adanya kebijakan otonomi daerah, maka peran sistem jaringan jalan menjadi semakin nyata dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan aksesibilitas antarwilayah. Salah satu usaha yaitu melalui perbaikan aksesibilitas daerah yang telah berkembang dengan daerah yang masih terisolir (remote area) dengan memanfaatkan sistem jaringan jalan dalam pengembangan wilayah pedalaman (rural area). Konsep idealisasi sistem jaringan jalan di Kabupaten Bekasi, yaitu dengan mengkoneksikan keterhubungan antara kecamatan satu dengan lainnya. Rencana pengembangan Tol Karang Tanjung, Tol Jati Asih-Karawang Timur dan tol Cimanggis – Setu – Cibitung bertujuan untuk mengurangi beban lalu lintas didalam kota dan juga memacu pengembangan wilayah Kabupaten Bekasi bagian selatan dan Utara, peningkatan Jalan Raya Cibusah (menuju Cibusah), jalan Cibusah, Jalan Raya Tambun dan Jalan Raya Setu juga menjadi pertimbangan dalam pengembangan jaringan prasarana jalan.

Konsep idealisasi jaringan jalan di Kabupaten Bekasi tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pergerakan masyarakat Kabupaten Bekasi dan juga untuk mengantisipasi perkembangan kota yang dari tahun ke tahun tumbuh dengan pesat.

Pengembangan sistem jaringan jalan di Kabupaten Bekasi tidak hanya terbatas pada pengembangan jalan internal dalam kota, namun juga melakukan pengembangan pada wilayah kabupaten yang berbatasan langsung. Seiring dengan meningkatnya pola pergerakan perjalanan khususnya lalu lintas yang menerus, maka pengembangan jaringan jalan tol telah menjadi rencana ke depan, yaitu dengan rencana dibangunnya jalan tol Karang Tanjung (Cibitung – Tanjung Priuk), Tol Jatiasih – Karawang Timur dan tol Cimanggis – Setu – Cibitung sebagai upaya mendukung pergerakan dari Kabupaten Bekasi ke Jabodetabekjur-Bandung.

5.3.3.2 Konsep Idealisasi Pengembangan Jaringan Pelayanan Angkutan Orang

Angkutan umum perkotaan adalah merupakan salah satu tulang punggung (backbone) ekonomi perkotaan, dimana kota yang „baik“ dan „sehat“ dapat ditandai dengan melihat kondisi sistem angkutan umum perkotaannya. Namun terlepas dari pendapat tersebut bahwa angkutan umum sangat sering dituduh menjadi penyebab kemacetan di semua kota-kota besar di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tidak terdapatnya perencanaan yang menyeluruh yang mencakup semua aspek-aspek yang akan terlibat didalamnya seperti : (1) pola tata guna tanah; (2) pola jaringan jalan; (3) pola penyebaran penduduk dan pola kebutuhan pergerakan; (4) sistem operasi dan tingkat pelayanan.

Perencanaan sistem operasi pergerakan angkutan umum yang tidak menyeluruh tersebut akan menambah beban permasalahan kemacetan yang telah ada seperti : (1) tumpang tindihnya rute; (2) armada yang terlalu besar; (3) tingkat pelayanan yang rendah; (4) trayek yang tidak optimal (5) waktu tempuh yang lama dan lain-lainnya. Hal ini akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat efektifitas, efisiensi serta pelayanan angkutan umum yang ada dan semakin menambah tingkat kemacetan.

Tingkat pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini, sementara panjang dan lebar jalan yang nyaris tidak berubah, membuat kota semakin kesulitan mengakomodir pertumbuhan tersebut. Penanganan terhadap moda angkutan umum merupakan bagian terpenting dari upaya mengatasi permasalahan lalu-lintas. Konsep Manajemen Kebutuhan Transportasi (MKT) sebagai idealisasi pengembangan jaringan pelayanan angkutan orang, diharapkan dapat menggantikan pendekatan konvensional dalam memecahkan masalah transportasi perkotaan. Konsep idealisasi pengembangan jaringan pelayanan orang menguraikan beberapa permasalahan utama yang ditimbulkan oleh keberadaan angkutan umum ditinjau dari sisi demand dan supply serta beberapa usaha perbaikan sistem transportasi angkutan umum yang perlu dilakukan dalam usaha untuk memecahkan masalah transportasi di perkotaan.

Perbaikan sistem angkutan umum di Kabupaten Bekasi merupakan solusi utama yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Perilaku masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi harus segera dirubah. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan paksaan ataupun dengan penyediaan pilihan lain. Angkutan umum yang aman, nyaman dan tepat waktu serta terintegrasi satu sama lainnya merupakan pilihan lain paling logis yang dapat merubah perilaku tersebut. Angkutan umum yang baik juga memberikan peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan biaya yang terjangkau dan aksesibilitas yang tinggi dengan dampak lingkungan yang minimal dalam sebuah kesetaraan sosial yang tinggi.

Perbaikan sistem angkutan umum yang tepat untuk Kabupaten Bekasi adalah dengan merubah pola penyelenggaraan angkutan umum secara menyeluruh. Komponen utama yang harus diubah adalah :

- a. Sistem pengoperasian yang memberikan prioritas yang tinggi terhadap angkutan umum;
- b. Manajemen pengoperasian yang memberikan jaminan penyelenggaraan berbasis pada persaingan usaha yang sehat yang mengutamakan pada tingginya mutu pelayanan dan keberlanjutan usaha, serta;
- c. Jaringan angkutan umum yang mampu menjamin aksesibilitas seluruh warga kota dan terintegrasi dengan sistem tata kota hingga pada akhirnya membuat Kabupaten Bekasi menjadi kota yang sangat nyaman untuk dihuni.

Perubahan ini dapat dimulai dengan membangun suatu Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang dapat menyediakan pelayanan penumpang dalam jumlah besar. Dari sekian banyak pilihan teknologi yang ada, BRT (Bus Rapid Transit) yang merupakan salah satu jenis sistem MRT berbasis jalan raya, sangat tepat diimplementasikan di Kabupaten Bekasi. Hal ini disebabkan karena :

- a. Pengoperasian SAUM memberikan prioritas bagi angkutan umum dalam pemanfaatan ruang jalan melalui penyediaan jalur khusus untuk BRT;
- b. Kapasitas angkut bersifat fleksibel;
- c. Biaya investasi pembangunan yang dibutuhkan relatif sangat rendah. Sehingga, biaya investasi BRT dapat dipenuhi dari anggaran pemerintah kota.

Namun keberhasilan sistem BRT ini mempersyaratkan :

- a. Adanya integrasi dengan sistem pendukung lain seperti jaringan pengumpan (feeder system) dan sistem transportasi kendaraan tidak bermotor terutama fasilitas jalur sepeda dan pejalan kaki;
- b. Adanya institusi penyelenggaraan angkutan umum yang sehat dengan mekanisme perizinan yang transparan dan mengutamakan tinginya kualitas pelayanan;
- c. Adanya persiapan yang matang (menyeluruh) dan tahapan yang tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Intensitas dan kontinuitas sosialisasi ini harus tetap terjaga selama masa perencanaan hingga akhir pelaksanaan. Materi sosialisasi ini tidak hanya menyangkut hal-hal teknis semata tetapi juga termasuk latar belakang yang mendasari tiap tindakan yang diambil dan upaya antisipasi pemerintah kota terhadap setiap konsekwensi yang harus dihadapi masyarakat terkait dengan pelaksanaannya.

5.3.3.3 Konsep Idealisasi Pengembangan Jaringan Pelayanan Angkutan Barang

Jaringan pelayanan angkutan barang (jaringan lintas) merupakan jaringan pelayanan angkutan barang berdasarkan kesamaan kelas jalan. Jaringan lintas ini secara umum ditetapkan pada koridor utama yang biasanya adalah jalan arteri primer dengan kelas II atau minimal IIIA (jalan tol termasuk dalam jalan Kelas II).

Untuk angkutan peti kemas (yang alat angkutnya spesifik dan tidak semua jalan bisa dilalui) ditetapkan pula lintas pelayanan peti kemas untuk peti kemas yang sesuai dengan ISO, yakni 20 kaki dan 40 kaki. Adapun lintasan untuk kedua jenis peti kemas tersebut dibagi dalam 2 (dua) kategori, yakni :

- a. Lintas angkutan peti kemas 20 kaki dan 40 kaki lintasan normal (gradient normal).
- b. Lintas angkutan peti kemas dengan gradient $> 7\%$ untuk angkutan peti kemas 20 kaki dan gradient $> 5\%$ untuk angkutan peti kemas 40 kaki.

Pada jangka panjang lintas angkutan peti kemas 40 feet dilayani oleh rencana jalan tol yang akan dibangun. Penetapan lintas peti kemas dilakukan untuk Kabupaten Bekasi, hal ini secara implisit menyatakan bahwa pada dasarnya di Indonesia jaringan jalan yang ada belum mampu mengakomodasi kebutuhan lalu lintas peti kemas baik dari sisi kelas jalan (daya dukung konstruksi jalan yang minimal IIIA) dan dari sisi geometrik (gradient, lengkung tikungan, lebar, dll).

Idealnya jaringan jalan lintas memenuhi syarat untuk digunakan sebagai lintas angkutan barang sebagai tulang punggung sistem logistik nasional untuk perjalanan dalam pulau (inland transport). Pemecahan masalah terutama dalam peningkatan tonase jalan, perbaikan geometrik, serta penyediaan fasilitas pendukung untuk perangkutan barang.

Selain permasalahan lintas pelayanan angkutan barang, yang perlu diperhatikan juga adalah keberadaan dari terminal angkutan barang (dry-port) sebagai titik artikulasi dan distribusi.

5.3.3.4 Konsep Idealisasi Pengembangan Jaringan Jalan Rel

Jaringan pelayanan transportasi kereta api pada Tatanas yaitu lintas utama kereta api yang melayani antar ibukota provinsi dan antar kota besar lainnya. Pada Tatarwil, jaringan pelayanan transportasi kereta api diupayakan dapat menghubungkan antar ibukota kabupaten dan antar kota-kota besar dengan frekuensi yang lebih besar. Sedangkan jaringan pelayanan transportasi kereta api pada Tatalok kota yaitu lintas lokal perkotaan, yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pemukiman.

Ruang lalu lintas kereta api pada Tatanas yaitu jaringan jalan rel yang melayani lintas utama, yang menghubungkan ibukota provinsi dan kota besar lainnya diupayakan jaringan rel dapat menghubungkan antar ibukota provinsi dan kota-kota besar lainnya. Demikian juga jaringan transportasi kereta api pada Tatarwil yaitu jaringan rel kereta api lintas cabang yang melalui ibukota dengan kota lainnya di suatu provinsi.

Simpul transportasi kereta api pada Tatanas berupa stasiun besar diupayakan tersedia pada setiap ibukota provinsi dan kota-kota besar lainnya yang

dihubungkan oleh jaringan rel pada lintas utama. Pada Tatrawil, simpul transportasi kereta api berupa stasiun sedang jaringan jalan rel pada lintas cabang dan ketersediaan di ibukota kabupaten/kota, sedang simpul transportasi kereta api pada Tatralok kota yaitu stasiun kecil yang dihubungkan dengan jaringan jalan rel lintas lokal perkotaan.

Pengembangan jaringan transportasi kereta api nasional diarahkan untuk angkutan penumpang jarak jauh dan angkutan barang masal baik antar maupun angkutan dalam kota, meliputi sarana, prasarana maupun pengembangan jaringan dengan strategi pengembangan yang secara rinci meliputi :

- a. Modernisasi industri perkeretaapian.
- b. Meningkatkan keselamatan dan kehandalan perkeretaapian.
- c. Meningkatkan kapasitas lintas.

Dalam hubungan tersebut pembangunan jaringan nasional transportasi jalan rel di Pulau Jawa diutamakan untuk permintaan angkutan lebih untuk melayani angkutan penumpang. Pola pengembangan jaringan nasional kereta api di Pulau Jawa dilakukan melalui strategi menghidupkan kembali lintas cabang yang sudah ditutup dan membuat jaringan yang menghubungkan jaringan-jaringan yang masih terpisah di Pulau Jawa menjadi suatu jaringan terpadu yang efisien. Berdasarkan rencana induk pengembangan jaringan jalan rel di Pulau Jawa, bahwa arah dan kebijakan pembangunan infrastruktur kereta api di wilayah Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Bekasi akan dikembangkan sebagai lintasan cabang, dan akan dikembangkan lintas Lemah Abang- Jakarta dan Lemah Abang-Bandung,. Pada masa mendatang konsep jaringan double-double track perlu dipertimbangkan.

Selain itu berdasarkan konsep tata ruang Jabodetabekjur lintasan kereta api barang akan dikembangkan pada lintasan Cikarang – Tanjung Priuk. Konsep ini lintasan yang dikembangkan disesuaikan dengan lintasan rencana pembangunan tol Tanjung Priuk –Cikarang. Tetapi konsep ini perlu disinkronisasikan dengan rencana pembangunan terminal petikemas di wilayah Lemah Abang. Guna mempersiapkan pembangunan lintas tersebut, maka diperlukan prasarana pendukung seperti pembangunan stasiun kereta api. Stasiun kereta api Kabupaten

Bekasi yang ada sekarang yaitu Tambun, Cikarang dan Lemah Abang perlu dilakukan optimalisasi dan revitalisasi guna mendukung arah pengembangan lintasan cabang.

5.3.4 Kebijakan Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi

Menurut Perda Nomor 5/2003 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi 2003-2013, kebijakan rencana tata ruang didasarkan pada :

- Fungsi utama perlindungan dan budidaya
- Fungsi kawasan dan kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu/khusus.
- Pemanfaatan ruang secara optimal harus tercermin didalam penentuan jenjang, fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah.
- Menciptakan keseimbangan dan keserasian struktur dan pola pemanfaatan ruang serta penyebaran penduduk antar kawasan serta antar sektor dan antar daerah dalam satu kesatuan wawasan nusantara. Keseimbangan dan keserasian fungsi dan identitas pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten.
- Menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.
- Penataan ruang harus menjamin kelestarian dan kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Wilayah perencanaan dalam Rencana Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi yang terdiri dari 3 kecamatan yakni :

1. Kecamatan Tarumajaya
2. Kecamatan Babelan
3. Kecamatan Muaragembong

Kebijakan perencanaan Kawasan Khusus Pantura Kabupaten Bekasi secara ringkas dapat dipaparkan sebagai berikut :

- Rencana struktur pemanfaatan ruang kawasan khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi meliputi : Kawasan Pengembangan, Pusat Utama Kawasan dan Pusat Kawasan Pengembangan (Pusat KP).
- Pusat Utama Kawasan adalah pusat pengembangan dan pelayanan bagi Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Muaragembong, diarahkan pada Kota Pantai Makmur.
- Struktur pemanfaatan ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi diarahkan menjadi 5 (lima) kawasan pengembangan (KP), yakni :
 - KP I : Kawasan Pengembangan Tarumajaya Selatan dan Babelan Selatan
 - KP II : Kawasan Pengembangan Tarumajaya Utara
 - KP III : Kawasan Pengembangan Babelan Utara
 - KP IV : Kawasan Pengembangan Muaragembong Selatan
 - KP V : Kawasan Pengembangan Muaragembong Utara
- Pusat-pusat KP sebagai berikut :
 - Pusat KP I adalah Desa Babelan Kota
 - Pusat KP II adalah Desa Pantai Makmur
 - Pusat KP III adalah Muara Bakti
 - Pusat KP IV adalah Desa Pantai Bahagia
 - Pusat KP V adalah Desa Pantai Mekar
- Pusat Kawasan Pengembangan (Pusat KP) adalah pusat pengembangan dan pelayanan bagi kawasan pengembangan Pusat-pusat KP yang terdapat pada wilayah Kawasan Pantura Bekasi terdapat di KP I, KP II dan KP III yaitu :
 - Desa Babelan Kota
 - Desa Pantai Makmur (Pusat KP merangkap Pusat Utama Kawasan)
 - Desa Muara Bakti
- Kawasan Pengembangan pada wilayah Kecamatan Pantura Bekasi dan cakupan wilayah dari kawasan pengembangan tersebut.

5.3.5 Kajian RDTR Kecamatan Muaragembong

5.3.5.1 Rencana Struktur Ruang Kecamatan Muaragembong

Struktur ruang Kecamatan Muaragembong dibentuk oleh penataan hirarki ruang serta hubungan antar hirarki ruang tersebut yang dipengaruhi oleh penyebaran penduduk, penyebaran pusat-pusat pelayanan, pengembangan transportasi, pengembangan utilitas, penyebaran sarana ekonomi sosial dan budaya.

Pengembangan struktur ruang kawasan perencanaan bertujuan untuk :

- Menjabarkan struktur ruang kabupaten sebagaimana tertuang di dalam RTRW Kabupaten Bekasi;
- Mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah perencanaan melalui penempatan fungsi-fungsi utama kawasan dan fasilitas social-ekonomi kawasan secara berjenjang pada tiap unit-unit lingkungan sesuai dengan penduduk pendukung
- Menghindari terjadinya segregasi keruangan (spatial segregation) melalui pemberian fungsi dan peran tiap-tiap lingkungan kawasan secara jelas dan berjenjang.
- Menciptakan sinergi perkembangan kawasan yang didukung oleh pembentukan interaksi yang kuat antar fungsi-fungsi tiap lingkungan kawasan
- Membatasi pengembangan pada ruang-ruang yang memiliki fungsi konservasi serta memiliki kerawanan bencana cukup tinggi (banjir)
- Mendorong pengembangan ruang yang diarahkan menjadi kawasan permukiman baru

Faktor-faktor khusus yang mempengaruhi strauktur ruang kawasan antara lain :

- Kebijakan wilayah pengembangan WP IV Kabupaten Bekasi dengan pusat pengembangan utama di kecamatan Tarumajaya
- Rencana pengembangan jalan lintas utara dan rencana pengembangan JORR II yang akan meningkatkan aksesibilitas kawasan perencanaan
- Fungsi dan peran kawasan perencanaan dalam struktur fisik dan fungsional Kabupaten Bekasi khususnya dalam Wilayah Pengembangan IV,

- Peluang, kendala dan kecenderungan perkembangan fisik dan ekonomi kawasan
- Fungsi fungsi yang telah berkembang di dalam wilayah Kecamatan Muaragembong
- Pemilihan jenis fasilitas social yang akan ditempatkan ke setiap pusat lingkungan

Rencana struktur tata ruang Kecamatan Muaragembong sebagaimana tertuang di dalam RTRW Kabupaten Bekasi dikembangkan melalui pengembangan dua karakter kegiatan, yaitu perdesaan dan semi perkotaan (*sub-urban*).

Strategi pengelolaan Kawasan Perdesaaan adalah meliputi :

- ❖ Pengendalian pemukiman pedesaan tidak berubah menjadi pemukiman perkotaan dengan tujuan agar lahan pertanian yang produktif tetap dapat dipertahankan serta konservasi air dapat terjaga dengan baik.
- ❖ Pengembangan kegiatan agrobisnis dan industri melalui pembangunan pusat pertumbuhan yang dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya.
- ❖ Pengembangan desa wisata, bagian dari pengembangan budaya dan kearifan lokal.
- ❖ Pengembangan kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, tanaman tahunan, hutan produksi, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan kawasan permukiman perdesaan.

5.3.5.2 Rencana Pengembangan Blok Fungsional

Pengembangan blok fungsional dimaksudkan untuk membagi kawasan dalam fungsi fungsi yang spesifik sesuai dengan daya dukung serta potensi lahan dan arahan RTRW Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil analisis daya dukung ruang maka fungsi ruang Kecamatan Muaragembong dibagi menjadi 2, yaitu :

1) Ruang Dengan Fungsi Produksi

Ruang dengan fungsi produksi dimaksudkan untuk menyediakan ruang-ruang untuk pengembangan ekonomi kawasan yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan. Pengembangan ruang-ruang ekonomi yang

bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan ini di dukung oleh penetapan kawasan lindung.

Selain itu ruang dengan fungsi produksi pertaniandan perikanan sejalan dengan peran Kecamatan Muaragembong sebagai daerah belakang Kecamatan Tarumajaya sebagai pusat Wilayah Pengembangan (WP) IV di Kabupaten Bekasi.

2) Ruang Dengan Fungsi untuk Permukiman

Ruang dengan fungsi permukiman dikembangkan untuk mengembangkan perumahan dan fasilitas pendukungnya, serta pengembangan ekonomi non pertanian dan perikanan.

Sinergi ruang permukiman dan ruang untuk produksi ini di dukung oleh pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat distribusi Kecamatan Tarumajaya.

Berdasarkan karakteristik ruang sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya di kembangkan menjadi blok blok fungsional yang lebih rinci, dimana setiap blok dikembangkan berdasarkan atas kesamaan pemanfaatan lahan dominan serta kesamaan potensi dan keterbatasan dalam pengembangan fungsi ruang.

Tabel 5.4
Rencana Pengembangan Blok Fungsional

Blok	Wilayah	Fungsi Pengembangan	Keterangan
A	- Desa Pantai Bahagia - Sebagian Desa Pantai Sederhana	- Pengembangan fungsi perikanan dan fasilitas pendukungnya - Pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya - Pengembangan perumahan nelayan dan fasilitas pendukungnya	- Membatasi pengembangan ruang di sekitar sungai yang rawan terhadap banjir - Mengembangkan ruang yang memiliki daya dukung tinggi untuk pengembangan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya
B	Desa Pantai Bakti	- Pengembangan fungsi perikanan dan fasilitas pendukungnya - Pengembangan perumahan nelayan dan fasilitas pendukungnya	
C	Sebagian Desa Pantai Mekar	Pengembangan fungsi lindung untuk	

Blok	Wilayah	Fungsi Pengembangan	Keterangan
	Sebagian Desa Pantai Harapan Jaya	mendukung pengembangan sektor perikanan dan pertanian	
D	- Sebagian Desa Pantai Mekar - Sebagian Desa Pantai Harapan Jaya - Desa Jaya Sakti	- Pengembangan fungsi perumahan - Fasilitas pelayanan ekonomi, sosial dan budaya tingkat kecamatan	

Selanjutnya setiap blok tersebut akan dibagi menjadi beberapa sub blok, yang penentuannya dilakukan dengan pendekatan konsep unit lingkungan . Dasar penentuan lokasi, jenis kegiatan dan besaran luas kawasan pusat-pusat kawasan ditentukan berdasarkan bentuk wilayah pelayanan, jangkauan pelayanan serta pemanfaatan potensi yang ada.

5.3.5.3 Kebijakan Mengenai Abrasi, Sedimentasi dan Perubahan Garis Pantai

A. Tahapan Pembangunan Kawasan Pantai Utara Kabupaten Bekasi

Dengan tujuan mampu menampung konsep pengembangan sektor-sektor terutama sektor dominan, pusat-pusat pertumbuhan permukiman, pengembangan sistem transportasi dan prasarana penunjangnya dengan memperhatikan keseimbangan antara kawasan lindung dan budi daya.

Adapun prioritas pembangunan dilakukan melalui program-program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yakni peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang saat ini masih rendah dan pemerataan pendapatan yang saat ini masih ada kesenjangan yang mencolok.

Beberapa program dalam Rencana Tahapan Pembangunan antara lain :

-  Program Penataan Struktur Tata Ruang Kawasan Lindung dan Budi Daya
Program ini diarahkan untuk mendukung keseimbangan lingkungan atau untuk menjaga kestabilan antara kawasan lindung dan budi daya.
-  Program Penataan Struktur Tata Ruang bagi pengembangan sektor dominan.

- ❖ Program ini diarahkan bagi kegiatan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan serta peningkatan kesempatan kerja sektor dominan di Kabupaten Bekasi
- ❖ Program Penataan Struktur Tata Ruang bagi pengembangan Sistem Permukiman/Sistem kota-kota.
- ❖ Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan peran dan fungsi kota-kota pusat pertumbuhan dalam lingkup provinsi maupun antar kabupaten serta pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya.
- ❖ Program Penataan Struktur Tata Ruang bagi pengembangan Sistem Jaringan Transportasi dan Sistem Prasarana.
Program ini diarahkan pada pengaturan sistem aktivitas, sistem pola aliran barang dan jasa, serta sistem pengembangan jaringan jalan. Peningkatan sistem prasarana dan penunjang diarahkan pada peningkatan daya dukung listrik dan peningkatan penyediaan air bersih dan telepon.

B. Konsep Pengembangan dan Penataan Ruang Kawasan Pantai Utara Kabupaten Bekasi

Daya dukung yang dimiliki oleh kawasan pantai utara Kabupaten Bekasi dilihat dari wilayah pengembangan kawasan pesisir yang berwawasan lingkungan antara lain :

1. Hutan Mangrove dan Sempadan Pantai
2. Sempadan Sungai dan Ruang Terbuka Hijau.

Pengembangan dan pemanfaatan kawasan pantai tidak akan berhasil dan optimal apabila daya dukung yang dimiliki tidak sesuai. Cakupan lokasi pengembangan kawasan pantai utara di Kabupaten Bekasi adalah Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya. Setiap kecamatan memiliki permasalahan dan potensi yang berbeda untuk itu perlu adanya kebijakan terkait kawasan khusus pantai Utara, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 5.5
Kebijakan Terkait Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi

No	Deskripsi Pengembangan	Kecamatan	Desa	Prasarana/Sarana yang diperlukan	Tindak Lanjut yang diperlukan
1	Kawasan Lindung	 Muaragem bong	❖ Desa Pantai Bakti ❖ Desa Pantai Bahagia ❖ Desa Pantai Sederhana ❖ Desa Pantai Mekar ❖ Desa Harapan Jaya	- Hutan Mangrove, Tanggul/Revetment/Tembok Pantai - Ruang Terbuka Hijau - Ruang Terbuka Hijau - Hutan Mangrove, Tanggul/Revetment/Tembok Pantai - Ruang Terbuka Hijau - Hutan Mangrove, Jetty, Grolin, Tanggul/Revetment/Tembok Pantai - Ruang Terbuka HIjau - Hutan Mangrove, Jetty, Groin, Tanggul/Revetment/Tembok Pantai	- Sosialisai kepada masyarakat tentang : - Rencana Penataan Kawasan Pesisir - Pentingnya melestarikan lingkungan - Pentingnya Hutan Lindung bagi Budi Daya masyarakat - Hukum, perundang-undangan dan peraturan pemerintah/daerah. - Manfaat Hutan Lindung bagi Budidaya masyarakat - Perilaku hidup sehat - Antisipasi terhadap bencana - Penyuluhan budidaya yang benar - Peran masyarakat dalam pembangunan - o Penyediaan Kawasna Permukiman dengan prasarana dan sarana yang memenuhi standar kesehatan - o Menjadikan Kawasan Lindung menjadi Wisata Suaka Alam/Ekosistem

2	Kawasan Permukiman	Muaragembo ng	❖ Desa Pantai Bakti ❖ Desa Pantai Bahagia ❖ Desa Pantai Sederhana ❖ Desa Pantai Mekar ❖ Desa Jaya Sakti	❖ Lahan untuk relokasi permukiman dan jalan ❖ Air bersih, Sanitasi, Pengelolaan Sampah/Limbah, Tanaman Lingkungan	Sosialisai kepada masyarakat tentang : - Rencana Penataan Kawasan Pantai - Pentingnya Hutan Lindung dan Kawasan Hijau - Perilaku hidup sehat dan antisipasi bencana - Penyuluhan budi daya yang benar - Peran masyarakat dalam pemnagunan Indentifikasi dan Invebtarisasi : - jumlah penduduk yang direlokasi - kawasan relokasi - status kepemilikan lahan
---	--------------------	------------------	---	--	---

Sumber : Kajian Abrasi dan Sedimentasi Pantai Utara Kabupaten Bekasi, 2007

C. Identifikasi Lokasi Abrasi Dan Sedimentasi Di Wilayah Pantai Utara Kabupaten Bekasi

Wilayah yang terkena abrasi dan sedimentasi di wilayah Pantai Utara Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut ini.

Tabel 5.6
Lokasi Abrasi Dan Sedimentasi Di Wilayah Pantai Utara Kabupaten Bekasi

No	Lokasi	Periode terjadi proses sedimentasi/abrasi pantai		Tindak lanjut yang diperlukan
		2000-2002	2002-2007	
1	Muara Bungin-Muara Wetan	Terjadi Abrasi pantai cukup besar Identifikasi penyebab : 1. Hutan Mangrove sudah semakin rusak 2. Hantaman gelombang terus menerus	Terjadi abrasi pantai cukup besar Identifikasi penyebab : 1. Hutan Mangrove sudah sangat rusak 2. Hantaman gelombang terus menerus 3. Fenomena Perubahan Iklim	- pembebasan permukiman - penentuan garis sempadan pantai dan juga garis sempadan sungai. - Jadikan kawasan lindung : a. Rehabilitasi Hutan Mangrove b. Jalur Terbuka HIJAU sepanjang Garis Sempadan Sungai - Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai (Tanggul/Revenment/Temb

No	Lokasi	Periode terjadi proses sedimentasi/abrasi pantai		Tindak lanjut yang diperlukan
		2000-2002	2002-2007	
				- ok Pantai) - Diatur dengan peraturan pemerintah
2	Muara Wetan-Muara Gobah	Terjadi Abrasi Pantai Cukup Besar Identifikasi Penyebab : 1. Hutan Mangrove sudah semakin rusak 2. Hantaman Gelombang terus menerus	Terjadi Abrasi Pantai Cukup Besar Identifikasi penyebab: 1. Hutan Mangrove sudah musnah (sangat rusak) 2. Hantaman gelombang terus menerus 3. Fenomena perubahan iklim	- pembebasan permukiman - penentuan garis sempadan pantai dan juga garis sempadan sungai. - Jadikan kawasan lindung : a. Rehabilitasi Hutan Mangrove b. Jalur Terbuka HIJAU sepanjang Garis Sempadan Sungai - Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai (Tanggul/Revenment/Tembok Pantai) - Diatur dengan peraturan pemerintah
3.	Muara Bendera	Terjadinya sedimentasi cukup besar Identifikasi penyebab : 1. Angkutan sedimen Sungai Citarum 2. DAS Citarum sudah kritis 3. Hutan Mangrove sudah rusak	Terjadinya sedimentasi cukup besar Identifikasi penyebab : 1. Angkutan sedimen Sungai Citarum 2. DAS Citarum sangat kritis 3. Hutan Mangrove sudah rusak	- pembebasan permukiman - penentuan garis sempadan pantai dan juga garis sempadan sungai. - Jadikan kawasan lindung : a. Rehabilitasi Hutan Mangrove b. Jalur Terbuka HIJAU sepanjang Garis Sempadan Sungai - Perbaiki DAS Citarum (UU No.7/2004) - Pengendalian kualitas air Sungai Citarum (Perda Prov.Jabar No.39/2000) - Pembangunan bangunan pengaman pantai (Tanggul/Revenment/Tembok Pantai) - Pengawasan dan pengendalian kawasan yang konsisten dan kontinyu - Diatur dengan peraturan pemerintah

No	Lokasi	Periode terjadi proses sedimentasi/abrasi pantai		Tindak lanjut yang diperlukan
		2000-2002	2002-2007	
4	Muara Mati di Desa Pantai Mekar	Terjadinya sedimentasi cukup besar Identifikasi penyebab : 1. Angkutan sedimen Sungai Citarum 2. DAS Citarum sudah kritis 3. Hutan Mangrove sudah rusak	Terjadinya sedimentasi cukup besar Identifikasi penyebab : 1. Angkutan sedimen Sungai Citarum 2. DAS Citarum sangat kritis 3. Hutan Mangrove sudah rusak	- pembebasan permukiman - penentuan garis sempadan pantai dan juga garis sempadan sungai. - Jadikan kawasan lindung : c. Rehabilitasi Hutan Mangrove d. Jalur Terbuka Hijau sepanjang Garis Sempadan Sungai - Perbaiki DAS Citarum (UU No.7/2004) - Pengendalian kualitas air Sungai Citarum (Perda Prov.Jabar No.39/2000) - Pembangunan bangunan pengaman pantai (Tanggul/Revenment/Tembok Pantai) - Pengawasan dan pengendalian kawasan yang konsisten dan kontinyu - Diatur dengan peraturan pemerintah
5	Muara Blacan-Muara Nawan-Muara Gobah	Terjadinya sedimentasi cukup besar Identifikasi penyebab : 1. Angkutan sedimen Sungai Citarum 2. DAS Citarum sudah kritis 3. Sungai CBL sudah tercemar berat 4. Degradasi Hutan Mangrove	Terjadinya sedimentasi cukup besar Identifikasi penyebab : 1. Angkutan sedimen Sungai Citarum 2. DAS Citarum sangat kritis 3. Sungai CBL sudah tercemar berat 4. Degradasi Hutan Mangrove	- pembebasan permukiman - penentuan garis sempadan pantai dan juga garis sempadan sungai. - Jadikan kawasan lindung : e. Rehabilitasi Hutan Mangrove f. Jalur Terbuka Hijau sepanjang Garis Sempadan Sungai - Perbaiki DAS Citarum (UU No.7/2004) - Pengendalian kualitas air Sungai Citarum (Perda Prov.Jabar No.39/2000) - Pembangunan bangunan pengaman pantai (Tanggul/Revenment/Tembok Pantai) - Pengawasan dan pengendalian kawasan yang konsisten dan kontinyu - Diatur dengan peraturan pemerintah

No	Lokasi	Periode terjadi proses sedimentasi/abrasi pantai		Tindak lanjut yang diperlukan
		2000-2002	2002-2007	
6	Muara Pecah	Terjadinya sedimentasi cukup besar Identifikasi penyebab : 1. Angkutan sedimen Sungai Citarum 2. DAS Citarum sudah kritis 3. Degradasi Hutan Mangrove 4. Sudah adanya Dermaga di PLTGU Muara Tawar yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta	Terjadinya sedimentasi cukup besar Identifikasi penyebab : 1. Angkutan sedimen Sungai Citarum 2. DAS Citarum sangat kritis 3. Degradasi Hutan Mangrove 4. Sudah adanya Dermaga di PLTGU Muara Tawar yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta	- pembebasan permukiman - penentuan garis sempadan pantai dan juga garis sempadan sungai. - Jadikan kawasan lindung : g. Rehabilitasi Hutan Mangrove h. Jalur Terbuka Hijau sepanjang Garis Sempadan Sungai - Perbaikan DAS Citarum (UU No.7/2004) - Pengendalian kualitas air Sungai Citarum (Perda Prov.Jabar No.39/2000) - Pembangunan bangunan pengaman pantai (Tanggul/Revenment/Tembok Pantai) - Pengawasan dan pengendalian kawasan yang konsisten dan kontinyu - Diatur dengan peraturan pemerintah
7		Terjadinya sedimentasi cukup besar Identifikasi penyebab : 1. Angkutan sedimen Sungai Citarum 2. DAS Citarum sudah kritis 3. Sungai CBL mulai tercemar 4. Degradasi Hutan Mangrove	Terjadinya sedimentasi cukup besar Identifikasi penyebab : 1. Angkutan sedimen Sungai Citarum 2. DAS Citarum sangat kritis 3. Sungai CBL mulai tercemar 4. Degradasi Hutan Mangrove	- pembebasan permukiman - penentuan garis sempadan pantai dan juga garis sempadan sungai. - Jadikan kawasan lindung : c. Rehabilitasi Hutan Mangrove d. Jalur Terbuka Hijau sepanjang Garis Sempadan Sungai - Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai (Tanggul/Revenment/Tembok Pantai) - Diatur dengan peraturan pemerintah.

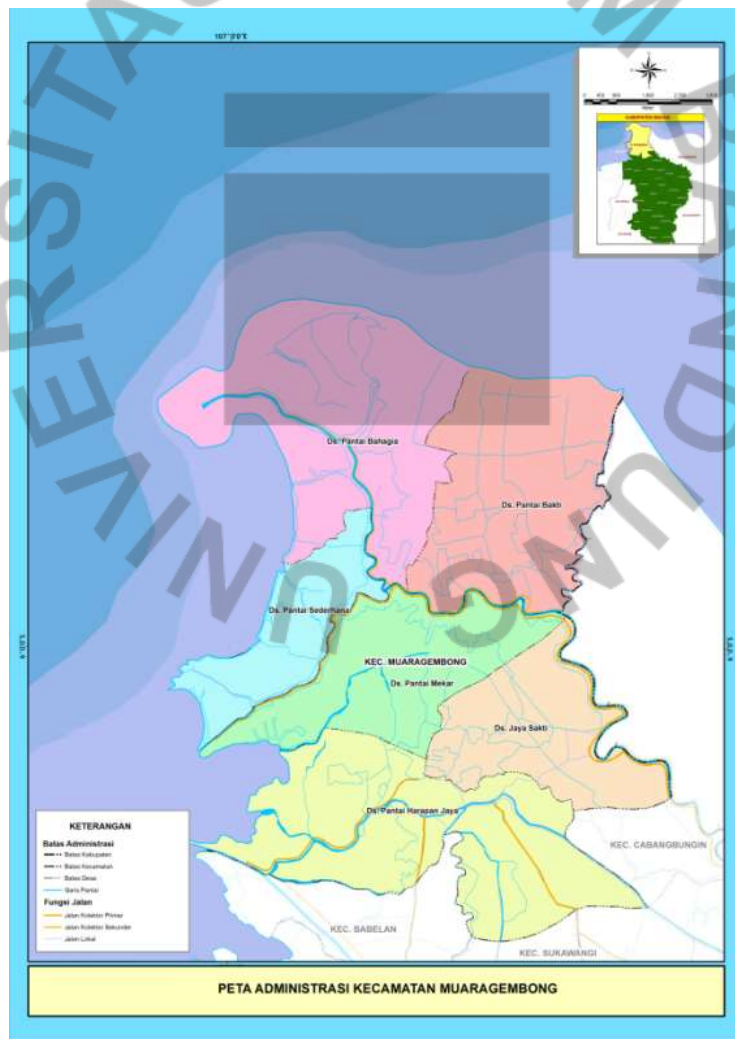
Sumber : Kajian Abrasi dan Sedimentasi Pantai Utara Kabupaten Bekasi, 2007

5.2 Kondisi Eksisting Kecamatan Muaragembong

5.2.1 Kondisi Administrasi dan Geografis

Kecamatan Muaragembong berada pada posisi 6°00'-6°05' Lintang Selatan dan 106°57'-107°02' Bujur Timur mempunyai luas 15.473, 40 Ha (lihat Tabel 5.1). Secara administrasi Kecamatan Muaragembong mempunyai 6 (enam) desa, yaitu Desa Jaya Sakti, Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Bahagia, Desa Pantai Bakti, Desa Pantai Mekar, dan Desa Pantai Harapan Jaya, dengan batas secara administrasi adalah sebagai berikut : (Lihat Gambar 5.1)

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Laut Jawa



Gambar 5.1
Peta Administrasi Kecamatan Muaragembong
Sumber : RTRW Kabupaten Bekasi, Tahun 2009 - 2029

- Sebelah Selatan : Kec. Cabangbungin, Kec. Tambelang, Kec. Babelan
- Sebelah Timur : Kabupaten Karawang

Tabel 5.7
Luas Wilayah Kecamatan Muaragembong

No	Desa	Luas (Ha)
1	Pantai Harapan Jaya	4.680,00
2	Pantai Mekar	1.225,40
3	Pantai Bakti	3.331,00
4	Pantai Bahagia	3.454,00
5	Pantai Sederhana	1.033,00
6	Desa Jaya Sakti	1.750,00
Total		15.473,40

Sumber: Kecamatan Muaragembong Dalam Angka Tahun 2011

5.2.2 Kemiringan Lereng dan Morfologi Wilayah

Kecamatan Muaragembong merupakan wilayah dataran rendah yang mempunyai ketinggian berkisar antara 0 – 10 meter di atas permukaan laut. Kondisi kemiringan lereng wilayah Muaragembong terletak antara 0 – 8%, sehingga wilayah ini merupakan wilayah yang rentan terhadap banjir yang dipengaruhi oleh gelombang pasang surut dan air sungai Citarum.

5.2.3 Kondisi Hidrologi

Kecamatan Muaragembong dilewati oleh Sungai Citarum yang mempunyai 4 (empat) anak sungai, dan merupakan muara Sungai Citarum dan muara dari beberapa anak Sungai Citarum yang bermuara ke Laut Jawa. Muara sungai terdapat di Desa Pantai Bahagia yang merupakan muara Sungai Citarum yang mempunyai lebar antara 30 – 80 meter dengan arus lemah dengan kedalaman rata-rata 3 meter. Dengan melihat pada kondisi ini, Muara sungai ini dimanfaatkan sebagai jalur transportasi laut masyarakat. Di samping itu sungai ini juga dapat

dimanfaatkan sebagai salah satu sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.



Gambar 5.2
Kondisi Daerah Aliran Sungai di Anak Sungai Citarum
Kecamatan Muaragembong

5.2.4 Kondisi Penggunaan Lahan

Lahan di Kecamatan Muaragembong secara eksisting dimanfaatkan sebagai kawasan lindung, permukiman, hutan produksi, pariwisata, pertanian, tambak dan lain-lain. Dari luas lahan yang terdapat di kecamatan Muaragembong, penggunaan lahan eksisting didominasi untuk penggunaan sebagai hutan lindung sebesar 41,76% yang didominasi oleh ekosistem mangrove. Sedangkan yang lain dimanfaatkan untuk kawasan hutan produksi, tambak, permukiman serta masih terdapat lahan yang berupa lahan kosong/tegalan. Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan eksisting di Kecamatan Muaragembong dapat dilihat pada Tabel 5.8 & 5.9 dan Gambar 5.3.

Tabel 5.8
Penggunaan Lahan di Kecamatan Muaragembong

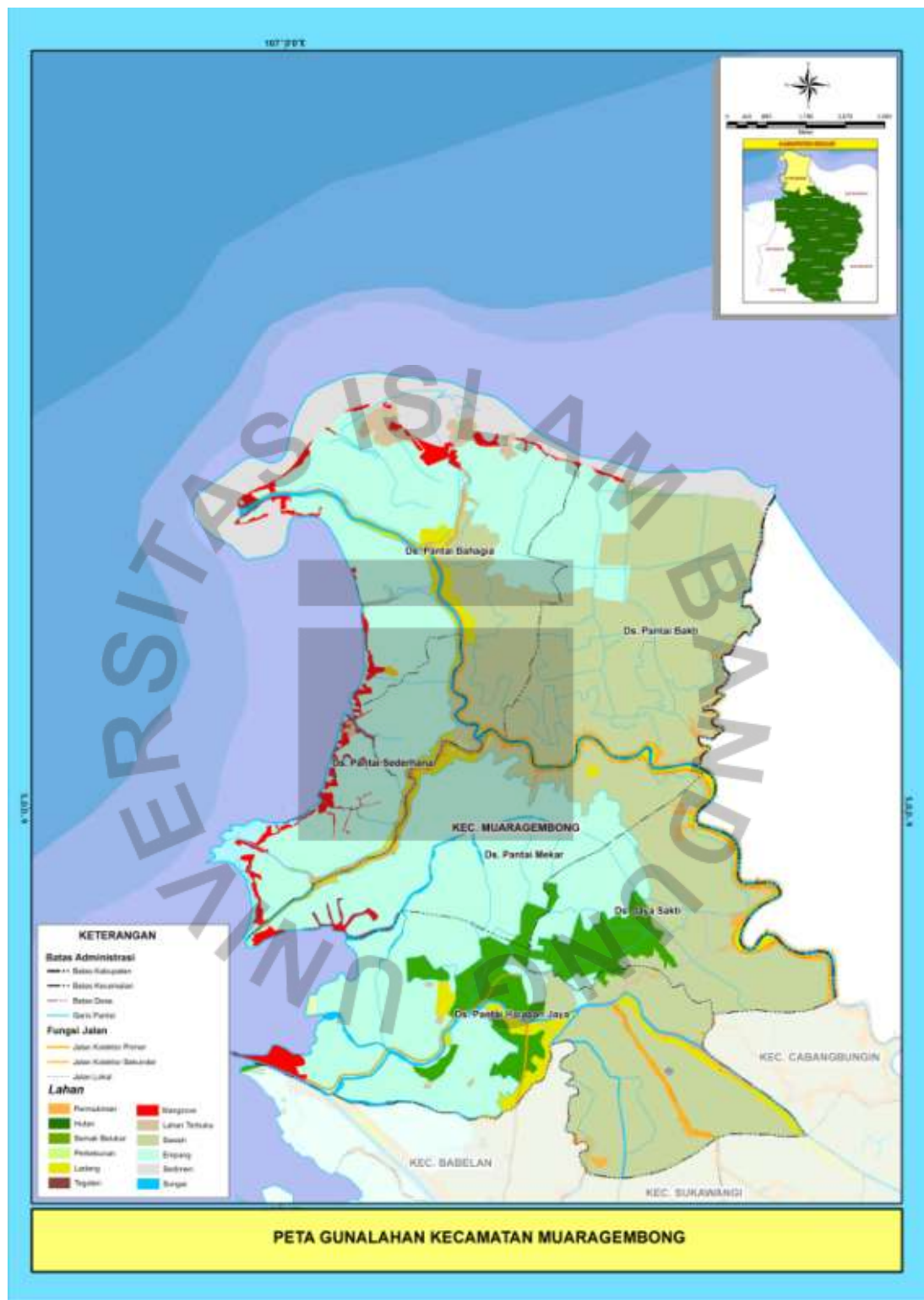
No	Jenis Penggunaan	Luas (ha)
1	Air Laut	6,10
2	Air Tawar	218,83
3	Belukar/Semak	13,57
4	Gedung	0,20
5	Hutan Rawa	215,40
6	Kebun/Perkebunan	7,92
7	Pasir Pantai	-
8	Pemukiman	403,55
9	Rawa/Empang	6.597,31
10	Rumput/Tanah Kosong	5,89
11	Sawah Irigasi	4.643,38
12	Sawah Tadah Hujan	956,62
13	Tegalan/Ladang	2.404,63
Jumlah		15.473,40

Sumber: Kecamatan Muaragembong Dalam Angka Tahun 2011

Tabel 5.9
Kondisi Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan di Kecamatan Muaragembong (Ha)

NO	RPH	Luas Baku	Fungsi Hutan		Tambak		Tanah	Perm Alam	Pemukiman	Sawah	Kebun	Tegalan	Tanah Timbun	Abrasi	Prosjat	Pinjam Pakai	Tegakan Saporadis	Jmh Penggarap	Pertamina	PGN
			HL HP	Luas	Bisa Direboisasi	Tidak Bisa Direboisasi														
I	Muaragembong																			
	1. Pantai Bakti	2439.75	HL	1701.7	548.81	646.49	42	82	45.633	-	-	-	9.88	271.518	-	-	62.25	1432	2	-
	2. Pantai Bahagia		HP	738.05	82.5	507.424	3		37.236	40.103	33.91	0.375			-	-	280	315		-
	Jumlah I			2439.75	631.31	1153.914	45	82	82.869	40.103	33.91	0,375	9.88	271.518	-	-	342.25	1747	2	-
II	Singkil																			
	1. Pantai Sederhana	3318.5	HL	1165.55	447.331	565.474	43	6	6.782	-	-	-	-	86.883	-	4.3	4.5	-	-	-
	2. Pantai Mekar		HP	2152.95		2071.961			39.804	22.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah II			3318.5	447.331	2637.435	43	6	46.586	22.686	-	-	-	86.883	-	-	4.5	-	-	-
III	Pondok Tengah																			
	1. Pantai Harapan Jaya	4722.9	HL	2443.9	506.582	1185.2	156	84.95	12.098	196.51	205.2	72.4	516	-	-	-	-	-	17.21	3
			HP	2279	460	577.17	12	53.9	58.889	794.57	64.66	173.3	-	-	70		3.5		8	3
	Jumlah III			4722.9	966.582	1762.37	168	138.9	70.987	991.08	269.8	245.7	516	-	-	-	3.5	-	25.21	-
	Jumlah I,II dan III	10481.15	HL	5311.15	1502.72	2397.164	241	173	64.513	196.51	205.2	72.4	525.88	358.401	-	4.3	66.75	1432	19.21	3
			HP	5170	542.5	3156.555	15	53.9	135.929	857.36	98.57	173.7	-	-	70	0	283.5	315	8	3

Sumber: Data BKPH Ujung Karawang KPH Bogor Tahun 2012



Sumber : RTRW Kabupaten Bekasi tahun 2009 – 2029 dan Hasil Observasi Tahun 2013

Gambar 5.3
Peta Tata Guna Lahan Kecamatan Muaragembong

5.2.5 Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan

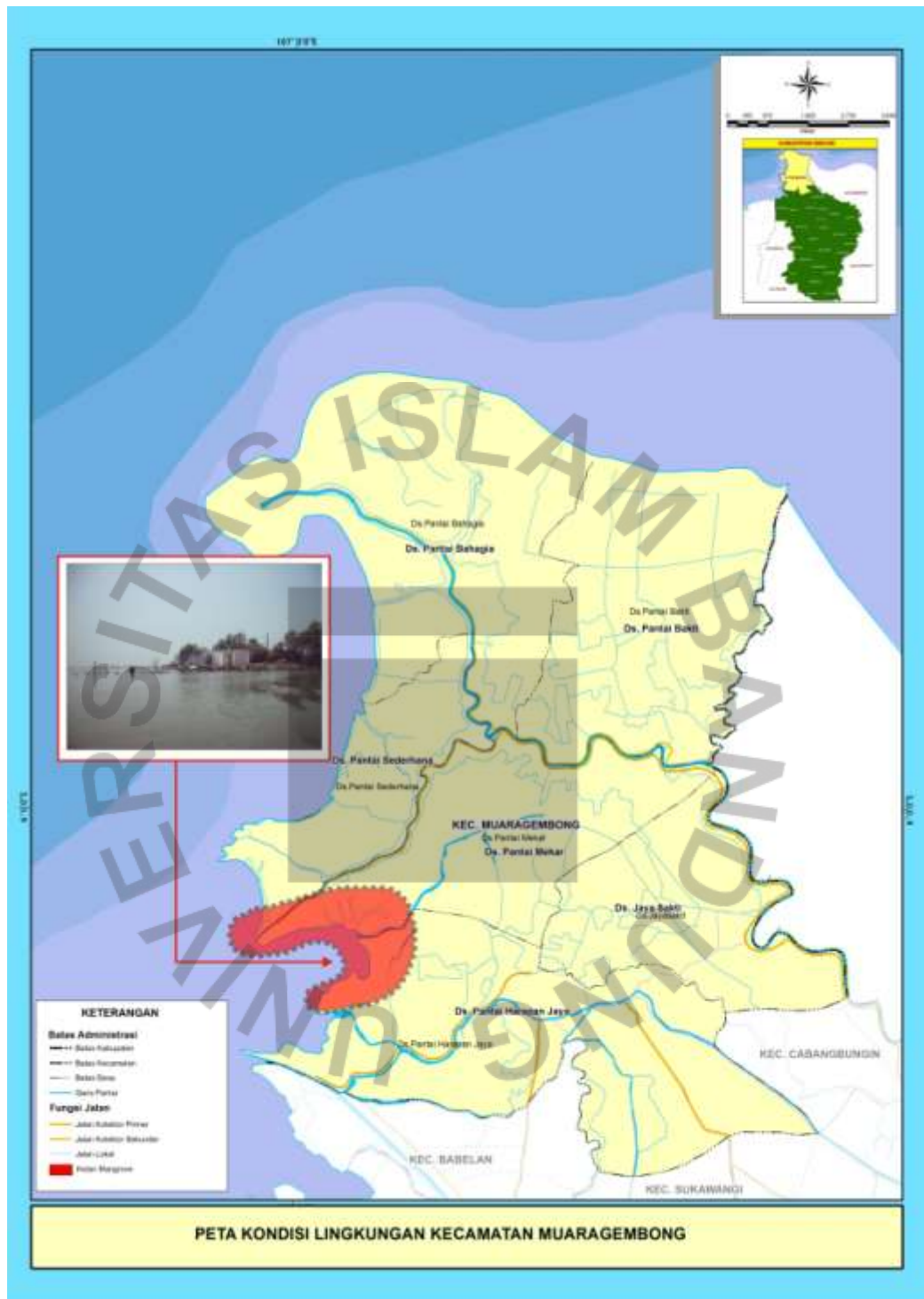
Sumberdaya alam yang terdapat di Kecamatan Muaragembong meliputi sumberdaya alam hayati dan nir hayati. Kecamatan Muaragembong merupakan wilayah pesisir, sehingga sumberdaya alam hayati yang terdapat di Kecamatan Muaragembong mencakup sumberdaya perikanan, ekosistem mangrove, sumberdaya hutan. Sedangkan sumberdaya nir hayati yang terdapat di wilayah ini mencakup sumberdaya minyak dan gas bumi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Eksplorasi dan eksploitasi sumur minyak dan gas bumi yang tersebar di Kecamatan Muaragembong sekitar 27,21 Ha, yang dikelola oleh PT Pertamina dan 6 Ha oleh PGN. (*Sumber data BKPH Ujungkarawang KPH Bogor Tahun 2012*).

Sumberdaya hayati dan sumberdaya alam nir hayati yang terdapat di Kecamatan Muaragembong ini dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah ini sebagai sumber mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi dari sumberdaya alam yang terdapat di wilayah ini pada saat ini pada umumnya adalah baik, dan ada beberapa sumberdaya nir hayati yang mempunyai kondisi yang kurang baik, yang perlu dilakukan penanganan agar dapat memberikan fungsi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Kondisi lingkungan di Kecamatan Muaragembong dipengaruhi oleh gelombang, pasang-surut dan sungai, sehingga wilayah ini mempunyai karakteristik lingkungan yang sangat dinamis. Oleh karena itu wilayah ini kondisi lingkungannya sangat rentan terhadap bencana, meliputi bencana banjir, abrasi dan akresi.



Berdasarkan pada kondisi ini, kondisi lingkungan Kecamatan Muaragembong pada saat ini sering mengalami banjir yang disebabkan oleh luapan sungai Citarum yang dipengaruhi oleh gelombang pasang naik dari laut Jawa dan intensitas hujan yang tinggi baik hujan di wilayah studi maupun hujan yang terdapat di bagian hulu sungai Citarum. Hal ini terjadi di wilayah yang berada di sekitar daerah aliran sungai. Di samping itu, kondisi lingkungan yang cukup menonjol juga di wilayah studi adalah abrasi yang terjadi



Sumber : RTRW Kabupaten bekasi, tahun 2009 – 2029 dan Hasil Survey 2013

Gambar 5.4
Peta Kondisi Lingkungan Kecamatan Muaragembong

di sekitar pesisir pantai wilayah yang langsung berbatasan dengan laut. Hal ini disebabkan karena gelombang dan arus laut dan berkurangnya fungsi dari ekosistem mangrove di kawasan ini karena terjadinya pengurangan ekosistem mangrove. Hal ini juga mengakibatkan berkurangnya ketersediaan sumberdaya perikanan, udang, dan kerang-kerangan di wilayah ini.

5.2.6 Kondisi Sosial dan Kependudukan

Sumberdaya manusia merupakan hal pokok yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Masalah sumberdaya manusia menyangkut aspek potensi kependudukan, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena penduduk merupakan subyek dan sekaligus menjadi obyek dalam perencanaan pembangunan wilayah. Pada bagian ini akan dibahas mengenai kondisi sosial dan kependudukan wilayah studi.

5.2.6.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Muaragembong meningkat setiap tahunnya, hal ini sejalan dengan perkembangan wilayahnya. Jumlah penduduk Kecamatan Muaragembong pada tahun 2010 adalah 35.503 jiwa, sedangkan pada tahun 2011 mempunyai jumlah penduduk sebesar 37.358 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 5,20% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di wilayah studi cukup tinggi yang disebabkan karena tingginya pertambahan penduduk yang berasal dari wilayah sekitarnya, karena wilayah merupakan wilayah terbuka dari laut, terutama penduduk sebagai nelayan. Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah penduduk di wilayah studi dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Muaragembong
Tahun 2010 – 2011

No	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)		LPP (%)
		2010	2011	
1	Pantai Bakti	6.113	6.723	0,100
2	Pantai Bahagia	6.737	7.261	0,078
3	Pantai Mekar	6.945	7.383	0,063
4	Pantai Sederhana	3.203	3.523	0,100
5	Pantai Harapanjaya	6.172	6.155	(0,003)
6	Jayasakti	6.333	6.313	(0,003)
Jumlah		35.503	37.358	0,052

Sumber: Kecamatan Muaragembong Dalam Angka, Tahun 2010 - 2011

5.2.6.2 Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat Kecamatan Muaragembong yang dibahas pada bagian ini adalah kualitas sumberdaya manusia, mata pencaharian masyarakat. Variabel yang dilihat untuk mengetahui kualitas sumberdaya manusia di wilayah studi adalah jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, sedangkan untuk mengetahui mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari jumlah penduduk mata pencaharian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan Muaragembong diketahui bahwa jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan didominasi oleh penduduk yang berpendidikan tamat SD dan SLTP, sedangkan penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan SLTA sangat sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas sumberdaya manusia di wilayah studi dikategorikan masih rendah.

Berdasarkan data yang diperoleh di Kecamatan Muaragembong, jumlah penduduk menurut mata pencaharian didominasi oleh penduduk yang bermatapencaharian sebagai petani tambak dan nelayan sebesar 6.978 jiwa (49,85%), sebagai petani adalah sebesar 2.233 jiwa (15,95%), sebagai pedagang adalah sebesar 1.480 jiwa (10,57%), sebagai buruh industri sebanyak 423 jiwa (3,02%), sebagai jasa angkutan sebanyak 349 jiwa (2,49%), sebagai PNS, TNI/POLRI dan pensiunan sebanyak 183 jiwa (1,31%), sebagai karyawan

sebanyak 1.498 jiwa (10,70%), dan sebagai wiraswasta sebanyak 854 jiwa (6,10%)

5.2.7 Kondisi Perekonomian Masyarakat

Kondisi perekonomian masyarakat di wilayah studi dipengaruhi oleh penggunaan lahan dan mata pencaharian penduduk. Dilihat dari kedua hal tersebut, kondisi perekonomian masyarakat sangat dipengaruhi oleh produksi sumberdaya perairan yang dalam hal ini adalah produksi perikanan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya atau tambak), pertanian tanaman pangan, hutan dan perkebunan untuk komoditi kelapa. Produksi dari perikanan budidaya di Muaragembong berupa ikan kolam air tawar dan tambak. Jumlah produksi dari kegiatan budidaya perikanan di wilayah studi dapat dilihat pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11
Produksi Budidaya Ikan di Kecamatan Muaragembong, Tahun 2011

No	Budidaya Ikan	Jenis Produksi	Produksi (ton)
I	Kolam	Lele	6
		Nila	2,66
		Bawal	0,13
		Gurame	-
Total			8,79
II	Tambak	Belanak	170,78
		Bandeng	5637,17
		Udang	1477,31
		Rumput Laut	11687,79
		Mujair	687,05
Total			
III	Kerang hijau		58,81

Sumber : Dinas Perternakan, Perikanan dan Kelautan 2011

Untuk kegiatan perikanan tangkap, dengan jumlah nelayan sebanyak 6.978 jiwa (49,85%), menggunakan alat tangkap ikan seperti jaring insang hanyut, jaring insang tetap, jaring kelitik, jaring payang, sero, bumbu, pancing dan jaring rampus. Jenis ikan yang dihasilkan oleh nelayan di muaragembong adalah ikan layung,

selarm kakap dan beberapa jenis ikan yang lainnya. Jarak penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan pada saat ini sudah lebih dari 1 mil, karena ketersediaan ikan di sekitar pantai sudah berkurang dan bahkan sudah tidak ada. Hal ini disebabkan karena kawasan penangkapan ini ketersediaan ekosistem mangrove sudah mulai berkurang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur kepada masyarakat di wilayah studi didapatkan hasil bahwa rata-rata pendapatan masyarakat dari setiap kegiatan ekonomi yang diusahakan adalah sebesar Rp. 1.250.000,- per bulan. Jika dibandingkan pendapatan masyarakat ini dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Bekasi yaitu sebesar Rp 2.447.445,- per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Kecamatan Muaragembong masih jauh di bawah UMR Kabupaten Bekasi.



Sumber : Googlemap, tahun 2012

Gambar 5.5
Foto Udara Daerah Budidaya Tambak

5.2.8 Kondisi Budaya Masyarakat

Kecamatan Muaragembong merupakan wilayah bagian dari Kabupaten Bekasi yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu budaya yang berkembang di masyarakat adalah budaya sunda. Masyarakat Muaragembong pada umumnya menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari masyarakat dengan menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan dalam bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya kegiatan kegotongroyongan masyarakat. Di Muaragembong tidak mempunyai budaya yang khas yang dijadikan sebagai kebiasaan ritual masyarakat.

5.3 Kondisi Ekosistem *Mangrove*



Kecamatan Muaragembong yang merupakan wilayah pesisir yang terdapat di bagian Utara Kabupaten Bekasi, mempunyai ekosistem mangrove yang difungsikan sebagai hutan lindung sebagaimana dijelaskan dalam rencana pola ruang RTRW Kabupaten Bekasi. Hal ini sangat mendukung fungsi ekologis ekosistem mangrove, yaitu sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung pantai dari abrasi, pengendali banjir, penahan lumpur dan perangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan, tempat hidup biota laut untuk berlindung, mencari makan, pemijahan maupun pengasuhan, sebagai sumber makanan bagi spesies-spesies yang ada, penambat zat beracun, penyerap karbon. Selain mempunyai fungsi ekologis, ekosistem mangrove juga mempunyai fungsi secara ekonomi, yaitu ekosistem mangrove dapat dimanfaatkan untuk penghasil bahan obat-obatan, sebagai penghasil bahan pangan seperti ikan, udang, kerang kepiting, serta sebagai tempat rekreasi dan wisata (Bengen, 2004 dalam Asyiawati 2014).

Sejarah dari kawasan hutan lindung Muaragembong diawali dari partikelir yang kemudian berubah status menjadi tanah negara bebas pada tahun 1949, yang kemudian oleh Bupati Bekasi diserahkan tanah seluas 9.311 ha tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan Jakarta Raya. Menteri Pertanian kemudian menetapkan lahan eks-partikelir yang mempunyai luas 9.311 ha yang terdapat di Cabangbungin, Pondok Tengah, Babadan, Pangkalan dan Terusan tetap sebagai

hutan. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1957 disahkan luas hutannya sebesar 10.481, 10 ha, karena terdapatnya tanah timbul. Oleh karena perkembangan penduduk yang begitu cepat pada kawasan ini, Meteri Kehutanan atas usulan Bupati Bekasi mengeluarkan SK Menhut Nomor 475/Menhut-II/2005 tanggal 16 Desember 2005 untuk mengubah fungsi kawasan dari hutan lindung menjadi hutan produksi tetap seluas 5.170 ha. Pada awal tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kepada Departemen Kehutanan yang berisikan untuk melakukan tukar menukar kawasan hutan dan perubahan status kawasan hutan produksi tetap menjadi areal budidaya, yang dikembangkan untuk pengembangan perumahan, pelabuhan, pergudangan, industri dan penggunaan lainnya, sehingga penggunaan lahan di Muaragembong menjadi *mixed used*.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Oktama Forestian (2011) tentang Estimasi Biomassa dan kerapatan Vegetasi Mangrove menggunakan Landsat ETM+ studi di hutan Lindung dan Hutan Produksi tetap Muaragembong Kabupaten Bekasi, menjelaskan bahwa jenis ekosistem mangrove yang terdapat di Kecamatan Muaragembong terdiri dari 23 jenis yang didominasi oleh Api-api (*Avicenniaspp.*), Bakau (*Rhizophora spp.*), Pedada (*Sonneratia caseolaris*). Sedangkan hutan mangrove ikutan terdiri dari 13 jenis yang didominasi oleh Bintan (*Cerbera odollam*), Kiser (*Fimbristylis verruginea*) dan Ketapang (*Terminalia catappa*). Adapun jenis tumbuhan di muara air tawar terdiri dari 11 jenis yang didominasi oleh Kiser (*Fimbristylis verruginea*) dan Nipah (*Nypha fruticans*).

Berdasarkan data sekunder, jenis burung yang ditemukan di Kawasan Hutan Lindung Ujung Krawang (Muaragembong) sebanyak 158 jenis. Dari sejumlah jenis tersebut, 7 jenis merupakan kelompok endemik dan 6 jenis dilindungi berdasarkan kriteria IUCN. Jenis Raja-udang biru *Alcedo coerulecens* dan Layang-layang batu *Hirundo tahitica* ditemukan cukup banyak di sepanjang Sungai Citarum dan Sungai Bungin. Di pantai bagian utara, terdapat beberapa jenis burung air diantaranya Kuntul Perak (*Egretta intermedia*), Kuntul Kecil (*Egretta garzetta*), dan Cangak Abu (*Ardea cinerea*). Burung-burung laut seperti

Cikalang Christmas (*Fregata andrewsi*) dan Dara-laut (Dara-laut jambul dan Dara-laut kecil) yang merupakan jenis burung migran, ditemukan di sekitar pantai. Sedangkan jenis burung Pecuk-padi hitam ditemukan di bagan-bagan di tengah laut. Terdapat 15 jenis mamalia yang didominasi oleh Kera Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*) dan Surili (*Presbitis cristata*). Untuk jenis reptilia terdapat 6 jenis dan 3 jenis diantaranya masuk ke dalam Appendix CITES, antara lain Kura-kura Hutan dan Biawak (*Varanus salvator*). Jenis ikan yang banyak ditemukan di kawasan mangrove adalah Ikan blodok (*Periophtalmus* sp.) (Timdu, 2005).

5.3.1 Identifikasi Luas dan Kerapatan Ekosistem Mangrove

Kondisi ekosistem mangrove di kecamatan Muaragembong berdasarkan hasil observasi dan hasil studi yang dilakukan oleh Oktama Frostian tahun 2011 diperoleh hasil bahwa sudah terjadi penurunan kerapatan mangrove dari 55,78% pada tahun 2001 turun menjadi 8,43% pada tahun 2010. Sedangkan kondisi eksisting kerapatan pohon mangrove untuk masing-masing desa berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.12
Kerapatan Pohon Mangrove di Muaragembong

No	Lokasi Pengamatan	Kerapatan Pohon (pohon/ha)
1	Pantai Harapan Jaya	1450
2	Pantai Bahagia	187
3	Pantai Sederhana	617
4	Pantai Mekar	675
5	Pantai Jayasakti	1251
6	Pantai Bakti	59

Sumber : Hasil Observasi dan Hasil Analisis, 2014

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa status ekosistem mangrove di kawasan pesisir Muaragembong didominasi dengan status jarang dengan kerapatan pohon berkisar antara 59 – 1450 pohon/ha. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan, dimana kawasan ini telah menjadi lahan tambak masyarakat.

5.3.2 Identifikasi Nilai Manfaat Ekosistem Mangrove

Identifikasi nilai manfaat ekosistem mangrove, dapat dilihat dengan menggunakan berbagai pendekatan. Identifikasi nilai manfaat ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong yang sudah dilakukan diantaranya menggunakan pendekatan biaya perjalanan dan metode CVM (*Contingent Valuation Method*). Berdasarkan kegiatan yang pernah dilakukan (Akliyah & Hindersah, 2014) penilaian valuasi ekonomi ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi dengan metode biaya perjalanan (*Travel Cost*) dilakukan dengan melakukan wawancara kepada wisatawan yang melakukan kegiatan *ecotourism* dengan menghitung biaya-biaya perjalanan yang dikeluarkan. Biaya-biaya perjalanan yang dikeluarkan ini hampir sama dengan kajian yang lain salahsatunya yang dilakukan oleh Akliyah & Sundari (2006), diantaranya:

- Biaya perjalanan dari rumah ke tempat wisata (Kecamatan Muaragembong)
- Biaya penginapan
- Biaya transportasi local (sewa kapal)
- Biaya konsumsi
- Biaya cinderamata (hasil olahan pohon mangrove dan ikan hasil tangkap)
- Biaya dokumentasi
- Biaya-biaya lainnya selama perjalanan wisata.

Penilaian ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa wisatawan yang datang dengan menanyakan biaya-biaya di atas, kemudian dirata-ratakan. Hasil rata-rata biaya yang dikeluarkan berdasarkan wawancara tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah wisatawan yang datang per tahun. Nilai itulah yang merupakan nilai valuasi ekonomi ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong berdasarkan metode biaya perjalanan (*Travel Cost Method*).

Adapun penilaian menggunakan metode CVM menurut Akliyah & Hindersah (2014), dapat dilakukan dengan menanyakan seberapa besar kemampuan nelayan/masyarakat membayar untuk memanfaatkan ekosistem mangrove yang ada di wilayah tersebut. Adapun variabel-variabel yang dinilai diantaranya:

1. Ketersediaan membayar ekosistem mangrove sebagai tempat pemijahan ikan di perairan, pelindung daratan dari abrasi oleh ombak, pelindung daratan dari tiupan angin, penyaring intrusi air laut ke daratan dan kandungan logam berat yang berbahaya bagi kehidupan
2. Ketersediaan membayar dari fungsi mangrove sebagai tempat pemijahan dan penangkapan ikan.
3. Ketersediaan membayar untuk manfaat ekosistem sebagai penahan abrasi (penyeimbang lingkungan).
4. Ketersediaan membayar dari adanya pohon mangrove yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi berbagai aneka olahan seperti sirup, keripik, dodol, makanan ringan (onde-onde kering).
5. Ketersediaan membayar manfaat pohon mangrove sebagai arang dan kayu bakar.
6. Ketersediaan membayar manfaat pohon mangrove sebagai salahsatu bahan untuk membuat kok yang digunakan olahraga badminton.
7. Ketersediaan membayar manfaat ekosistem mangrove yang berfungsi ekologis sebagai habitat satwa liar (lutung).
8. Ketersediaan membayar manfaat ekosistem mangrove sebagai penyedia bahan bangunan (kayu).



Gambar 5.7

Gambar Kiri adalah buah mangrove vidada yang memiliki berbagai manfaat untuk diolah sebagai sirup, dodol, makanan kering. Gambar kanan adalah gambar batang mangrove yang bisa dimanfaatkan untuk salahsatu bahan membuat kok badminton.

Sumber: Hasil Observasi, 2014

Variabel-variabel di atas dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan biaya awal yang ditawarkan bagi responden (masyarakat/nelayan) untuk kesediaannya membayar dari ekosistem mangrove yang dimanfaatkan oleh mereka. Tidak berbeda jauh dengan WTP, pada prinsipnya pendekatan WTA (*Willingness to Accept*), tetapi respondennya adalah masyarakat yang menyediakan atau menghasilkan jasa lingkungan dari ekosistem mangrove tersebut. Salahsatunya, untuk mengetahui seberapa besar masyarakat mau dibayar agar tetap bersedia mengelola dan mempertahankan ekosistem mangrove yang dimanfaatkan.

5.4 Status Ekosistem *Mangrove*

Dalam melakukan analisis status ekosistem mangrove dilakukan dengan cara membandingkan kerapatan pohon mangrove di wilayah studi dengan kriteria baku mutu kerusakan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Kriteria untuk menentukan status ekosistem *mangrove* mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan *Mangrove*, yang didasarkan pada kriteria baku kerusakan *mangrove*, dimana kriteria baku kerusakan *mangrove* adalah ukuran batas perubahan fisik dan atau hayati *mangrove* yang dapat ditenggang. Kriteria baku kerusakan *mangrove* menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 dapat dilihat pada **Tabel 5.13**

Tabel 5.13 Kriteria Baku Kerusakan *Mangrove*

Kriteria	Kondisi	Kerapatan (pohon/ha)
Baik	Sangat Padat	≥ 1500
	Sedang	$\geq 1000 - \leq 1500$
Buruk	Jarang	≤ 100

Sumber : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004.

Berdasarkan kriteria baku kerusakan ekosistem *mangrove* yang ditetapkan oleh Keputusan menteri negara Lingkungan Hidup, dapat diketahui kriteria

kerusakan ekosistem mangrove, yang menggambarkan kondisi ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong. Untuk menentukan status ekosistem mangrove, dilihat dari kerapatan pohon ekosistem mangrove, yang kemudian diberikan skor terhadap status ekosistem tersebut, dimana yang mempunyai status sangat padat diberi skor 3, status sedang dengan skor 2 dan status jarang diberi skor 1. Untuk masing-masing ekosistem ditentukan bobot kepentingannya dalam lingkungan kawasan. Dari perhitungan skoring dari kondisi ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong dapat ditentukan status ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong dengan menentukan indeks kriteria ekosistem mangrove dengan menggunakan formula sebagai berikut : (Asyiwati, 2010)

$$IEM = \sum \left(\frac{N_{(SxB)}}{N_{max(SxB)}} \right) \times 100 \quad (1)$$

dimana :

IEM = indeks ekosistem pesisir

$N_{(SxB)}$ = nilai ekosistem mangrove (skor x bobot)

$N_{max(SxB)}$ = nilai maximum ekosistem mangrove

Tabel 5.14
Kriteria Penentuan Status Ekosistem Mangrove
di Kecamatan Muaragembong

Ekosistem Pesisir	Kondisi	Bobot (B)	Status	Skor (S)
<i>Mangrove</i>	Sangat padat	1	Sangat Baik	3
	Sedang	1	Baik	2
	Jarang	1	Agak Baik	1

Kriteria penilaian adalah :

$IEM > 55$ = Baik
 $IEM 45 - 55$ = Sedang
 $IEM < 45$ = Rusak

Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa kerapatan mangrove di Muaragembong berkisar antara 59 – 1450 pohon/ha, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.15. Hal ini apabila dibandingkan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Forestian (2011 dalam Asyiawati, 2010) diperoleh hasil bahwa sudah terjadi penurunan kerapatan mangrove dari 55,78% pada tahun 2001 turun menjadi 8,43% pada tahun 2014.

Tabel 5.15
Kerapatan Pohon Mangrove di Muaragembong

No	Lokasi Pengamatan	Kerapatan Pohon (pohon/ha)	Status
1	Pantai Harapan Jaya	1450	sedang
2	Pantai Bahagia	187	jarang
3	Pantai Sederhana	617	jarang
4	Pantai Mekar	675	jarang
5	Pantai Jayasakti	1251	Sedang
6	Pantai Bakti	59	jarang

Sumber : Hasil Observasi dan Hasil Analisis, 2014

Dengan mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan *Mangrove*, dapat disimpulkan bahwa status ekosistem mangrove di Muaragembong termasuk pada kriteria buruk dan baik dengan kondisi jarang sampai sedang, berkisar antara jarang sampai dengan sedang. Dari hasil status ekosistem mangrove tersebut, dilanjutkan melakukan klasifikasi dari ekosistem mangrove di Muaragembong dengan menggunakan acuan persamaan (1) dan Tabel 5.14. dari kriteria tersebut diperoleh hasil bahwa indeks ekosistem mangrove di Muaragembong adalah 22,22%. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem mangrove di Muaragembong termasuk pada kategori rusak. Hal ini perlu dilakukan penanganan khusus untuk memperbaiki kondisi ekosistem mangrove di Muaragembong, agar kerusakan lingkungan yang terjadi di Muaragembong saat ini dapat diminimalkan, sehingga fungsi ekologis dari mangrove dapat diwujudkan kembali, sehingga dapat mewujudkan keseimbangan lingkungan dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Kegiatan yang sudah dilakukan sampai saat ini, jika dilihat dari tahapan penelitian yang disajikan di bab metodologi baru dilakukan tahap 1 berupa identifikasi dan pengumpulan data secara primer dan sekunder. Sementara kegiatan analisisnya belum dilakukan, sehingga rencana tahapan berikutnya (tahap ke-2) adalah menyusun berbagai analisis terkait dengan studi pada tahap 1 ini, diantaranya:

1. Kajian Status Ekosistem Mangrove untuk setiap kawasan di Kecamatan Muaragembong Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004

Kajian ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari identifikasi kriteria/jenis, dan kerapatan mangrove yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pada tahap berikutnya melakukan analisis status ekosistem mangrove per desa.

2. Analisis Tingkat Kualitas Ekosistem Mangrove

Analisis ini dilakukan berdasarkan hasil identifikasi kondisi fisik ekosistem mangrove yang ada di Kecamatan Muaragembong. Sehingga pada tahap selanjutnya menjadi masukan untuk menyusun kebijakan atau strategi yang tepat dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang ada di wilayah tersebut.

3. Analisis Tingkat Ekonomi Masyarakat

Analisis tingkat ekonomi masyarakat dilakukan berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan di lapangan pada tahap sebelumnya. Variable analisis yang dilihat diambil berdasarkan kajian sebelumnya mengenai nilai manfaat yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perda Kabupaten Bekasi Nomor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi menjelaskan sebagai berikut :
 1. Kecamatan Muaragembong diarahkan sebagai Wilayah pengembangan (WP) IV dengan pusat WP adaah Desa Pantai Mekar, yang berfungsi untuk pengembangan kegiatan pertanian lahan basah, perumahan dan permukiman, pelabuhan, industry dan pariwisata
 2. Rencana sistem pelayanan kota, Kecamatan Muaragembong direncanakan untuk kota hirarki III, yang diarahkan fungsinya sebagai pusat koleksi dan distribusi dengan pelayanan interregional dan local
 3. Rencana pola ruang Kecamatan Muaragembong diarahkan untuk pengembangan kawasan pertanian, permukiman dan pariwisata.
2. Berdasarkan Perda Nomor 5/2003 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi 2003-2013 dijelaskan bahwa :
 1. Pusat Utama Kawasan diarahkan di Kota Pantai Makmur dengan fungsi sebagai pusat pengembangan dan pelayanan bagi Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Muaragembong
 2. Rencana struktur pemanfaatan ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi diarahkan menjadi 5 (lima) kawasan pengembangan (KP), yaitu :
 - KP I : Kawasan Pengembangan Tarumajaya Selatan dan Babelan Selatan, dengan pusat yang diarahkan adalah Desa Babelan Kota
 - KP II : Kawasan Pengembangan Tarumajaya Utara, dengan pusat diarahkan di Desa Pantai Makmur
 - KP III : Kawasan Pengembangan Babelan Utara, dengan pusat diarahkan di Muara Bakti

- KP IV : Kawasan Pengembangan Muaragembong Selatan, dengan pusat diarahkan di Desa Pantai Bahagia
 - KP V : Kawasan Pengembangan Muaragembong Utara, dengan pusat diarahkan di Desa Pantai Mekar
4. Ekosistem yang dipunyai wilayah studi adalah ekosistem estuaria dan ekosistem mangrove
 5. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Wilayah Pesisir Muaragembong mencakup abrasi dan sedimentasi estuaria (muara sungai)
 6. Pada umumnya masyarakat Muaragembong mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dan petambak/petani
 7. Kegiatan perekonomian masyarakat didominasi oleh kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan
 8. Ekosistem mangrove yang terdapat di Muaragembong didominasi oleh jenis Api-api (*Avicennia* spp.), Bakau (*Rhizophora* spp.), Pedada (*Sonneratia caseolaris*), dengan kerapatan pohon berkisar antara 59 – 1450 pohon/ha.
 9. Status ekosistem mangrove Muaragembong dikategorikan rusak dengan nilai indeks ekosistem mangrove sebesar 22,22%.
 10. Ekosistem mangrove dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 11. Pemanfaatan ekosistem mangrove oleh masyarakat digunakan untuk bahan bangunan, kayu bakar, pembukaan lahan untuk tambak, pembuatan alat pancing dan peralatan olah raga.

DAFTAR PUSTAKA

- Akliyah, Lely S. & Sundari, Eva S. 2006. Penilaian Valuasi Ekonomi Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Juanda Kota Bandung Dengan Metode Biaya Perjalanan. Laporan Penelitian. LPPM Unisba.
- Akliyah, Lely S. & Hindersah, Hilwati. 2014. *Konsep Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi dengan Metode Biaya Perjalanan dan Metode CVM*. Seminar Nasional Menciptakan Nilai Tambah dalam Pembangunan Berkelanjutan Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung, 22 Mei 2014. Bandung, Indonesia.
- Anonim. 2009. *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2020*. Bappeda Provinsi Jawa Barat.
- _____. 2009. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2009 – 2029*. Bappeda Kabupaten Bekasi.
- _____. 2013. *Rencana Detil Tata Ruang Kecamatan Muaragembong tahun 2013 - 2033*. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi.
- _____. 2011. *Laporan Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan*. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan: Kabupaten Bekasi.
- Anwar, Chairil & Gunawan, Hendra. 2007. Peranan Ekologis dan Sosial Ekonomis Hutan Mangrove dalam Mendukung Pembangunan Wilayah Pesisir. *Prosiding Ekspose Hasil-hasil Penelitian : Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan*. Padang.
- Asyiwati, Yulia. 2010. Analisis Status Ekosistem Pesisir Bagi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir di Kawasan Teluk Kota Ambon. Disertasi, Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor, Indonesia.
- Bengen, D.G. 2000. *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan – Institut Pertanian Bogor. Bogor, Indonesia.
- Fauzi, Akhmad. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Forestian. O. 2011. *Estimasi Biomassa dan Kerapatan Vegetasi Mangrove Menggunakan Data Landsat ETM+ (studi di Hutan Lindung dan Hutan produksi tetap Muaragembong, kabupaten Bekasi Provinsi Jawa barat) : Skripsi*. Institut Pertanian Bogor.
- Hiariey, Lilian Sarah. 2009. Identifikasi Nilai Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove di Desa Tawiri Ambon. *Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5, Nomor 1. Maret 2009, 23-24*. Universitas Terbuka.

- Hindersah, Hilwati. 2007. Spiritual Dimension in the Sustainable Existence of Natural Open Space in the Urban Environment : The Case of Natural Open Space in The SARBAGITA (Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan) Metropolitan Area, Bali Province, Indonesia, dipresentasikan dalam *The 7th International Conference on Urban Planning and Environment (UPE7) "World Class Cities. Environmental Impacts and Planning Opportunities?"* 3-5 January 2007, Bangkok, Thailand.
- Hindersah, Hilwati & Kusuma, A.A.N. Wila. 2010. Kesadaran Kolektif Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Kawasan Lindung di Kawasan Perkotaan (Kasus: Fenomena Penanaman Mangrove di Kawasan Perkotaan – Teluk Benoa Provinsi Bali). *Prosiding Konferensi Nasional Smart Green City Planning 2010*, Sanur, Bali, 8 November 2010.
- Hindersah, Hilwati. 2012. Local Wisdom in Urban Protected Areas: Case of Collective Consciousness in Caring for Mangrove Forest in Denpasar Metropolitan Area, Bali Province, Indonesia. Dipresentasikan dan dipublikasikan dalam *Proceedings The 2nd International Conference on Sustainable Technology Development-Developing Sustainable Technology for a Better Future*, 31 Oktober 2012.
- IUCN - The World Conservation Union. 1993. *Oil and Gas Exploration and Production in Mangrove Areas*. IUCN. Gland, Switzerland.
- Patunru, Arianto A. 2004. Valuasi Ekonomi: Metode Kontinjen. *Program Pelatihan Analisis Biaya-Manfaat*. LPEM-FEUI.
- Rangkuti, Freddy. 2000. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Santoso, N. 2000. *Pola Pengawasan Ekosistem Mangrove*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Pengembangan Sistem Pengawasan Ekosistem Laut Tahun 2000. Jakarta, Indonesia.

Lampiran 1 Panduan Wawancara

Panduan Wawancara untuk Nelayan/Masyarakat Kecamatan Muaragembong

1. Apasaja jenis mangrove yang ada disini?
2. Dimana saja sebaran lokasi mangrove di Kecamatan Muaragembong?
3. Siapasaja yang memanfaatkan ekosistem mangrove yang ada disini?
4. Dimana saja lokasi penanaman mangrove yang dikembangkan disini?
5. Siapa yang terlibat dalam kegiatan penanaman mangrove itu?
6. Apasaja manfaat mangrove yang dirasakan oleh masyarakat disini?
7. Berapa nilai tambah yang didapat dari hasil pemanfaatan mangrove di Kecamatan Muaragembong ini?
8. Apasaja permasalahan yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar ekosistem mangrove ?
9. Hal-hal apasaja yang sudah dilakukan dalam mempertahankan ekosistem mangrove di wilayah ini?
10. Adakah keterlibatan dari stakeholder lain dalam membantu memanfaatkan ekosistem mangrove tersebut?
11. Selain dari memanfaatkan mangrove, manfaat apalagi yang dapat diambil dari ekosistem yang ada di kawasan ini?
12. Adakah kendala dalam mengelola ekosistem mangrove ini?
13. Berapa rata-rata kerapatan pohon mangrove disini (pohon/meter)?
14. Sudah adakah pasar untuk mendistribusikan hasil dari pengolahan dari mangrove yang dimanfaatkan?
15. Adakah kelompok-kelompok yang perhatian dengan keberlanjutan ekosistem ini? Jika ya, sebutkan!

Lampiran 2 Biodata Peneliti

Biodata Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Hilwati Hindersah, Ir., MURP
2	Jenis Kelamin	L(P)
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19580516 198710 2001
5	NIDN	0016055801
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Yogyakarta, 16 Mei 1958
7	E-mail	hilwati_hindersah@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	08122348850
9	Alamat Kantor	Jl. Taman Sari No.1 Bandung
10	Nomor Telepon/Faks	(022) 4203368 ext. 204
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 97 orang
12	Mata Kuliah yg Diampu	1. Metode Analisis Perencanaan
		2. Manajemen Lingkungan
		3. Praktek Perencanaan Lingkungan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Institut Teknologi Bandung	University of Colorado, Denver, USA	Institut Teknologi Bandung
Bidang Ilmu	Teknik Planologi	Urban and Regional Planning	Perencanaan Wilayah dan Kota
Tahun Masuk-Lulus	1977 - 1985	1992 - 1993	2003 - 2008
JudulSkripsi/Tesis/Disertasi	Konsep Pengembangan Tata Ruang Wilayah Integrasi Kota Tanjungsari dan Kawasan Jatinangor	-	Eksplorasi Aspek Spiritualitas Dalam Membangun Konsensus: Pemaknaan Partisipatif Kawasan Lindung Perkotaan Di Teluk Benoa Kota Denpasar dan Kabupaten Badung Provinsi Bali
Nama Pembimbing/Promotor	Ir. Djoko Sujarto, M.Sc	-	Dr.Ir. B.Kombaitan,M.Sc.; Drs. Arief Rosyidie, MSP, M.Arch.,Ph.D; Ir. Roos Akbar, M.Sc., Ph.D

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2009	Identifikasi Fenomena Upaya Pemeliharaan Hutan Mangrove di Kawasan Perkotaan – Teluk Benoa Provinsi Bali	Mandiri	5
2	2010	Studi Model Pengembangan Ekowisata Mangrove di Desa Sederhana, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi	Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bekasi	7
3	2011	Studi Model Pengembangan Kota Tepian Air (Water Front City) di Hilir Sungai Citarum Kabupaten Bekasi	Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bekasi	10
4	2012	Studi Model Pengembangan Kawasan Industri Minyak dan Gas yang berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Kawasan Pantai Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu)	Dinas Permukiman dan Perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	10

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2008	Evaluasi Raperda Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung	DPRD Kota Bandung Pansus VIII	1
2	2008	Workshop Manual Penyelenggaraan Penataan Ruang	Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia dan Kementrian Pekerjaan Umum	1
3	2009	Evaluasi Rencana Tata Ruang Banten Water Front City Kota Serang	Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Banten	1
4	2011	Bantuan Konsultasi tentang Materi Pendekatan dan Metodologi dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan	Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi	2

		Pesisir		
5	2012	Sosialisasi dan Implementasi Cikapundung Hijau	Universitas Islam Bandung, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandung	5

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1			
2			

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	The 9 th International Conference on Urban Planning and Environment (UPE9) “Sustainable Planning Challenges: Rapid Urbanization, Global Recession and Climate Change”	Spiritual Society Power in Urban Natural Conservation: Participative Action Case in the Denpasar Metropolitan Area, Bali Province, Indonesia	3 – 6 Agustus 2010, Guang Zhou, China
2	First International Conference on Islamic Built environment “Towards An Understanding of The Islamic Built Environment”	Islamic Values embodied within Local Wisdom: The Significance of Protected Area Case of Kampong Ciptagelar, West Java province, Indonesia	28 Maret 2012, Bandung
3	The 2nd International Conference on Sustainable Technology Development	Local Wisdom in Urban Protected Areas: Case of Collective Consciousness in	31 Oktober 2012, Denpasar, Bali

		Caring for Mangrove Forest in Denpasar Metropolitan Area, Bali Province, Indonesia	
--	--	--	--

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	-			

H. Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-			

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1	Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan Pesisir	2010	Pantai Utara Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi	Menerima karena keadaan menjadi lebih baik
2	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	2012	Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu	Menerima karena konsisten dengan pengembangan kabupaten

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-----	-------	-------------------------------	-------

	Penghargaan		
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Bersaing

Bandung, 5 November 2014
Pengusul,



Dr. Hilwati Hindersah, Ir., MURP.

Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Yulia Asyiawati, Ir., MSi.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	D.97.0.283
5	NIDN	0419077001
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 19 Juli 1970
7	Alamat e-mail	yulia_asyiawati@yahoo.com
8	Nomor Telepon/ HP	+628122459853
9	Alamat Kantor	Jl. Taman Sari No.1 Bandung
10	Nomor Telepon/Faks	(022) 4203368 ext. 204
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 15 orang; S-2= 0 orang; S-3= 0 orang
12	Mata Kuliah yg Diampu	1. Pengetahuan Lingkungan
		2. Geologi & Tata Lingkungan
		3. Praktek Perencanaan
		4. Studio Proses Perencanaan
		5. Studio Analitik
		6. Studio Rencana
		7. Ekonomi Sumber Daya & Lingkungan
		8. Analisis Sumberdaya & Lingkungan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Bandung	Institut Pertanian Bogor	Institut Pertanian Bogor
Bidang Ilmu	Teknik Planologi	Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut	Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut
Tahun Masuk-Lulus	1989-1994	2000-2003	2004 - 2010
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Evaluasi Dampak pengembangan Kegiatan di Kota Soreang Terhadap Sumberdaya Lahan Sejalan	Pendekatan Sistem Dinamik Dalam Penataan Ruang Wilayah Pesisir (Studi Kasus : Wilayah Pesisir	Analisis Status Ekosistem Pesisir Bagi Penyusunan Rencana

	Dengan Perannya Sebagai Ibukota Kabupaten Bandung	Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	Tata Ruang Wilayah Pesisir di Kawasan Teluk Kota Ambon
Nama Pembimbing/Promotor	Aim Abdurachim Idris, Ir., M.Sc.	Dr. Ir. Joko Purwanto, DEA Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr. Dr. Ir. Hartrisari Hardjomidjojo, DEA	Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS Prof. Dr. Ir. Santun R.P Sitorus Prof. Dr. Ir. Setyo Budi Susilo, M.Sc

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2010	Kajian Kualitas Lingkungan Kota Bandung	Bappeda Kota Bandung	25
2	2011	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Pelayanan (WP) D Kota Bogor	Dinas Pengawasan Bangunan dan permukiman Kota Bogor	20
3	2012	Identifikasi Pusat Pertumbuhan di Kawasan Perbatasan Laut	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	20

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2010	Penyusunan Kajian Akademis	Kementerian	25

		Rencana Tata Ruang Kelautan Nasional	Kelautan dan Perikanan	
2	2011	Penyusunan Rancangan Peraturan dan Sosialisasi Rencana Detail Tata Ruang di Wilayah WP II (Zona Selatan) Kabupaten Bekasi	Dinas Tata Ruang dan permukiman Kabupaten Bekasi	30
3	2012	Penyusunan Rancangan Peraturan dan Sosialisasi Rencana Detail Tata Ruang di Wilayah WP III (Zona Timur) Kabupaten Bekasi	Dinas Tata Ruang dan permukiman Kabupaten Bekasi	30
4	2012	Sosialisasi dan Implementasi Cikapundung Hijau	Universitas Islam Bandung, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandung	5

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Kajian kelembagaan PUSPIPEK	Edisi No. 12. Volume - 8/ No. 2/ Agustus 2008 : ISSN : 1412 - 0690)	Perencanaan Wilayah dan Kota

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Seminar Nasional Tahunan III Hasil penelitian Perikanan dan Kelautan	Kontribusi Ekonomi Desa-Desa Pesisir Terhadap Pendapatan	Yogyakarta, 27 Juli 2006

		Wilayah Kabupaten Bantul	
--	--	--------------------------------	--

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	-			

H. Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-			

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1				

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	-	-	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Bersaing.

Bandung, 5 November 2014
Pengusul,



Dr. Yulia Asyiawati, ST., MSi.

Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Lely Syiddatul Akliyah, ST., MSi.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	D.04.0.394
5	NIDN	0429078003
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 29 Juli 1980
7	Alamat e-mail	ulil_sa@yahoo.com
8	Nomor Telepon/ HP	082130537952
9	Alamat Kantor	Jl. Taman Sari No.1 Bandung
10	Nomor Telepon/Faks	(022) 4203368 ext. 204
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 3 orang; S-2= 0 orang; S-3= 0 orang
12	Mata Kuliah yg Diampu	1. Metode Analisis Perencanaan
		2. Geografi dan Kependudukan
		3. Studio Proses Perencanaan
		4. Studio Analitik
		5. Studio Rencana
		6. Ekonomi Wilayah & Kota
		7. Teori dan Teknik Partisipasi

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Bandung	Institut Pertanian Bogor	-
Bidang Ilmu	Teknik Perencanaan Wilayah & Kota	Ilmu Perencanaan Wilayah	-
Tahun Masuk-Lulus	1998-2003	2006-2008	-
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Pengujian Model Bangkitan Pergerakan di Perumahan Metro & Margahayu Rata Kota Bandung	Kajian Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Tasikmalaya Secara Partisipatif	-
Nama Pembimbing/Promotor	Ina Helena Agustina, Ir., MT.	Fredian Tonny, Ir., MS. Dr. Baba Barus, Ir., MSc.	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan
-----	-------	------------------	-----------

			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2009	Penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan Salor Kabupaten Merauke	Depnakertrans	80
2	2010	Identifikasi Kondisi Fisik, Sosial & Ekonomi Masyarakat Sekitar Sungai Cikapundung (Ruas Dago-Ciumbuleuit) dengan Metode Transek dan RRA	Mandiri	10
3	2011	Identifikasi Kondisi Fisik, Sosial & Ekonomi Masyarakat Sekitar Sungai Cikapundung (Ruas Ciumbuleuit - Tamansari) dengan Metode Transek dan RRA	Mandiri	10
4	2012	Pemetaan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bekasi	Dinas Sosial Kabupaten Bekasi	10
5	2012	Pedoman dan Teknis Infrastruktur Pemukiman di Kawasan Perdesaan Potensial	Kementrian Pekerjaan Umum	200

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2010	Peranan Perempuan dalam Pembangunan Daerah	Mandiri	2
2	2011	Penggunaan Plastik dalam Rumah Tangga	Mandiri	2
3	2012	Peranan Perempuan dalam Mengurangi Masalah kesejahteraan Sosial di Lingkungan Sekitar	Mandiri	2
4	2012	Sosialisasi dan Implementasi Cikapundung Hijau	Universitas Islam Bandung, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandung	5

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Penanggulangan Kemiskinan (<i>Poverty Allivation</i>) Masyarakat Perdesaan	Volume-7/No. 2/Agustus 2007	Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah & Kota
2	Karakteristik Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Tasikmalaya	Tahun 2009- 2010 ISBN: 978-602- 98786-0-8	Proceeding Seminar Internasional

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	-			

H. Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-			

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1				

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Wisudawan Terbaik	Prodi Ilmu Perencanaan Wilayah, IPB	2009

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Bersaing

Bandung, 5 November 2014
Pengusul,



Lely Syiddatul Akliyah, ST., MSi.

Lampiran 3 Formulir Evaluasi Atas Capaian Luaran Kegiatan

FORMULIR EVALUASI ATAS CAPAIAN LUARAN KEGIATAN

Ketua : Dr. Hilwati Hindersah, Ir., MURP.

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Bandung

Judul : Peranan Ekosistem Mangrove Dalam Mendukung Sistem
Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Muaragembong
Kabupaten Bekasi

Waktu Kegiatan : tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

Luaran yang direncanakan dan capaian tertulis dalam proposal awal:

No.	Luaran Yang Direncanakan	Capaian
1.	Publikasi hasil penelitian di Jurnal 'Perencanaan Wilayah dan Kota' (Nasional) dan Jurnal 'Environmental Planning and Management' (International).	Publikasi dalam Jurnal Nasional Mimbar : " Identifikasi Status dan Nilai Manfaat Ekosistem Mangrove Untuk Pembangunan Muaragembong Secara Berkelanjutan".
2.	Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove yang terdapat di kawasan pesisir Kabupaten Bekasi	Draft "Kebijakan Pengelolaan dan pemanfaatan Ekosistem Mangrove di Kawasan Pesisir Muaragembong kabupaten Bekasi"

1. PUBLIKASI ILMIAH

	Keterangan
Artikel Jurnal Ke-1	
Nama Jurnal Yang Dituju	Mimbar Unisba
Klasifikasi jurnal	Jurnal Nasional Terkreditasi
<i>Impact Factor</i> Jurnal	
Judul artikel	Identifikasi Status dan Nilai Manfaat Ekosistem Mangrove Untuk Pembangunan Muaragembong Secara Berkelanjutan
Status Naskah (Beri Tanda ☐)	
☒ Draf artikel	

- Sudah dikirim ke jurnal	
- Sedang ditelaah	
- Sedang direvisi	
- Revisi sudah dikirim ulang	
- Sudah diterima	
- Sudah terbit	

2. PEMBICARA PADA PERTEMUAN ILMIAH

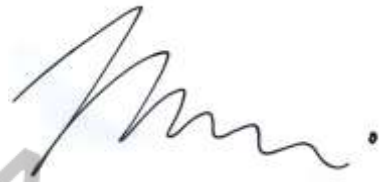
	Nasional
Judul Makalah	1. Keseimbangan Alam dalam Konsep Waterfront City di Kota Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi 2. Konsep Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi dengan Metode Biaya Perjalanan dan Metode CVM 3. Identifikasi Dampak Perubahan Ekosistem Pesisir terhadap Lingkungan di Wilayah Pesisir Kecamatan Muaragembong
Nama Pertemuan Ilmiah	Seminar Nasional
Tempat Pelaksanaan	Universitas Islam Bandung
Waktu Pelaksanaan	22 Mei 2014
- Draf makalah	
- Sudah dikirim	
- Sedang <i>review</i>	
- Sudah dilaksanakan	✓

3. CAPAIAN LUARAN LAINNYA

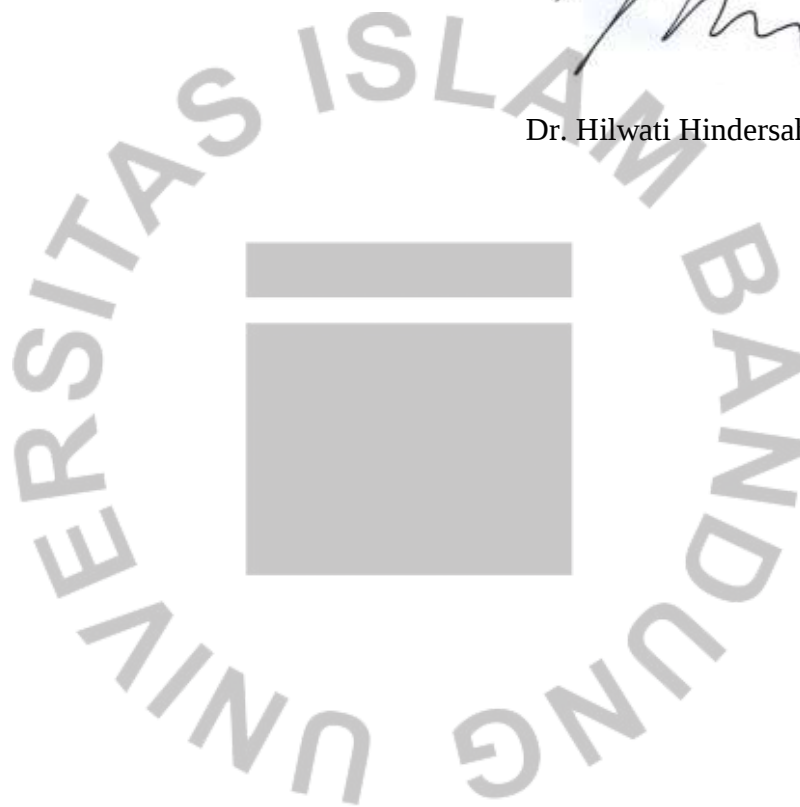
REKAYASA SOSIAL	Draft “Kebijakan Pengelolaan dan pemanfaatan Ekosistem Mangrove di Kawasan Pesisir Muaragembong kabupaten Bekasi”
------------------------	---

Kebijakan atau rekayasa sosial yang dibuat masih berupa draft karena hasil akhirnya harus menunggu hasil analisis pada tahap kedua.

Bandung, 5 November 2014
Ketua,



Dr. Hilwati Hindersah, Ir., MURP.



Lampiran 4 Draft Artikel Jurnal Akreditasi Nasional

IDENTIFIKASI STATUS DAN NILAI MANFAAT EKOSISTEM MANGROVE UNTUK PEMBANGUNAN MUARAGEMBONG SECARA BERKELANJUTAN

HILWATI HINDERSAH,¹ YULIA ASYIAWATI,² LELY SYIDDATUL
AKLIYAH³

^{1,2,3} Program Studi Perencanaan wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam
Bandung, Jl. TamanSari No. 1, Bandung 40116

Email: ¹ hilwati_hindersah@yahoo.com; ² yulia_asyiawati@yahoo.com;
³ ulil_sa@yahoo.com

Abstract. The existence of mangrove ecosystem in Kecamatan Muaragembong Bekasi Regency is in decline along with the rise of development that change mangrove forest into settlement and agricultural area. To achieve sustainable development, preserving the mangrove forest should be aligned with community economic development efforts. There is a need to identify the status and use value of mangrove ecosystem as the first step to know the role of mangrove in supporting society's economy system. Using groundcheck survey method and unstructured interview, this research reveals condition of the mangrove ecosystem that has already damaged with the tree density status ranging from 59 – 145 trees/ha. It is revealed that there are many use value components of mangrove forest ecosystem identified using travel cost method and/or the willingness to pay for the use value.

Keywords: *Ecosystem Status, Use Value, Sustainable Development*

Abstrak. Keberadaan ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi mengalami penurunan seiring dengan berkembangnya pembangunan yang mengubah hutan mangrove menjadi daerah pertanian dan permukiman penduduk. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, melestarikan hutan mangrove harus sejalan dengan upaya pembangunan ekonomi masyarakat. Untuk ini perlu diidentifikasi status dan nilai manfaat ekosistem mangrove sebagai langkah awal mengetahui peran hutan mangrove dalam mendukung sistem perekonomian masyarakat. Melalui metoda survai groundcheck dan wawancara tidak terstruktur, penelitian ini mengungkapkan bahwa kondisi ekosistem mangrove sudah mengalami kerusakan dengan status kerapatan pohon berkisar antara 59-1450 pohon/ha. Terungkap bahwa terdapat sangat banyak komponen nilai manfaat ekosistem hutan mangrove yang teridentifikasi dengan menggunakan metode biaya perjalanan dan/atau kesediaan membayar nilai manfaat.

Kata kunci: Status Ekosistem, Nilai Manfaat, Pembangunan Berkelanjutan

Pendahuluan

Terjadinya perubahan di wilayah pesisir dan laut selain disebabkan oleh gejala alam semata juga sangat dipengaruhi oleh kegiatan penduduk. Wilayah pesisir adalah wilayah yang mempunyai tekanan paling tinggi dibandingkan dengan wilayah daratan. Hal ini terjadi karena adanya kegiatan pembangunan yang meningkat sejalan dengan meningkatnya fungsi wilayah pesisir untuk pengembangan kegiatan permukiman, perdagangan, pelabuhan dan kegiatan lainnya, yang baik langsung maupun tidak langsung memberikan perubahan terhadap wilayah pesisir dan sumberdaya alam yang ada, diantaranya adalah ekosistem mangrove. Kegiatan penduduk ini mempengaruhi pada kualitas ekosistem mangrove yang terdapat di wilayah pesisir.

Keberadaan ekosistem mangrove di pesisir Kabupaten Bekasi saat ini mengalami penurunan seiring dengan berkembangnya pembangunan yang mengubah fungsi kawasan dari fungsi lindung ke fungsi budidaya yang mengakibatkan hutan mangrove di beberapa daerah pesisir dan pantai Kabupaten Bekasi mengalami penurunan. Salah satu daerah yang mengalami hal tersebut adalah daerah pesisir di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi.

Berkurangnya kualitas dan kuantitas ekosistem mangrove di pesisir Kecamatan Muaragembong memberikan pengaruh terhadap produksi perikanan, terbukti dari menurunnya beberapa jenis produksi perikanan. Hal ini disebabkan karena hilangnya fungsi ekologis dari ekosistem mangrove, yaitu sebagai tempat berlindung, mencari makan, memijah dan pengasuhan sumberdaya ikan dan spesies yang hidup pada kawasan ekosistem ini. Beberapa dampak negatif akan timbul sebagai akibat dari hilangnya komunitas ekosistem mangrove, yaitu fungsi perlindungan dan pengaman pantai secara alami akan hilang, sejalan dengan berkurangnya kualitas dan kuantitas ekosistem mangrove di wilayah pesisir. Hal ini mengakibatkan terjadinya banjir yang disebabkan oleh gelombang pasang, apalagi gelombang pasang yang diiringi dengan intensitas hujan di kawasan hulu Sungai Citarum tinggi, sehingga mengakibatkan rusaknya lahan pertanian dan permukiman penduduk yang terdapat di sekitar pesisir.

Fenomena di atas mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan masyarakat khususnya adalah masyarakat nelayan, karena produksi perikanan berkurang. Hal ini dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat, penurunan produksi perikanan, berbanding lurus dengan hilangnya areal hutan mangrove. Kerugian lain yang dirasakan oleh masyarakat di pesisir Muaragembong adalah berkurangnya produktivitas lahan pertanian dan perkebunan akibat terkena banjir dari gelombang pasang. Oleh karena itu upaya melestarikan hutan mangrove harus sejalan dengan upaya pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi pertanda bahwa tantangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah upaya menyelesaikan konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dengan upaya melestarikan alam (Hindersah, 2013: 529).

Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi status dan nilai manfaat ekosistem mangrove sebagai langkah awal untuk mengetahui peranan ekosistem mangrove dalam mendukung sistem perekonomian masyarakat di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi. Kajian awal ini diharapkan sudah dapat menghasilkan dasar-dasar pertimbangan untuk merumuskan strategi-strategi dalam pemanfaatan dan pengawasan penggunaan lahan mangrove agar nilainya tidak semakin menurun, baik secara ekonomi maupun ekologis secara berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan ini, melalui metode survey groundcheck dan metode wawancara secara tidak terstruktur dengan masyarakat pesisir Muaragembong telah dilakukan pengumpulan data. Dilanjutkan dengan metode tumpang tindih (overlay), dilakukan identifikasi status dan nilai manfaat ekosistem mangrove di Wilayah Pesisir Muaragembong. Variabel yang dijadikan indikator dalam melakukan identifikasi adalah luas kawasan ekosistem mangrove, jumlah pohon ekosistem mangrove yang ada, dan pemanfaatan ekosistem mangrove oleh masyarakat di pesisir Muaragembong.

Pengertian Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir mempunyai banyak definisi, diantaranya yang dijelaskan oleh Kay dan Alder (1999 dalam Asyiwati, 2010: 9) ; wilayah pesisir atau *coastal zone* adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Definisi lain tentang wilayah pesisir adalah yang dikemukakan oleh Sorensen dan McCreary (1990) dalam Asyiwati (2010: 9) menjelaskan bahwa wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan yang didefinisikan sebagai daerah *interface* atau daerah transisi dimana segala macam proses yang terjadi tergantung dari interaksi yang sangat intens dari daratan dan lautan. Oleh karena itu, wilayah pesisir mencakup kawasan peralihan antara ekosistem daratan dan lautan yang sempit, dengan garis rata-rata pasang tertinggi sampai 200 meter ke arah darat dan ke arah laut meliputi garis pantai pada saat rata-rata pasang terendah.

Secara ekologis wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Batas wilayah pesisir ke arah darat mencakup daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan (seperti pasang surut, percikan air gelombang, intrusi air laut dan angin laut), sedangkan batas wilayah pesisir ke arah laut meliputi perairan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah dan kegiatan manusia di daratan, termasuk air sungai dan aliran air permukaan (*run off*), sedimentasi, pencemaran dan antara lain yang merupakan penghubung (*channels*) bagi dampak yang dihasilkan dari kegiatan manusia di daratan ke lingkungan laut. Pemahaman tentang wilayah pesisir sangat bermacam-macam dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini tergantung pada penentuan batas definitif wilayah pesisir baik ke arah darat maupun ke arah laut.

Di sisi lain Dahuri *et.al.* (2004: 5-6) menerangkan bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, dimana batas wilayah pesisir ke arah darat adalah jarak arbitrer dari rata-rata pasang tertinggi (*mean high tide*) dan batas ke arah laut adalah batas yuridiksi wilayah atau negara. Pengertian yang lain dari wilayah pesisir menjelaskan bahwa wilayah pesisir merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem, diantaranya sumberdaya manusia,

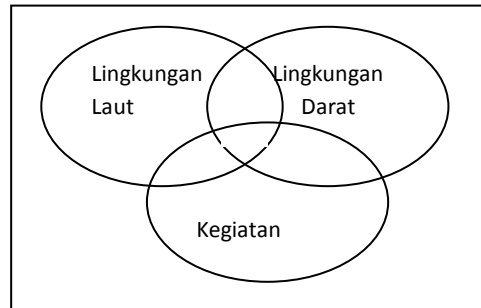
sumberdaya alam, sumberdaya buatan maupun sumberdaya dan yang merupakan satu kesatuan dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Wilayah pesisir adalah kawasan yang mempunyai sumberdaya alam yang potensial untuk dikembangkan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengelolaan wilayah pesisir perlu memperhatikan keterpaduan dan keberlanjutan agar sumberdaya yang ada (terutama sumberdaya yang tidak dapat pulih), tidak punah dan tidak terjadi degradasi sumberdaya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Anonim 2007c), wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, yang mempunyai keanekaragaman sumberdaya pesisir. Sumberdaya pesisir tersebut terdiri dari sumberdaya hayati (meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, *mangrove* dan biota laut lainnya); sumberdaya nonhayati (meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut); sumberdaya buatan (meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan); dan jasa-jasa lingkungan (berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir).

Ada 3 (tiga) karakteristik yang dipunyai oleh Wilayah pesisir, yakni : (1) Suatu wilayah pertemuan antara berbagai aspek yang ada di darat, laut dan udara, yang merupakan bentuk dari hasil keseimbangan dinamis suatu penghancuran dan pembangunan dari ketiga unsur tersebut.; (2) Mempunyai fungsi sebagai zona penyangga (*buffer zone*) dan habitat dari berbagai jenis sumberdaya hayati.; (3) Mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi karena merupakan sumber zat organik yang penting dalam rantai makanan laut.

Wilayah pesisir terdiri dari bermacam-macam aktivitas manusia yang mempengaruhi wilayah pesisir secara langsung dan tidak langsung, baik di lingkungan daratan maupun lingkungan perairan (Chua, 2006) dalam Asyiwati (2010 : 11). Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem lingkungan daratan dan

lingkungan perairan serta aktivitas manusia baik aktivitas sosial maupun ekonomi. Secara diagramatis dapat dideskripsikan seperti Gambar 1.



Gambar 1 Sistem Wilayah Pesisir

Gambar 1 menerangkan bahwa wilayah pesisir merupakan suatu sistem pesisir diisi oleh beberapa komponen ruang wilayah diantaranya permukiman, sumberdaya manusia beserta kegiatannya, sumberdaya alam, sarana dan prasarana; yang saling berinteraksi dalam suatu bentuk saling bergantung antara satu dengan yang lain secara teratur untuk mencapai tujuan. Tujuan dari interaksi antar subsistem yang terdapat dalam sistem wilayah pesisir adalah pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu untuk mewujudkan keserasian dan keseimbangan lingkungan pesisir di masa yang akan datang.

Karakteristik Wilayah Pesisir Kecamatan Muaragembong

Luas Wilayah Pesisir Muaragembong adalah sebesar 122,90 Km², mempunyai 6 (enam) desa yaitu Desa Pantai Bahagia, Pantai Bakti, Pantai Sederhana, Pantai Mekar, Pantai Jaya Sakti, dan Desa Pantai Harapan Jaya. Wilayah Pesisir Muaragembong mempunyai jumlah penduduk sebesar 37.358 jiwa (Kecamatan Muaragembong Dalam Angka, Tahun 2011) yang tersebar di seluruh bagian wilayah. Penggunaan lahan eksisting di wilayah ini didominasi oleh hutan lindung, disamping ada juga untuk penggunaan yang lain seperti permukiman, industri, pariwisata dan pertanian (lihat Gambar 2).



Gambar 2. Hutan Mangrove

Wilayah Pesisir Muaragembong merupakan muara dari Sungai Citarum dimana dalam muara sungai ini disebut juga sebagai ekosistem estuaria. Wilayah Pesisir Muaragembong mempunyai ekosistem estuari dan ekosistem mangrove (Asyiawati dan Akliyah : 5-6).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2006: 33) diperoleh bahwa luas ekosistem mangrove mengalami penurunan sebesar 6,74% (data tahun 1992 dan data tahun 2002). Sedangkan berdasarkan data pada tahun 2012 bahwa luas ekosistem mangrove di Wilayah pesisir Muaragembong adalah 822,24 ha, Kondisi ini menerangkan bahwa penurunan luas ekosistem mangrove sebesar 5,06% dibandingkan dengan data luas ekosistem mangrove pada tahun 2002. Perubahan peruntukan dari ekosistem mangrove ini didominasi untuk peruntukkan kegiatan budidaya perikanan (tambak). Kondisi ini dapat dilihat dari perubahan luas kawasan tambak yang menunjukkan penambahan luas tambak sebesar 4,55% (data tahun 1992 dan data tahun 2002). Sedangkan dari data tahun 2012 terjadi penambahan luas kawasan tambak sebesar 723,253 ha dari luas tambak tahun 2002 atau terjadi penambahan luas sebesar 17,60% (data tahun 2002 dan data tahun 2012). Sedangkan luas permukiman bertambah menjadi 3003,88 ha tahun 2001, dimana terjadi penambahan luas sebesar 707,40% dari luas permukiman pada tahun 2002 sebesar 372,043 ha. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran penggunaan dari lahan hutan mangrove berubah menjadi lahan tambak dan lahan permukiman. Hal ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kondisi ekosistem mangrove di wilayah ini.

Dari hasil pengamatan dan pengukuran yang dilakukan, kondisi ekosistem mangrove yang terdapat di Wilayah Pesisir Muaragembong saat ini sudah mulai

mengalami kerusakan. Indikator yang menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem mangrove ini adalah adanya kegiatan pembukaan lahan untuk pengembangan kegiatan perikanan budidaya (tambak) dan kegiatan permukiman yang dilakukan oleh penduduk yang berada di wilayah Pesisir Muaragembong. Lahan yang dibuka untuk kegiatan perikanan budidaya (tambak) dan permukiman adalah lahan yang berada pada ekosistem mangrove dan estuari, sehingga hal ini mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem di Wilayah Pesisir Muaragembong.

Wilayah Pesisir Muaragembong merupakan wilayah peralihan antara wilayah daratan dan wilayah lautan, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang adalah kegiatan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pertanian dan perdagangan. Ini dapat dilihat dari struktur mata pencaharian penduduk di Wilayah Pesisir Muaragembong, dimana penduduk yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani tambak dan nelayan adalah sebesar 49,85% dari jumlah penduduk wilayah. Sedangkan mata pencaharian lain yang diusahakan oleh penduduk wilayah Muaragembong dalam memenuhi kehidupan adalah sebagai petani, pedagang, buruh industri, jasa angkutan, karyawan/pensiunan, serta sebagai wiraswasta. Produksi kegiatan perikanan yang diusahakan oleh masyarakat Wilayah Pesisir Muaragembong berupa ikan belanak, bandeng, udang, kerang hijau dan jenis komoditi perikanan budidaya yang lainnya.

Identifikasi Status Ekosistem Mangrove

Kondisi ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong berdasarkan hasil observasi dan hasil studi yang dilakukan oleh Forestian (2011) menjelaskan bahwa sudah terjadi penurunan kerapatan mangrove dari 55,78% pada tahun 2001 turun menjadi 8,43% pada tahun 2010. Dari hasil survey yang dilakukan pada tahun 2014, kondisi eksisting kerapatan pohon mangrove untuk masing-masing desa berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1.
Kerapatan Pohon Mangrove di Muara Gembong

No	Lokasi Pengamatan	Kerapatan Pohon (pohon/ha)
1	Pantai Harapan Jaya	1450
2	Pantai Bahagia	187
3	Pantai Sederhana	617
4	Pantai Mekar	675
5	Pantai Jayasakti	1251
6	Pantai Bakti	59

Sumber : Hasil Observasi dan Hasil Analisis, 2014

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa status ekosistem mangrove di kawasan pesisir Muaragembong didominasi dengan status jarang dengan kerapatan pohon berkisar antara 59 – 1450 pohon/ha. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan, dimana kawasan ini banyak terdapat lahan tambak masyarakat.

Identifikasi Nilai Manfaat Ekosistem Mangrove

Metode untuk menganalisis nilai manfaat suatu sumberdaya, salahsatunya ekosistem mangrove sangat beragam. Salahsatu tahapan dalam analisis itu adalah melakukan identifikasi nilai manfaat yang ada di ekosistem mangrove tersebut. Diantara berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi nilai manfaat ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong yang sudah dilakukan diantaranya menggunakan pendekatan biaya perjalanan dan metode CVM (*Contingent Valuation Method*). Berdasarkan kegiatan yang pernah dilakukan (Akliyah dan Hindersah, 2014: 9) penilaian valuasi ekonomi ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi dengan metode biaya perjalanan (*Travel Cost*) dilakukan dengan melakukan wawancara kepada wisatawan yang melakukan kegiatan *ecotourism* dengan menghitung biaya-biaya perjalanan yang dikeluarkan. Biaya-biaya perjalanan yang dikeluarkan ini hampir sama dengan

kajian yang lain salahsatunya yang dilakukan oleh Akliyah dan Sundari (2006), diantaranya: (1) Biaya perjalanan dari rumah ke tempat wisata (Kecamatan Muaragembong); (2) Biaya penginapan; (3) Biaya transportasi lokal (sewa kapal) ; (4) Biaya konsumsi; (5) Biaya cinderamata (hasil olahan pohon mangrove dan ikan hasil tangkap); (6) Biaya dokumentasi; (7) Biaya-biaya lainnya selama perjalanan wisata.

Dalam Akliyah & Hindersah (2014:9), penilaian ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong dapat dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa wisatawan yang datang dengan menanyakan biaya-biaya di atas, kemudian dirata-ratakan. Hasil rata-rata biaya yang dikeluarkan berdasarkan wawancara tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah wisatawan yang datang per tahun. Biaya total ini yang akan menjadi nilai valuasi ekonomi ekosistem mangrove di Kecamatan Muaragembong berdasarkan metode biaya perjalanan (*Travel Cost Method*).

Penilaian dengan menggunakan metode CVM menurut Akliyah & Hindersah (2014:10), dapat dilakukan dengan menanyakan seberapa besar kesediaan nelayan/masyarakat membayar manfaat ekosistem mangrove yang ada di wilayah tersebut. Adapun komponen yang dapat dinilai diantaranya (Akliyah dan Hindersah, 2014:10-11): (1) Kesediaan membayar manfaat ekosistem mangrove sebagai tempat pemijahan ikan di perairan, pelindung daratan dari abrasi oleh ombak, pelindung daratan dari tiupan angin, penyaring intrusi air laut ke daratan dan kandungan logam berat yang berbahaya bagi kehidupan; (2) Kesediaan membayar fungsi mangrove sebagai tempat pemijahan dan penangkapan ikan; (3) Kesediaan membayar nilai manfaat ekosistem sebagai penahan abrasi (penyeimbang lingkungan); (4) Kesediaan membayar pohon mangrove yang dapat menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi berbagai aneka olahan seperti sirup, keripik, dodol, makanan ringan seperti onde-onde kering (lihat Gambar 3); (5) Kesediaan membayar manfaat pohon mangrove sebagai arang dan kayu bakar (lihat Gambar 4); (6) Kesediaan membayar manfaat pohon mangrove sebagai salah satu bahan untuk membuat kok yang digunakan olahraga

badminton; (7) Kesiediaan membayar manfaat ekosistem mangrove yang berfungsi ekologis sebagai habitat satwa liar (lutung); (8) Kesiediaan membayar manfaat ekosistem mangrove sebagai penyedia bahan bangunan (kayu).



Gambar 3. Buah Mangrove Vidada

Sumber: Hasil Observasi, 2014



Gambar 4 Batang mangrove

Sumber: Hasil Observasi, 2014

Variabel-variabel di atas dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan biaya awal yang ditawarkan kepada responden (masyarakat/nelayan) untuk kesediaannya membayar nilai manfaat ekosistem mangrove yang dimanfaatkan oleh mereka. Seberapa besar masyarakat mau membayar agar tetap bersedia mengelola dan mempertahankan ekosistem mangrove yang dimanfaatkan adalah besaran nilai manfaat ekosistem (Akliyah & Hindersah, 2014:11).

Simpulan dan Saran

Wilayah pesisir mempunyai arti strategis baik secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Pemanfaatan sumberdaya alam yang terdapat di wilayah pesisir yang tidak

memperhatikan keseimbangan lingkungan, akan memberikan eksternalitas negatif terhadap lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Eksternalitas negatif dari pemanfaatan sumbar daya alam di wilayah pesisir yang tidak memperhatikan kaidah keseimbangan lingkungan di Wilayah pesisir Muaragembong adalah terjadinya abrasi dan banjir yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat. Disamping itu juga mengakibatkan berkurangnya jumlah produksi hasil usaha masyarakat.

Status ekosistem mangrove di kawasan pesisir Muaragembong menunjukkan kondisi status jarang dengan kepadatan pohon berkisar antara 59 – 1450 pohon/ha. Pada sisi lain, ekosistem mangrove yang ada di Kecamatan Muaragembong ini memiliki nilai manfaat yang besar bagi masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai: bahan bakar (arang), bahan bangunan (kayu), bahan untuk membuat kok badminton, bahan untuk membuat sirup, dodol, kue, dan tentunya manfaat secara ekologi untuk menahan abrasi dan menyeimbangkan lingkungan.

Untuk memperbaiki ekosistem mangrove di Muaragembong diperlukan upaya menegakkan aturan tata ruang yang berwawasan lingkungan dengan konsisten. Upaya langsung adalah dengan menanam kembali pohon mangrove. Hal ini tentu perlu didukung partisipasi masyarakat setempat dan pemerintah daerah. *Stakeholder* di luar wilayah Muaragembong dapat diundang untuk berpartisipasi mengembalikan eksistensi hutan mangrove untuk berfungsi sebagai kawasan lindung.

DAFTAR PUSTAKA

- Akliyah, Lely S. dan Sundari, Eva S. (2006). Penilaian Valuasi Ekonomi Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Juanda Kota Bandung Dengan Metode Biaya Perjalanan, Laporan Penelitian, LPPM Unisba.
- Akliyah, Lely S. dan Hindersah, Hilwati. (2014). Konsep Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi dengan Metode Biaya Perjalanan dan Metode CVM: Seminar Nasional Menciptakan Nilai Tambah dalam Pembangunan Berkelanjutan, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung, 22 Mei 2014. Bandung, Indonesia.

Anonim. (2007). Undang-undang Nomor 27 tahun 2007, *tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*

_____. (2009). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2009 – 2029*. Bappeda Kabupaten Bekasi.

Asyiawati, Yulia. (2010). Analisis Status Ekosistem Pesisir bagi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir di Kawasan Teluk Kota Ambon : Disertasi. Institut Pertanian Bogor

Asyiawati, Yulia dan Akliyah, Lely S. (2014). Identifikasi Dampak Perubahan Fungsi Ekosistem Pesisir Terhadap Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kecamatan Muaragembong: Seminar Nasional Menciptakan Nilai Tambah dalam Pembangunan Berkelanjutan, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung, 22 Mei 2014. Bandung, Indonesia.

Chua TE. (2006). The Dynamic of Integrated Coastal Management : Practical Applications in the Sustainable Coastal Development in East Asia. Global Environment Facility/UNDP/PEMSEA. Quezone City. 468 p.

Clark JR. (1996). Coastal Zone Management : Handbook. United States of America : Lewis Publishers.

Dahuri R., Rais J. dan Sitepu MJ. (2004). Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta : Pradnya Paramita.

Handayani, S. (2006). Kajian Perubahan Penggunaan Lahan di pesisir Muaragembong, Bekasi dengan Menggunakan Citra Landsat 7ETM+ : Skripsi. Institut Pertanian Bogor.

Fauzi, A. (2006). Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi. Gramedia Pustaka Utama.

Forestian, O. (2011). Estimasi Biomassa dan Kerapatan Vegetasi Mangrove Menggunakan Data Landsat ETM+ (studi di Hutan Lindung dan Hutan produksi tetap Muaragembong, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa barat) : Skripsi. Institut Pertanian Bogor.

Hindersah, Hilwati. (2013). “Islamic Concept of Sustainable Development in The River Estuary”. Redefining the Concept of Islamic Architecture and Built Environment, *International Conference Proceeding*, International Conference

on Architecture & Built Environment, 7th & 8th November 2013, KAED, IIUM
& Putrajaya, Malaysia.

